

MOESLIM CHOICE

EDISI 51 • MARET 2022 / Th. V

ISSN_2614-2783



Rp 50.000

**CETAK
WIRUSAHA BARU
DI PESANTREN**

**TERJEBAKNYA
ETNIS MUSLIM
DALAM PERANG
RUSIA-UKRAINA**

**PENTINGNYA
VAKSIN
BOOSTER
UNTUK LANSIA**

**SUMSEL
JADI ROLE
MODEL
TRANSPORTASI
UMUM TERINTEGRASI**

**PERCEPATAN BSI
JADI BUMN
UNTUK
KEMASLAHATAN**

JHT KEMBALI KE ATURAN LAMA

MOESLIM^{CHOICE}.COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MC TV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIM^{CHOICE}
M A G A Z I N E

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Zulfahmi Jamba

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTURIrmayani, Rosyidah Rozali,
Fahmi Jamba, M. Rahmat**REDAKTUR BISNIS**.H. M Firmansyah
Muhammad Rizky,
Muhammad Raden Solehin**REPORTER**Giri Sasongko, Aldi Rinaldi,
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadh, i,
Muhammad Fiqri,
Muhammad Khaidir**KEPALA BIRO SUMSEL**

Rahmat Romli

FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

TATA LETAK

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab
percetakan

>>SALAM REDAKSI

SYA'BAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tibalah Maret 2022 pada kalender gregorian, beriringan dengan Sya'ban 1443 dalam almanak hijri. Tradisi umat Islam Nusantara pada bulan kedelapan dalam kalender hijri ini adalah peringatan nisfu (pertengahan) Sya'ban yang menurut perhitungan (hisab) bertepatan dengan 18 Maret 2022.

Sya'ban dan nisfu-nya merupakan pengingat bahwa Ramadan segera tiba. Maka ada yang berpendapat bahwa Sya'ban yang berakar pada kata sya'aba (cabang) merupakan titik simpang antara Rajab dan Ramadan. Toh ada pula yang mengisahkan nama Sya'ban sebagai memencar, bertebaran.

Sya'ban dalam makna bercabang maupun memencar relevan dengan perkembangan umat Islam khususnya di Indonesia di bulan yang sama. Misalnya saja, musim penghujan yang masih berlangsung pada Maret 2022 akan menumbuhkan pucuk hingga cabang baru pada tanaman.

Namun, tidak semua tanaman bercabang. Lazimnya, kelapa dan kelapa sawit tumbuh tanpa cabang. Toh persoalan terkait dengan kelapa dan kelapa sawit yang bercabang-cabang. Ya, produk hilir kelapa sawit, katakanlah minyak goreng, terasa kian langka belakangan ini. Oleh sebab itu pula harganya melambung. Sedangkan produk hilir kelapa saat ini akan kalah dalam persaingan harga dengan kelapa sawit.

Hilirisasi produk kelapa sawit pun bercabang-cabang. Bukan hanya dapat menjadi bahan pangan seperti minyak goreng maupun margarine, kelapa sawit dapat pula menjadi bahan bakar biodiesel, misalnya. Belum lagi produk lainnya seperti kebutuhan sehari-hari semisal deterjen, sabun padat, juga shampoo pencuci rambut. Namun, karena bahan bakunya sama dan harganya sedang naik, maka tak mengherankan jika harga produk hilir kelapa sawit yang beraneka pun akan meningkat pula. Jadi, bercabang-cabang juga kemungkinan kenaikan harga barang-barang belakangan ini.

Nah, soal harga berada di ranah ekonomi dan bisnis. Namun, kebijakan harga dapat pula bersifat politis. Bercabang lagi persoalannya. Begitupun sudah banyak yang mafhum bahwa ekonomi dan politik adalah dua ranah yang jalin berkelindan meski memiliki dinamikanya sendiri-sendiri.

Pada Sya'ban kali ini ranah politik dan ekonomi kita, masing-masing maupun dalam kelindannya tampak semakin berdinamika tinggi. Beberapa antaranya akan mengisi halaman-halaman MoeslimChoice edisi Maret 2022.

Selalu menjadi harapan bahwa setiap edisi MoeslimChoice akan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk umat Islam dan segenap bangsa kita yang beragama. Baik di lingkungan internal umat Islam maupun dalam relasi umat dengan negara dan bangsa.

Akhirnya, untuk menghemat kata, silakan majelis pembaca membuka halaman-halaman berikutnya. Sampai jumpa pada Ramadan, bulan depan. ♦

>>COVER EDISI INI


www.moeslimchoice.com
ALAMAT REDAKSI/IKLAN

PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com
FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)
TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
YOU TUBE CHANNEL:
[moeslimchoice TV](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

>>DAFTAR ISI



06

LAPORAN UTAMA

Dua program jaminan menjadi sorotan sekaligus. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan jaminan hari tua melalui BPJS Ketenagakerjaan.

20

LAPORAN KHUSUS

Panjang surat edaran itu empat halaman. Hikmahnya yang akan berkepanjangan.



30

EKONOMI SYARIAH

Bank Syariah Indonesia akan menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status persero. Melalui penyertaan modal negara tentunya.



48

SUMSEL SYARIAH

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Walikota Palembang Harnojoyo, melaunching Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum (GNKAU).



42

FASHION

Membahas trend fashion seperti tidak ada habisnya, dunia fashion terus berkembang dengan pesat, para desainer pun berlomba memperlihatkan gaya busana dengan identitas Indonesia.





56

BIROKRASI

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perkuat core values Aparatur Sipil Negara (ASN) Ber-AKHLAK. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menggelar kegiatan "Kemendagri Ber-AKHLAK Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0". Acara ini dilaksanakan secara hybrid di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (23/2/2022).



80

PALEMBANG EMAS DARUSSALAM

Kota Palembang ditunjuk menjadi kota pertama percontohan gerakan penggunaan transportasi umum di Indonesia dengan menjadi tuan rumah Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum (GNKUA). Gerakan nasional ini resmi dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Budi Karya Sumadi.

REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 18 | UFUK
- 34 | PRODUK
- 36 | MUALAF
- 38 | KEMENAG
- 46 | OPINI
- 54 | KOLOM
- 72 | PARLEMEN
- 78 | KESEHATAN
- 84 | KAJIAN
- 90 | RESENSI
- 92 | DUNIA ISLAM
- 98 | KISAH INSPIRATIF

86

ISLAMICTAINMENT

Hidayah bisa datang kapan saja, di mana saja dan juga bisa terjadi kepada siapa saja, tentu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan tak sedikit non-Muslim yang mendapatkan hidayah tersebut, hingga membuatnya tertarik dengan ajaran Islam, lalu mempelajarinya, yang pada akhirnya memutuskan memeluk agama Islam dan menjadi mualaf.





JHT KEMBALI KE ATURAN LAMA

Dua program jaminan menjadi sorotan sekaligus. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan jaminan hari tua melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih dulu soal jaminan hari tua (JHT) yang ramai hingga mengundang aksi unjuk rasa. Sedangkan soal jaminan kesehatan nasional menyusul kemudian.

Belum berlaku namun sudah mengundang protes. Begitulah nasib ketentuan yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengenai pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT yang hanya dapat dicairkan saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan 56 tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No-

mor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang disahkan pada 4 Februari 2022.

"Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun," begitu antara lain isi Peraturan Menteri itu. Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun itu juga termasuk peserta yang berhenti bekerja. Peserta yang berhenti bekerja, meliputi pekerja yang mengundurkan

diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan mereka yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Selain usia pensiun, manfaat JHT juga dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Sedangkan manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris peserta. "Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun," demikian bunyi Pasal 7 ayat 1 Perme-



aker Nomor 2 Tahun 2022.

Permenaker itu sedianya baru berlaku tiga bulan setelah disahkan sebagaimana bunyi Pasal 15 beleid itu. Jadi, Mei 2022.

Namun reaksi sudah bermunculan beberapa hari setelah pengesahan Permenaker itu. Terutama dari kalangan pemangku kepentingannya, mereka yang terkait langsung dengan soal tenaga kerja. Bukan cuma di forum resmi atau media arus utama, melainkan juga di media sosial.

Di media sosial, salah satu contohnya adalah akun twitter Tukang Rekrut @mas_recruiter. Akun ini menulis rangkaian kicauan (thread) panjang pada 10-11 Februari 2022. Intinya terjadi perubahan ketentuan pada Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang menggantikan Permenaker No 19 Tahun 2015. Ya perubahan utamanya tentang pengambilan manfaat JHT di usia 56 tahun itu, serta lebih ribet.

Sikap resmi pun segera muncul dari kalangan serikat pekerja. Sehari setelah

kicauan Tukang Rekrut, Federasi SBPI (Serikat Buruh Persatuan Indonesia) meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mencabut Permenaker No 2 Tahun 2022 itu. "Tentu saja kebijakan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang pencairan JHT yang menetapkan pencairan hanya boleh dilakukan di usia 56 tahun, membuat buruh makin terhimpit. Apalagi, upah hanya naik 1,09 persen dan bahkan di Jawa Tengah ada yang naik hanya 0,78 persen, tidak sampai satu persen dan maraknya PHK akibat pandemi," ujar Ketua Umum Federasi SBPI, Dian Septi Trisnanti, Sabtu 12 Februari 2022.

Menurut Dian, dalam kondisi kesejahteraan buruh yang merosot, keberadaan JHT menjadi semacam dana yang diandalkan ketika terhimpit dalam kesulitan ekonomi. Tak jarang ketika terjadi PHK maka dana JHT menjadi andalan bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saat sedang menganggur atau belum memperoleh pekerjaan.

"Bila pemerintah serius memberikan jaminan sosial bagi buruh dan keluarganya, maka seharusnya ada pemenuhan upah yang layak sesuai kebutuhan riil, upah minimum yang memenuhi kebutuhan riil dasar buruh, menjamin kepastian kerja (tidak ada kontrak/out-sourcing), memberi fasilitas bagi buruh dan keluarga seperti daycare bagi anak buruh, kerja layak, pendidikan murah dan berkualitas, kesehatan memadai murah dan berkualitas, tanpa privatisasi aset kekayaan yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan jaminan sosial yang betul-betul menjamin hari tua bagi seluruh pekerja informal maupun formal," paparnya.

Karena itu, Federasi SBPI menuntut Ida Fauziyah berhenti mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan buruh dan keluarganya. Ia meminta agar Ida mencabut Permenaker tersebut.

"Atau ya seperti biasa kami akan melakukan aksi-aksi mobilisasi massa maupun aksi online (aksi offline dan online). Lebih baik Ida Fauziyah mun-

dur bila tidak bisa melindungi pekerja. Contohnya SK Trimurti, menteri perburuhan pertama yang betul-betul berpihak pada buruh.

Aksi online yang menonjol adalah petisi di Change.org berjudul "Gara-gara aturan baru ini, JHT tidak bisa cair sebelum 56 tahun", mendapat dukungan. Petisi ini untuk menolak aturan terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT yang hanya bisa dicairkan pada usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.

Dengan lebih dari 300.000 tanda tangan, petisi ini akan memecahkan rekor dengan menjadi salah satu petisi paling banyak ditandatangani di Change.org.

Hari Tuanya saat usia pensiun. Jadi, kalau buruh/pekerja di-PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK.

"Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK. Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja," ujar Suhari Ete, sang penulis petisi.

Sedangkan aksi offline berupa unjuk rasa beberapa kali. Yang paling mencolok tentu saja aksi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu, 16

Tua (JHT). Dalam dialog tersebut Menaker Ida Fauziah menjelaskan secara gamblang terkait dengan latar belakang keluarnya Permenaker 2/2022, tujuan dan maksud, serta hal-hal yang terkait dengan jaminan hari tua dan Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

"Jika kita flashback, ketika Permenaker 19/2015 diberlakukan saat itu, kita belum memiliki alternatif skema Jamsos bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK. Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua," kata



Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri

Petisi ini bermula dari Suhari Ete, yang menyuarakan bersama-sama untuk tolak dan #BatalkanPermenaker Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Dengan aturan baru itu, bagi buruh yang di PHK atau mengundurkan diri, baru bisa mengambil dana Jaminan

Februari 2022. Menteri Ida Fauziyah sempat menerima sejumlah pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menggelar demo.

Menteri Ida pun berdialog terkait terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari

Ida Fauziyah.

Kenapa saat Permenaker Nomor 2/2022 sudah diundangkan, namun JKP belum efektif? Program JKP ini, lanjut Menaker Ida Fauziyah sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari Pemerintah sebesar Rp 6 triliun dan Rp 823 miliar. Untuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga su-

dah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling.

Mendengar penjelasan Menaker, Ida Fauziyah, pimpinan SP/SB cukup memahami namun juga menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan hadirnya Permenaker 02/2022. Menaker menyimak dan mendengar secara serius terhadap masukan-masukan tersebut. "Kami sangat mengapresiasi terhadap masukan-masukan tersebut dan akan kita jadikan bahan kajian," tegas Menaker.

Sedangkan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI) Riden Hatam Aziz mengeluarkan pernyataan usai kelompok buruh dari FPSMI, KSPI, KPBI, dan beberapa serikat buruh lain melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Kami memberikan waktu selama dua minggu kepada Menaker untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022," kata Riden dalam keterangannya, Kamis, 17 Februari.

Riden melanjutkan, buruh telah meminta kepada Ida agar semua para pekerja yang di-PHK atau habis kontrak tetap dilayani seperti biasa ketika mengambil JHT. Lebih lanjut, jika tuntutan ini belum terpenuhi dalam dua minggu ke depan, buruh akan kembali menggeruduk kantor Kemnaker dengan jumlah massa yang banyak.

"Jika dalam waktu dua minggu belum Menaker belum melakukan revisi, bisa dipastikan kaum buruh akan kembali melakukan aksi besar-besaran," ucapnya.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut Menteri Ida akan menampung terlebih dahulu permintaan buruh mengenai Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program JHT.

Ia menegaskan, peraturan itu diundangkan pada 4 Februari 2022 dan akan mulai berlaku pada 4 Mei 2022. Dengan demikian maka terdapat waktu tiga bulan untuk memberikan pemahaman semua pihak atau sosialisasi. "Kemudian juga untuk memberikan waktu bagi para pekerja dan pengusaha untuk memahami betul makna dari Permenaker tersebut," ungkap Indah.

Belakangan, Presiden Joko Widodo

memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ke Istana Negara. Jokowi memanggil Airlangga dan Ida karena mengetahui adanya polemik mengenai jaminan hari tua (JHT) yang diprotes oleh kelompok buruh.

Kepada dua menternya, Jokowi memerintahkan agar Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 mengenai aturan baru JHT direvisi. Jokowi meminta pencairan JHT dipermudah.

"Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan,



yang lainnya," ungkap dia.

Sedangkan Menteri Ida Fauziyah memastikan akan segera revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT) setelah dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana. "Bapak Presiden sangat memperhatikan nasib para pekerja/buruh, dan meminta kita semua untuk memitigasi serta membantu teman-teman pekerja/buruh yang terdampak pandemi ini," ungkapnya.

Menaker Ida menambahkan, dalam arahnya, Presiden Jokowi juga berharap dengan adanya tata cara klaim JHT yang lebih sederhana, maka dapat mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kon-

 **Matriks Perubahan Aturan terkait Pengambilan JHT** 

NIL	ASPEK	PERMENAKER 19 TAHUN 2015	PERMENAKER 2 TAHUN 2022
6	Kelengkapan dokumen klaim JHT karena meninggal dunia	<ul style="list-style-type: none"> Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia Copy paspor Copy visa bagi tenaga kerja WNI 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Peserta WNI: <ul style="list-style-type: none"> Kartu peserta BPJSTK Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia Paspor
7	Kelengkapan dokumen klaim JHT karena cacat total tetap	<ul style="list-style-type: none"> Asli kartu peserta Suket, dokter 	<ul style="list-style-type: none"> Kartu peserta BPJSTK Suket, Dokter KTP atau identitas lain
8	Kelengkapan dokumen klaim JHT karena peserta meninggal dunia	<ul style="list-style-type: none"> Peserta WNI: <ul style="list-style-type: none"> Asli kartu peserta Surat pernyataan dari RS/kepositifan/keusahan Suket, ahli waris Copy KTP dan KK yang masih berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta WNI: <ul style="list-style-type: none"> Kartu peserta BPJSTK Suket, Kemakan dari penilai yang berwenang Suket, ahli waris KTP atau identitas lainnya dari ahli waris KK Peserta WNI: <ul style="list-style-type: none"> Kartu peserta BPJSTK Suket, Kemakan dari penilai yang berwenang Suket, ahli waris dari Kantor pemukiman negara tempat Peserta berdomisili Paspor atau buku identitas lainnya dari ahli waris
9	Bentuk dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menyebutkan bentuk dokumen fisik/elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen dimaksud dapat berupa dokumen elektronik atau fisik

 **Matriks Perubahan Aturan terkait Pengambilan JHT** 

NIL	ASPEK	PERMENAKER 19 TAHUN 2015	PERMENAKER 2 TAHUN 2022
1	Pembertarikan	Masih berlaku pada saat masa berlaku (di 3 Mei 2022)	Belaku pada tanggal 4 Mei 2022
2	Kriteria Pembayaran	Pembayaran manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri atau PHK dibayarkan kepada peserta setelah melewati masa tunggu 1 bulan dari saat berakhirnya pengunduran diri atau PHK dari perusahaan/terlaksana	Pembayaran manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri atau PHK dibayarkan kepada peserta pada saat peserta mencapai usia 55 tahun
3	Kelengkapan dokumen klaim JHT usia 55 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Asli kartu peserta Suket, Berhenti kerja karena usia pensiun dari perusahaan Copy KTP & KK yang masih berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Kartu peserta BPJSTK KTP atau identitas lain
4	Kelengkapan dokumen klaim JHT karena mengundurkan diri	<ul style="list-style-type: none"> Asli kartu peserta Suket, Pengunduran diri dari perusahaan Copy KTP & KK yang masih berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Dibatal ketika telah Usia 55 tahun dengan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> Kartu peserta BPJSTK KTP atau identitas lain
5	Kelengkapan dokumen klaim JHT karena PHK	<ul style="list-style-type: none"> Asli kartu peserta Suket, Pengunduran diri yang telah dibatalkan ke PHK atau penetapan PHK Copy KTP & KK yang masih berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Dibatal ketika telah Usia 55 tahun dengan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> Kartu peserta BPJSTK KTP atau identitas lain

dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK," kata Pratikno, Senin, 21 Februari.

Namun, Pratikno belum menjelaskan lebih detail soal isi revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut. "Bagaimana nanti pengaturannya, akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi

konduksi."Bapak Presiden juga meminta kita semua, baik pemerintah, pengusaha, maupun teman-teman pekerja/buruh untuk bersama-sama mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, sehingga dapat mendorong daya saing nasional," ujarnya.

Seperti apa revisi ketentuan pembayaran JHT yang juga kondusif untuk daya saing investasi nasional?Tentu saja banyak yang menantikannya. Menaker Ida bilang, revisinya kembali ke aturan lama. ♦

JKP SEIRING JHT

Sebenarnya ada jaminan lain jika buruh kehilangan pekerjaan sebelum usia pensiun. Namanya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun, kalangan pekerja menilai-nya belum bisa menjadi talangan, apalagi andalan.

JKP adalah jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh pemerintah serta rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Menurut PP No. 37 tahun 2021, manfaat JKP berupa uang tunai diberikan setiap bulan selama enam bulan, dengan rincian 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

Upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah upah terakhir pekerja yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas Rp5 juta. Selain uang tunai, pekerja juga mendapatkan akses informasi pasar kerja dan bimbingan karier. Seorang pekerja da-

pat menerima manfaat JKP tiga kali selama usia kerjanya.

Sedangkan JHT adalah tabungan wajib yang dananya dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja. Ia dibayarkan tunai sekaligus saat pekerja menginjak usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total. Sebagian dana JHT dapat dicairkan oleh pekerja secara terbatas setelah 10 tahun menjadi peserta.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan bahwa Permenaker No. 9 Tahun 2015 membolehkan JHT dicairkan sebelum usia pensiun karena waktu itu ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. "Setelah membuat peraturan tentang JKP, yang

merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, pemerintah ingin mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua," ujarnya.

Menurut Menteri Ida, program JKP sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari pemerintah sebesar Rp 6 triliun dan Rp823 miliar. "Untuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling," kata Bu Menteri, Rabu, 16 Februari 2022.

Tapi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyangkal



Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal

JKP dapat menalangi kebutuhan pekerja yang di-PHK. Alasannya, tidak ada jaminan mereka bisa mendapatkan pekerjaan lagi setelah enam bulan.

Tambahan pula, JKP juga tidak bisa diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri untuk pensiun dini atau memulai usaha sendiri. Sejauh ini, kata Said, JHT menjadi tumpuan hidup bagi banyak pekerja dan lazim digunakan sebagai modal usaha.

"JHT itu penyangga untuk buruh bisa bertahan hidup; atau yang ingin mengundurkan diri, atau ingin pensiun dini. JHT juga bisa digunakan untuk modal usaha," ujarnya.

Said juga mempertanyakan berapa lama modal awal pemerintah untuk JKP bisa bertahan. Menurut data pemerintah sendiri, dua tahun lalu angka PHK sudah menembus tiga juta. Tahun ini, dengan situasi pandemi, diperkirakan melebihi empat juta. "Kalau tiap orang dapat dua juta, kali empat juta (yang kena PHK), jadi Rp8 triliun. Itu saja sudah minus," kata dia.

Menanggapi soal ini, Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menjelaskan bahwa manfaat uang tunai dari JKP bisa lebih besar dari rata-rata manfaat JHT untuk jangka pendek. Menurut dia, data dari BPJS Ketenagakerjaan mencatat, 66 persen pencairan JHT selama ini nilainya di bawah Rp10 juta, atau rata-rata Rp7,5 juta.

Dita juga menegaskan JKP bukan pengganti upah. Menurut dia, JKP adalah dana bridging atau talangan sebelum pekerja yang di-PHK mendapatkan pekerjaan baru.

Mengenai pekerja yang mengundurkan diri untuk memulai usaha, Dita mengusulkan agar mengakses bantuan program wirausaha yang disediakan Kementerian dan Pemda. "Pakai skema Bansos, jangan pakai skema Jamsos, karena itu kantongnya beda, peruntukannya beda," ujarnya.

Di sisi lain, masih ada kelemahan JKP: Baru bisa diakses setelah buruh bekerja selama 12 bulan. "Kalau enam bulan kita bekerja kemudian kena PHK, bagaimana dapatnya manfaat dari JKP itu?" kata Bimo Aria Fundrika, pengurus Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, Sindikasi, yang anggotanya kebanyakan adalah pekerja muda.

Sedangkan pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga M Hadi Shubhan mengemukakan, kurang layak membandingkan JKP dengan JHT. "Jika masa kerja mencapai puluhan tahun, dana JHT jauh lebih besar dari JKP," ujarnya.

Menurut Hadi, JKP juga dua hal yang sangat berbeda pijakannya. JHT, sambungnya, adalah uang pekerja berbagi dengan pengusaha (co-sharing).

"JHT tidak ada uang pemerintah sama sekali. Sedangkan JKP itu diakui sebagai uang pemerintah tapi kan sebenarnya

Toh Hadi mengakui JKP akan berdampak positif dalam jangka panjang. Program JKP, kata dia, akan membuat pemerintah lebih proaktif dalam mengawasi perusahaan yang sembarangan main PHK yang akan menambah beban pemerintah.

Namun, dalam jangka pendek, saat



Pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga M Hadi Shubhan



Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari

rekomposisi dari iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)," ungkapnya. Dari sisi ini, muncul pertanyaan mengapa JHT harus diatur oleh pemerintah?

situasi ekonomi di masa dan pasca-pandemi yang rentan, mengandalkan JKP malah bisa merugikan pekerja yang terdampak untuk kesinambungan hidupnya. Jadi, JHT tetap andalan untuk dana talangan. ♦



BERMULA DARI SYARAT JUAL-BELI TANAH

Susul-menyusul dengan keriuhan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk tenaga kerja, muncul hal serupa pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Malah cakupannya pun lebih luas.

Lebih dari aturan JHT dari Menteri Ketenagakerjaan, ketentuan menyangkut JKN yang menjadi kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berlaku lebih cepat. Jika ketentuan JHT baru berlaku pada 4 Mei 2022, dan itupun akan direvisi, sebagian ketentuan mengenai JKN berlaku mulai 1 Maret 2022.

Selain karena terbit lebih dulu, ketentuan mengenai JKN ini landasannya adalah perintah atau instruksi Presiden Joko Widodo. Dalam Instruksi Presiden (Inpres)

No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang terbit pada Kamis, 6 Januari 2022 itu, Presiden menginstruksikan kepada para menteri kabinet dan kepala lembaga pemerintahan, juga gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan program itu.

Termasuk awal mengundang reaksi adalah ketentuan yang berlaku mulai 1 Maret 2022, menyangkut persyaratan melampirkan salinan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan dalam layanan peralihan

hak atas tanah maupun jual-belinya. Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sendiri yang mulai mensosialisasikannya sejak pertengahan Februari 2022.

Antara lain melalui media sosial. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, misalnya, pada 17 Februari 2022 berkicau soal persyaratan salinan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan itu. "Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli



harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan. Demikian untuk menjadi maklum,” demikian bunyi kicauan di akun twitter @KantahKabJepara.

Kicauan instansi level kabupaten ini pun melampirkan infografis yang menjelaskan dasar hukum kebijakan tersebut. Di gambar itu dipaparkan dasar hukum persyaratan kepersertaan BPJS Kesehatan dalam praktik jual beli tanah dan rumah.

Selain Inpres, dasar hukum yang digunakan adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/II/2022 yang mengatur tentang peralihan hak milik atau jual beli tanah, rumah dan rumah susun. Sedangkan kabupaten di pantai utara Jateng ini memang memiliki fasilitas Rumah Susun Sewa di kawasan tepi pantai Ujungbatu yang berjarak relatif dekat dengan Kantor BPJS Kesehatan kabupaten setempat.

Pejabat pusat di Kementerian ATR BPN kemudian mengkonfirmasi soal kabar kewajiban menyertakan kartu BPJS Kesehatan dalam kegiatan jual beli tanah. Kepala

Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar-Lembaga Biro Humas Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan mengatakan aturan tersebut mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. “Alasannya adalah perintah dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022,” ungkap Indra, Sabtu 19 Februari 2022

Khusus untuk ranah Kementerian ATR/BPN, Inpres itu menyebutkan menteri harus memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli adalah peserta aktif dalam program JKN. Rupanya Inpres itu mendapat tanggapan cepat.

Juru bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan kebijakan menyertakan kartu BPJS Kesehatan akan berlaku pada 1 Maret 2022. Kementerian bakal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam waktu dekat. “Nanti disampaikan, setiap pengajuan jual beli tanah mohon dilampirkan (kartu) BPJS Kesehatan. Itu kan persoalan mudah saja,” ujar Taufiqulhadi.

Menurut dia, langkah ini merupakan

salah satu upaya untuk mendorong seluruh masyarakat terdaftar dalam program JKN. Melalui program ini pemerintah ingin memastikan semua penduduk memiliki kepastian jaminan kesehatan. “Ini bagian dari kehadiran negara, dengan wadah salah satu di antaranya melalui ATR BPN. Dengan demikian ini bagian dari tanggung jawab presiden,” ucapnya.

Tanggapan pun segera datang dari kalangan wakil rakyat. Wakil Ketua Komisi Pertanahan DPR Luqman Hakim meminta Menteri Agraria Sofyan Djalil membatalkan kewajiban menyertakan kartu BPJS Kesehatan dalam kegiatan jual beli tanah. Kewajiban ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jika dalam Inpres ini terdapat kekeliruan berkaitan dengan masalah pertanahan, kata dia, maka seharusnya Sofyan memberi masukan agar direvisi. Sehingga rakyat tidak dirugikan. “Jangan malah sebaliknya, bersikap seolah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakan-

nya," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Februari 2022.

Sedangkan Anggota Komisi II DPR RI Guspardy Gaus tak setuju terkait kebijakan BPJS Kesehatan jadi syarat pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari akad jual beli. Menurut dia, kebijakan tersebut mengada-mengada dan tidak rasional.

"Ini adalah kebijakan yang absurd, mengada-ada dan bisa dikategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan," kata Guspardy kepada wartawan, Senin, 21 Februari 2022.

Dalam pandangan politisi Partai Amanat Nasional ini, syarat jual beli tanah dan kepemilikan rumah susun harus menyertakan keanggotaan BPJS Kesehatan itu jauh panggang dari api dan tidak ada

Sedangkan Anggota DPR RI Komisi IX Kurniasih Mufidayati mengemukakan, kebijakan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan justru malah "menambah beban masyarakat" karena berdampak pada proses administrasi banyak hal sehingga "menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan publik". Ia pun menambahkan, sebenarnya pemerintah masih bisa melakukan cara lain yang tidak membebani masyarakat karena menurut dia jumlah masyarakat yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan tidak terlalu signifikan untuk kemudian pemerintah bisa menerapkan aturan tersebut.

"Kepesertaan BPJS Kesehatan ini memang harus dioptimalkan, betul, tetapi harus dengan cara yang tidak menambah beban, lebih edukatif, dan lebih mengajak," kata Kurniasih.

Kesehatan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil pun menjelaskan langsung kepada publik. Menurut dia, program BPJS Kesehatan ini adalah program yang paling baik, serta merupakan tanggung jawab negara sebagai amanat konstitusi untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

"Program ini adalah program yang harus kita dukung bersama seluruh rakyat Indonesia. Kedua, program ini adalah sistem gotong royong, semua rakyat Indonesia harus chip in, berpartisipasi supaya program ini berjalan," ujar Sofyan dalam wawancara dengan stasiun Metro TV, Senin, 21 Februari 2022.

Menurut Pak Menteri Agraria, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 menginstruksikan kepada 30 kementerian/lembaga untuk menjamin bahwa pelayanan-pelayanan

korelasinya. Ia juga menegaskan, keinginan pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan tidak perlu mengaitkan dengan transaksi jual beli tanah masyarakat.

"Sungguh tidak adil, memanfaatkan segala infrastruktur yang ada di dalam pemerintahan untuk 'memaksa' masyarakat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Enggak nyambung logikanya," tandasnya.

Politisi PKS itu menilai justru yang harus diperhatikan pemerintah adalah cara untuk meningkatkan kualitas layanan BPJS Kesehatan. "Kalau layanannya meningkat, layanannya baik, pembayaran klaim lancar, faskes bisa survive memberi pelayanan lebih baik, saya rasa kepesertaan yang tinggal 20 persen itu bisa terpenuhi," ujar Kurniasih.

Seiring munculnya tanggapan yang cenderung menentang ketentuan jual-beli tanah dengan syarat kepesertaan BPJS

publik yang ada dapat bantu memeriksa soal status keaktifan Kartu BPJS Kesehatan masyarakat. "Dalam hal ini, jika orang ingin jual tanah atau rumah atau beli rumah, dia ingat kalau belum bayar BPJS Kesehatannya. Begitu juga nanti ada pelayanan-pelayanan lain, misalnya OSS (Online Single Submission, red), itu perlu diingatkan tentang status keaktifan BPJS Kesehatannya," ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk berparti-

sipasi dalam program BPJS Kesehatan. "Partisipasi ini mandatory, wajib. Mungkin Inpres ini mengingatkan kepada saudara-saudara yang lebih beruntung bahwa Anda punya kewajiban chip in dalam rangka membantu saudara kita lainnya, dengan gotong royong kesehatan rakyat Indonesia ini bisa terjamin," ucap Sofyan A. Djalil.

Pada kesempatan sama, Sofyan meluruskan isu terkait kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan menghambat pelayanan. Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, saat ini BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem untuk cek status kepesertaan dengan cepat.

"NIK (Nomor Induk Kependudukan, red) itu kan sudah terkoneksi, selama ada kartu penduduk, maka orang akan bisa langsung diketahui apakah kartu BPJSnya aktif atau tidak. Dan BPJS Kesehatan menjamin aksesnya itu paling lama lima menit. Jadi tidak menghambat. Bila ada orang BPN tidak memberikan layanan, kami sekadar ingin memastikan bahwa BPJS itu aktif," ungkap Sofyan.

Nah, penjelasan Menteri Agraria juga sekaligus menginformasikan, persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan bukan hanya untuk jual-beli tanah. Faktanya, sejumlah urusan administrasi juga mengenakan syarat serupa. Antara lain pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan ibadah haji, juga berbagai macam pengurusan administrasi di 23 kementerian dan tujuh lembaga negara.

Dalam Inpres 1/2022, Presiden Jokowi memberikan perintah kepada sejumlah menteri untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan optimalisasi program JKN. Instruksi itu kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atas pelaksanaan Inpres, serta melaporkan pelaksanaan Inpres kepada Presiden secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang kini menjadi syarat untuk mengakses sejumlah fasilitas dan layanan publik merupakan upaya pemerintah menjamin kesehatan dan hak hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Moeldoko yang menjadi anggota tim koordinasi Inpres 1/2022 menegaskan pemerintah akan terus melakukan komunikasi publik kepada masyarakat dan memastikan kementerian/lembaga terkait mengintegrasikan sistem pelayanan dengan BPJS Kesehatan.

Syarat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam mengakses pelayanan publik, termasuk proses jual beli tanah, lanjutnya, tidak seharusnya dipandang dalam narasi negatif. Dia justru menilai persyaratan ini sangat logis untuk diterapkan dan tidak menimbulkan permasalahan apa pun. "Secara logika, masyarakat yang bisa membeli tanah adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi yang relatif bagus. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membayar iuran kelas 2 atau kelas 1 BPJS," kata Moeldoko.

Sedangkan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan bisa memastikan mereka tidak akan

luruh masyarakat memikirkan kesehatannya. Alasan Ali, tak ada yang bisa menentukan kapan seseorang akan sakit.

"Kesehatan itu kalau orang bijak mengatakan 'Health is not everything, but without health, everything is nothing'. Itu sekali lagi tiba-tiba orang jatuh sakit tidak tahu. Umumnya orang Indonesia karena ketidaksadaran itu kemudian kesulitan tahunya sudah terlambat," kata Ali.

"Makanya, sekarang Instruksi Presiden itu dengan berbagai kerja sama kementerian dioptimalkan sehingga seluruh orang Indonesia pada tahun 2024 diharapkan sudah menjadi peserta BPJS paling tidak coverage akan tercapai," lanjut Ali.

Hingga 2022, kepesertaan BPJS Kes-



mengalami keterlambatan dalam mendapatkan penanganan kesehatan. Menurut Ali, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui bahwa kepesertaan BPJS adalah wajib, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Namun, diperlukan upaya lebih agar se-

ehatan di Indonesia mencapai 235 juta orang. Ia berharap, jumlah itu menjadi minimal 98 persen pada 2024. Pada akhir 2021, rekrutmen pesertanya mencapai 86 persen atau sekitar 230 juta jiwa.

Jadi, masih ada 14 persen atau sekitar 40 juta jiwa yang belum mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan. Belum lagi peserta yang bayarannya menunggak pastinya. ♦

DARI INPRES KE INPRES

Kebijakan optimalisasi program-program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maupun Jaminan Kesehatan Nasional sama-sama bersandar pada Instruksi Presiden. Dari perkembangan sejauh ini, persoalan muncul di tingkat operasional atau penerapannya di lapangan.

Jadi, sudah jelas sekarang, persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan bukan hanya untuk jual-beli tanah. Faktanya, sejumlah urusan administrasi mengenakan pula syarat serupa. Antara lain pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan ibadah haji dan umrah, juga berbagai macam pengurusan

data antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan peserta program JKN," demikian bunyi dikuturnya. Pertukaran data tersebut dinilai akan efektif meningkatkan kepatuhan peserta program JKN dalam menjalankan kewajibannya.

Inpres juga menginstruksikan Menkeu



administrasi di 23 kementerian dan tujuh lembaga negara sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Inpres 1/2022, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada sejumlah menteri untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan optimalisasi program JKN. Bahkan Inpres itu memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mempertukarkan data pajak dengan peserta JKN dari BPJS Kesehatan.

"(Khusus kepada (Menteri Keuangan untuk melakukan kerja sama pertukaran

menyiapkan regulasi guna mendukung kelancaran pembayaran iuran kepesertaan anggota keluarga yang lain Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) di lingkungan instansi pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan sehingga PPU PN menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk menjaga kesinambungan pendanaan program JKN, serta melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap pemda yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN. Selain itu, terdapat instruksi kepada direksi BPJS Kesehatan





untuk melakukan kerja sama dengan Kemenkeu dalam penagihan piutang iuran peserta program JKN setelah dilakukan upaya penagihan optimal, tetapi belum berhasil.

Sedangkan Instruksi itu kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atas pelaksanaan Inpres, serta melaporkan pelaksanaan Inpres kepada Presiden secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jokowi menginstruksikan untuk melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi peserta aktif dalam program JKN. Serta melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan KUR dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Inpres ini juga memerintahkan menteri dalam negeri untuk memastikan BPJS Kesehatan menjadi syarat bagi permohonan perizinan berusaha serta pelayanan publik. "Menteri Dalam Negeri untuk melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif dalam program JKN," demikian bunyi Inpres itu.

Mendagri juga diperintahkan menyediakan akses data penduduk berbasis nomor induk kependudukan (NIK) untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program JKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jokowi menginstruksikan Mendagri mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara di lingkungan instansi pemerintah daerah harus mendaftarkan anggota keluarganya menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Inpres ini menyebutkan pula Menteri Agama dapat mengambil langkah agar pelaku usaha dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus menjadi peserta aktif. Juga mensyaratkan calon jemaah umrah dan haji sebagai peserta aktif, sekaligus memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan formal dan nonformal di lingkungan Kementerian Agama menjadi peserta aktif JKN.

Instruksi untuk Menteri Hukum dan HAM, agar mengambil langkah agar

pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian adalah peserta aktif BPJS Kesehatan. Sedangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga harus memastikan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan peserta aktif JKN.

Demikian juga dengan Menteri Kesehatan harus memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah menjadi peserta aktif JKN. Sementara Menteri Ketenagakerjaan diinstruksikan memastikan seluruh orang asing yang bekerja paling sedikit enam bulan serta pemohon pengurusan maupun perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan menjadi peserta aktif JKN. Kemudian, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, mendapat instruksi serupa untuk ranah kerjanya masing-masing.

Sebelumnya, pada 2021 lalu, telah terbit Inpres No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang kontekstual dengan keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Permenaker ini akhirnya harus mengalami peninjauan ulang alias revisi.

Persoalan lain dengan Inpres No 2 Tahun 2021, misalnya, belum terintegrasinya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ke BPJamsostek yaitu sesuai amanat SJSN. Soalnya, pengelolaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN masih kelolaan PT Taspen.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, dualisme itu tidak sesuai dengan sembilan prinsip SJSN. "Padahal di UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, diamanatkan pengelolaan JKK dan JKm bagi ASN mengacu pada SJSN. Selain UU ASN, Peraturan Presiden no. 109 tahun 2013 mengamanatkan dengan sangat eksplisit pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ASN diserahkan ke BPJamsostek," ungkapnya.

Alhasil, penerapan optimalisasi jaminan sosial nasional memang akan berhadapan dengan sejumlah kendala di lapangan. Namun, kisahnya akan berlanjut di kesempatan lain. ♦

UKRAINA

GUNAWAN EFFENDI

Dunia sudah mafhum Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Yang menjadi pertanyaan, berapa lama itu akan berakhir dan bagaimana selanjutnya? Untuk Indonesia, yang menduduki posisi Presidensi negara-negara G-20 dan menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan, juga muncul pertanyaan mengenai dampak krisis Rusia-Ukraina itu. Belum lagi dampak ekonomi dan politiknya di dalam negeri.

Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena sudah menjadi asumsi bahwa di era Revolusi Industri 4.0 ini perang tak perlu berlama-lama, menghindari biaya tinggi dan korban nyawa manusia, dengan teknologi maju sehingga dapat menggunakan soft power, kekuatan lunak. Boleh jadi juga software power, kekuatan perangkat lunak, sesuai dengan industri 4.0 yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Namun, apa yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina hingga akhir Februari 2022, belum terlihat pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan terhenti dalam hitungan sepekan. Malah di sana-sini tersimak perlawanan dari Ukraina. Baik dari ungkapan lisan Presiden Ukraina Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy maupun yang terjadi di medan tempur sebagaimana viral di berbagai saluran media massa maupun media sosial.

Itu yang jangka pendek. Yang jangka panjang dan menengah akan lebih rumit lagi. Baik dalam lingkup nasional maupun global.

Dalam lingkup nasional, hubungan Indonesia dan Ukraina lebih menonjol dalam bidang perdagangan. Sepanjang 2020 saja, ada sembilan jenis produk impor asal Ukraina yang nilainya di atas satu juta dolar Amerika Serikat (setara sekitar Rp14 miliar). Data Komisi Perdagangan PBB (UN Comtrade) mengungkapkan, impor terbesar Indonesia dari Ukraina pada 2020 adalah biji-bijian (sereal) dengan nilai 710,42 juta dolar setara dengan sekitar Rp10,18 triliun. --Ukraina adalah negara produsen gandum penting sebagaimana terlihat pada lambang negaranya yang berwarna biru langit dan rona keemasan ladang gandum siap panen.

Nah, jika kecamuk krisis di Ukraina berlama-lama, sangat boleh jadi harga tepung terigu dan produk hilirnya, mulai dari panganan seperti gorengan dan aneka kue, juga mie, akan terpengaruh. Pastinya bukan turun. Sementara Indonesia yang mayoritas warganya muslim ini akan memasuki Ramadan pada April 2022 dan Idul Fitri pada awal Mei tahun ini. Itu dari gandum saja.

Belum lagi impor produk lainnya seperti besi dan baja 214,64 juta dolar; gula dan kembang gula 8,34 juta dolar;

produk penggilingan gandum dan produk hilirnya 6,13 juta dolar; aneka produk mesin 5,05 juta dolar; optik, foto, teknik, peralatan media 2,68 juta dolar; rempah, kopi, teh, mate 2,46 juta dolar; produk susu, telur madu, dan pangan sejenis 2,17 juta dolar; bahkan senjata dan amunisi, suku cadang, dan aksesoris mencapai 1,61 juta dolar.

Tentu bukan Indonesia saja yang terpengaruh oleh krisis Rusia-Ukraina. Ekonom kawakan seperti Nouriel Roubini melihat krisis Rusia Ukraina sebagai eskalasi besar Perang Dingin II, dengan empat kekuatan revisionis – Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara – menantang dominasi global lama Amerika Serikat dan tatanan internasional yang dipimpin Barat yang diciptakannya setelah Perang Dunia II. Dalam konteks itu, kata Roubini, dunia telah memasuki depresi geopolitik yang akan memiliki konsekuensi ekonomi dan keuangan besar-besaran di luar Ukraina.

Menurut dia, risiko utama sekarang adalah bahwa pasar dan analisis politik akan meremehkan implikasi dari pergeseran tatanan geopolitik ini. Menjelang penutupan pasar pada 24 Februari – hari invasi – pasar saham AS telah meningkat dengan harapan bahwa konflik ini akan memperlambat niat Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya menerapkan kebijakan menaikkan suku bunga.

Tetapi perang Ukraina bukan hanya konflik kecil, tidak penting secara ekonomi dan finansial dari jenis yang terlihat di tempat lain dalam beberapa dekade terakhir. Analisis dan investor tidak boleh membuat kesalahan serupa seperti yang mereka lakukan pada malam Perang Dunia I, ketika hampir tidak ada yang melihat konflik global besar akan datang. Krisis kali ini merupakan lompatan kuantum geopolitik. Implikasi dan signifikansi jangka panjangnya hampir tidak dapat dilebih-lebihkan.

Perang di Ukraina akan memicu guncangan kelangkaan pasokan besar-besaran dalam ekonomi global yang masih belum pulih dari Covid-19 maupun peningkatan tekanan inflasi selama setahun. Guncangan ini, kata Roubini, akan mengurangi pertumbuhan dan selanjutnya meningkatkan inflasi pada saat ekspektasi inflasi sudah tidak terkendali.

Para pengambil keputusan politik sudah tentu akan mencoba meredam kejutan kelangkaan pasokan itu. AS akan mencoba mengurangi kenaikan harga bensin dengan memanfaatkan cadangan minyak strategisnya, dan dengan mendorong Arab Saudi untuk menggunakan kapasitas cadangannya untuk meningkatkan produksi. Tetapi langkah-langkah ini hanya akan memiliki efek terbatas, karena kekhawatiran yang meluas akan lonjakan harga lebih lanjut akan mengakibatkan penimbunan pasokan energi global.

Dalam situasi ini, AS akan merasakan tekanan yang lebih besar untuk mencapai modus vivendi (kesepakatan semen-

tara) dengan Iran – sumber minyak potensial lainnya – untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Tetapi Iran secara efektif bersekutu dengan China dan Rusia, dan para pemimpinnya tahu bahwa kesepakatan apa pun yang mereka lakukan hari ini dapat dibatalkan pada 2025 jika Donald Trump atau calon Trump berkuasa di AS. Kesepakatan nuklir baru dengan Iran dengan demikian tidak mungkin.

Lebih buruk lagi, jika tidak ada, Iran akan terus memajukan program nuklirnya, meningkatkan risiko bahwa Israel akan meluncurkan serangan terhadap fasilitasnya. Itu akan memberikan kejutan pasokan negatif ganda ke ekonomi global. Hasilnya adalah bahwa berbagai kendala geopolitik akan sangat membatasi kemampuan Barat untuk melawan guncangan stagflasi yang ditimbulkan oleh perang di Ukraina.

Para pemimpin Barat juga tidak dapat mengandalkan kebijakan fiskal untuk melawan efek penghambatan pertumbuhan dari guncangan Ukraina. Untuk satu hal, AS dan banyak negara maju lainnya kehabisan amunisi fiskal, setelah mengeluarkan semua pemberhentian sebagai tanggapan terhadap

flasi akan menjadi lebih parah, karena efek yang meningkat pada ekspektasi inflasi.

Kebijakan stimulus moneter dan fiskal besar-besaran yang digulirkan pemerintah AS setelah krisis keuangan global 2008 tidak bersifat inflasi karena sumber guncangan tersebut berada di sisi permintaan, didorong oleh credit crunch pada saat inflasi rendah dan di bawah target. Situasi hari ini sama sekali berbeda. Kita menghadapi kejutan pasokan negatif di dunia di mana inflasi sudah meningkat dan jauh di atas target.

Roubini mengingatkan, agak menyesatkan jika berpikir bahwa konflik Rusia-Ukraina hanya akan memiliki dampak ekonomi dan keuangan yang kecil dan sementara. Meskipun Rusia hanya mewakili tiga persen dari ekonomi global (dan Ukraina jauh lebih sedikit), pengalaman negara-negara Arab yang memberlakukan embargo minyak pada 1973, dan revolusi Iran pada 1979, mewakili bagian yang lebih kecil dari PDB global dibandingkan dengan peran Rusia saat ini.

Dampak global perang yang dimulai oleh Presiden Rusia Vladimir Putin akan tercermin melalui harga minyak dan gas alam yang melonjak (karena memang Rusia pemasok gas ke



pandemi Covid-19. Pemerintah telah menimbun defisit yang semakin tidak berkelanjutan, dan pembayaran utang ini akan menjadi jauh lebih mahal di lingkungan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

Lebih penting lagi, stimulus fiskal adalah respons kebijakan yang salah terhadap kejutan pasokan yang stagflasi. Meskipun dapat mengurangi dampak pertumbuhan negatif dari guncangan, hal itu akan menambah tekanan inflasi. Dan jika pembuat kebijakan bergantung pada kebijakan moneter dan fiskal dalam menanggapi guncangan, konsekuensi stag-

Eropa). Tetapi tidak akan berhenti di situ. Dampak lanjutannya akan memberikan pukulan besar bagi optimisme global pada saat pemulihan ekonomi yang masih lemah melawan pandemi sudah memasuki periode ketidakpastian yang lebih dalam dan tekanan inflasi yang meningkat.

Memang Roubini mengakui, dampak tak terduga dari krisis Ukraina – dan depresi geopolitik lebih luas yang menjadi ikutannya – akan bersifat sementara. Tapi seberapa lama? Bahkan di Indonesia sudah ada yang mengaitkan krisis Ukraina sebagai alasan menunda Pemilu 2024. ♦

4 HALAMAN BERKEPANJANGAN

Panjang surat edaran itu empat halaman. Hikmahnya yang akan berkepanjangan.

Ya, Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala memang menunjukkan sesama pemeluk Islam pun dapat memiliki pandangan yang beragam. Keragaman itu hendaknya menjadi pemicu kemajuan.

Pandangan yang beragam tampak dari berbagai tanggapan. Lebih dari itu, masih memerlukan waktu untuk memahami dampak positif maupun negatifnya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang..

Yang jelas, Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, surat edaran itu merupakan

upaya menuju kemajuan. "Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 Februari 2022.

Boleh saja ada yang mempertanyakan, apakah ada hubungan penggunaan pengeras suara dengan ketenteraman, ketertiban dan keharmonisan bangsa ini? Ternyata memang pernah ada. Misalnya, kasus Meiliana, perempuan keturunan Tionghoa di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Agustus 2018 lalu.

Meiliana mengeluhkan suara azan yang dianggapnya bising. Namun, keluhannya berujung dengan pembakaran rumah tinggalnya yang dekat masjid itu oleh warga, berlanjut dengan perusakan vihara, tempat ibadah penganut kong hu cu di Tanjungbalai. Perempuan itu pun akhirnya terjerat pidana penodaan agama dan mendapat vonis pengadilan 18 bulan penjara.

Sedangkan surat edaran tentang pengeras suara di masjid baru terbit setelah empat tahun berlalu sejak kasus Tanjungbalai itu terjadi. Boleh jadi perlu



kajian panjang hingga surat edaran itu akhirnya terbit juga. Beriringan dengan pencanangan 2022 sebagai Tahun Toleransi oleh Menag Yaqut.

Terlepas dari Tahun Toleransi, silakan juga mempertanyakan, apakah “ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat” sedang menurun hingga surat edaran itu terbit? Atau, bukankah penerbitan surat edaran itu justru menurunkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga?

Namun, surat edaran dari Menteri Agama sebagai pejabat eksekutif tentulah merupakan keputusan politik. Maka layak menempatkan surat edaran itu dalam konteks politik.

Nah, sekitar setahun sebelum peristiwa Tanjungbalai itu terjadi, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Universitas Paramadina Jakarta pernah menggelar kajian bagaimana ujaran kebencian dan persekusi agama masih

karena ketersinggungan (indignation atau offence-taking), yang belum terlalu dikenal. George menunjukkan bagaimana dua sisi hate spin ini — hasutan dan keterhasutan — digunakan oleh para “entrepreneur” politik untuk memobilisasi pendukung dan menyerang kelompok sasaran, dengan membandingkan kasus Amerika Serikat, Indonesia, dan India.

Persoalannya, di banyak negara, termasuk Indonesia, hasutan kebencian yang terang-terangan menyerukan kekerasan kerap dibiarkan, tapi orang yang dianggap menghina atau menista makin banyak yang dipidanakan. Sudah menjadi korban sasaran ujaran kebencian, suara mereka dibungkam karena dianggap melukai perasaan kelompok dominan. Karena itu, George menekankan perlunya mencari alternatif lain dalam melawan hate spin. Dia mendorong politisi, masyarakat sipil dan media untuk berperan lebih banyak dengan cara-cara yang lebih kreatif.

belakangan ini seperti meninggalkan residu polusi yang bisa menjadi masalah dalam jangka panjang jika tidak ditangani.

Menurutnya, intoleransi ini bukan sesuatu yang alamiah tapi direkayasa para entrepreneur politik. Di tataran individu, sikap intoleran mungkin sudah seperti naluri. Tapi di tataran kolektif yang lebih luas, ia hampir selalu digerakkan. Proses ini tidak hanya berlangsung satu arah, karena tergerak oleh hasutan kawan (offence-giving), tapi juga bisa sebaliknya, sebagai reaksi terhadap sesuatu yang dianggap sebagai hasutan dari pihak lawan (offence-taking). Gabungan dua strategi inilah yang disebut George sebagai hate spin.

Bagi George, kunci untuk menjaga demokrasi dalam konteks ini adalah mengupayakan kesetaraan (di samping kebebasan dan persaudaraan). Karena itu, dia lebih mendorong aturan anti-diskriminasi. Jangan terlalu mengurus kata-kata, cukup jamin saja hak warga untuk beragama. Dia juga menekankan



merupakan persoalan pelik di banyak negara demokrasi. Orang bisa tergerak melakukan kekerasan karena terhasut ujaran kebencian tapi juga sebaliknya, karena tersinggung oleh suatu ujaran.

Untuk menjelaskan dan mengurai persoalan tersebut, Cherian George, pengajar di Hong Kong Baptist University, mengajukan konsep baru yang dia sebut hate spin, dalam bukunya Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy (2016).

Hate spin menggabungkan konsep hate speech atau hasutan kebencian (vilification atau offence-giving), yang sudah lebih dikenal, dengan kemarahan

Cherian George menyampaikan bahwa studinya mengamati bagaimana kebencian dan kewaswasan digunakan sebagai senjata politik. Perhatian utamanya adalah kebebasan berekspresi yang menurutnya kini tidak hanya mendapat ancaman dari negara, tapi juga dari masyarakat. Dia melihat bahwa saat ini ancaman tersebut tidak akan sampai meruntuhkan demokrasi di Indonesia. Meski begitu, dia menekankan agar kita tetap waspada.

Secara khusus, dia menyoroti naiknya intoleransi agama yang kian mengancam kelompok rentan. Intoleransi yang dimanfaatkan dalam sejumlah pemilu

perlunya menumbuhkan nasionalisme kewargaan untuk menandingi nasionalisme keagamaan. Inilah yang harus diperjuangkan dengan gigih oleh para pegiat demokrasi.

Jadi, kembali ke Surat Edaran Menteri Agama, silakan tanggap tanpa melibatkan pikiran kebencian, apalagi ujarannya. Suratnya berlatar pemikiran, tanggap pula dengan gagasan.

Toh surat edaran itu tak membatasi ibadah. Juga terbuka untuk beragam tanggapan. Di situlah hikmah keragaman di internal umat Islam dan dalam konteks keindonesiaan menjadi bekal untuk kemajuan. ♦





BACA DULU, TANGGAPI KEMUDIAN

Entah berapa banyak tanggapan terhadap Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Pengeras suara di Masjid dan Musala. Namun, belum tentu yang menanggapi itu sudah mendalami isinya.

Mungkin masih banyak lagi yang belum membaca surat edaran itu secara lengkap. Berikut ini salinan isi lengkap surat edaran itu.

SURAT EDARAN

NOMOR SE. 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras SUARA DI MASJID DAN MUSALA

A. Pendahuluan

Penggunaan pengeras suara di mas-

jid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan

potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir) masjid dan musala.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.



B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.

C. Ketentuan

1. Umum

a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.

b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:

1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian AlQur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;

2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada

makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan

3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara

a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;

b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;

c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan

d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Su-

ara

a. Waktu Salat:

1) Subuh:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan

b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.

2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan

b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.

3) Jum'at:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim da-

pat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan

b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum'at, Salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.

b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar.

c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam:

1) penggunaan pengeras suara di bu-

Pengeras Suara Dalam.

3) pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;

4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan

5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila pengujung tablig melimpah ke luar arena masjid/

5. Pembinaan dan Pengawasan

a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang.

b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan.

D. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksana-



lan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam;

2) takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan

musala dapat menggunakan Pengeras Suara Luar.

4. Suara yang dipancarkan melalui Pengeras Suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan:

- a. bagus atau tidak sumbang; dan
- b. pelafazan secara baik dan benar.

kan dengan baik.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Para Gubernur
2. Para Wali Kota/Bupati ♦

BUKAN SESUATU YANG BARU

Penggunaan pengeras suara untuk masjid, langgar, dan musala sesungguhnya telah diatur oleh Kementerian Agama sejak Masa Orde Baru yang diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla.

Jadi, Surat Edaran terbit pada 18 Februari 2022 yang merupakan pembahasan dari aturan Tahun 1978 itu, ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Memang, terdapat beberapa perbedaan antara Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala dengan aturan se-

belumnya dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978.

Beberapa poin antaranya, dalam SE terbaru, volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 desibel. Kemudian sebelum waktu salat subuh dan jumat, pengeras suara luar digunakan paling lama 10 menit untuk pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim, dan paling lama lima menit sebelum salat zuhur, asar, magrib dan isya. Selanjutnya suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu bagus atau tidak sumbang; dan pelafazan secara baik serta benar.

Sedangkan dalam aturan yang terbit pada 1978, untuk salat subuh, pengeras suara luar digunakan paling lama 15 menit untuk pembacaan Al-Qur'an. Lalu lima menit menjelang zuhur dan 15 menit menjelang waktu zuhur di hari Jumat. Selanjutnya, untuk Asar, Maghrib dan Isya digunakan lima menit sebelum adzan.

Namun, baik aturan 1978 maupun Surat Edaran 2022 ini tak memuat sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tentang pengeras suara ini. Direktur Uru-

san Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag RI, Adib mengkonfirmasi soal ini.

"Sifatnya imbauan. Agar secara terus menerus ikuti edaran itu," kata Adib dalam konferensi pers di kanal YouTube Bimas Islam, Selasa, 22 Februari 2022.

Adib mengatakan aturan baru ini hanya menjadi pedoman penggunaan pengeras suara di masjid. Harapannya, pedoman diikuti oleh semua pihak. Khususnya pengurus masjid dan musala yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia pun berharap edaran ini bisa memberikan maslahat dan dampak yang baik bagi kerekatan masyarakat. "Di satu sisi syiar dan di sisi lain terjaga kohesivitas. Dengan pedoman ini semua tak saling menyalahkan. Kalau saya harapkan, kawan-kawan di tingkat masjid jami atau masjid agung jadi contohlah. Seperti takmir ikuti pedoman kita dengan baik. Sehingga bisa jadi contoh bagi masjid atau musala lain untuk ikuti," kata Adib.

Jadi, ketentuan mengenai pengeras suara itu bukan hal baru sebenarnya. Juga bukan perubahan yang luar biasa dari ketentuan lama. ♦

LAMPIRAN INSTRUKSI
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : KEP/D/101/1978
TANGGAL: 17 JULI 1978
TENTANG
TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID,
LANGGAR DAN MUSHALLA

Pengertian.

1. Pengertian Pengeras Suara di sini adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikropon, amplifier, loud speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.
2. Pengeras Suara di masjid, langgar atau mushalla, yaitu pengeras suara yang tersebut di atas yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, iqomah, do'a, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat Al-Qur'an, pengajian dan lain-lain.

ANJING MENGGONGGONG, AZAN MALAH BERLALU

Persoalan surat edaran mengenai penggunaan pengeras suara melebar hingga ke pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang gonggongan anjing. Latihan menghindari ujaran kebencian dan jerat permainan yang disebut hate spin.

Bermula dari jawaban Menteri Agama yang kerap disapa Gus Yaqut terhadap pertanyaan wartawan di sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau, pada Rabu, 23 Februari 2022. Pertanyaannya ya mengenai surat edaran tentang ketentuan pengeras suara di masjid dan musala. Pernyataan lengkapnya begini:

"Iya itu kemarin kita terbitkan edaran pengaturan. Kita tak melarang masjid musala gunakan toa, tidak. Karena itu bagian syiar Agama Islam. Tapi ini harus diatur bagaimana volume speakernya. Toa-nya enggak boleh kencangkencang, 100 db. Diatur bagaimana, kapan, mereka gunakan speaker itu

sebelum azan, setelah azan. Ini tak ada pelarangan.

Aturan ini dibuat semata-mata agar masyarakat kita makin harmonis. Menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Kita tahu di wilayah mayoritas muslim, hampir tiap 100-200

meter ada musala dan masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka nyalakan toanya di atas kaya apa?

Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya.

Kita bayangkan lagi, kita

muslim, lalu hidup di lingkungan non-muslim, lalu rumah ibadah saudara kita nonmuslim bunyikan toa sehari lima kali dengan kencangkencang secara bersamaan itu rasanya bagaimana. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini dalam satu kompleks, misalnya, kanan kiri depan belakang pelihara anjing semuanya, misalnya, menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu enggak?

Apapun suara itu kita atur agar tak jadi gangguan. Speaker di musala masjid monggo silakan dipakai, tapi diatur agar tak ada merasa terganggu. Agar niat penggunaan toa dan speaker sebagai sarana dan wasilah lakukan syiar bisa dilaksanakan tanpa mengganggu mereka yang tak sama dengan keyakinan kita.

Saya kira dukungan juga banyak atas hal ini. Karena alam bawah sadar kita enggak pasti merasakan bagaimana suara bila tak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian ada truk kiri kanan belakang kita, mereka menyalakan mesin bersama-sama kita pasti mengganggu. Suara-suara yang tak diatur itu pasti jadi gangguan buat kita. Gitu ya."

Nah, sejumlah media lantas membuat judul berita yang memancing simpulan bahwa Gus Yaqut membandingkan azan dengan gonggongan anjing.

Tambahan pula keriuhan di media sosial hingga niat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo melaporkan Gus Menag ke polisi meski pihak Kementerian Agama sudah melakukan klarifikasi ihwal pernyataan Yaqut soal suara azan dan gonggongan anjing.

Bersama Kongres Pemuda Indonesia akan melaporkan Menteri Agama





atau Menag Yaqut Cholil Qoumas atas tuduhan penistaan agama, Roy Suryo menyoal ucapan Yaqut yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. "Untuk itu kami (Roy Suryo dan Kongres Pemuda Indonesia) akan membuat laporan polisi hari ini di Polda Metro Jaya dalam dugaan melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat 2 UU ITE atau Pasal 156a KUHP Tentang Penistaan Agama," kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni, lewat pesan singkat, Kamis, 24 Februari 2022.

Sedangkan Roy mempersilakan bila pihak Kemenag melakukan klarifikasi atas pernyataan Yaqut tersebut. Namun, ia menilai pihaknya tak salah persepsi dan Yaqut tetap salah telah melontarkan pernyataannya tersebut. "Jadi saya hormati klarifikasi tapi biar masyarakat yang nilai klarifikasi dan kami tidak berhenti di sini kami kawal kasus ini agar seseorang enggak mudah sampaikan statement tidak pada tempatnya," tutur Roy.

Alhasil, Roy mengemukakan bahwa

polisi menyatakan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan azan dan gonggongan an-

Aturan ini dibuat semata-mata agar masyarakat kita makin harmonis. Menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Kita tahu di wilayah mayoritas muslim, hampir tiap 100-200 meter ada musala dan masjid.

jing tidak tergolong dalam tindak pidana penistaan agama. "Jadi pendapat kami sama dengan pendapat masyarakat, jadi ada satu hal enggak pantas dilakukan, hanya sayangnya di Pasal 156a KUHP hal enggak pantas itu menurut konsultasi pihak kepolisian belum bisa masuk dalam unsur pidana di Pasal 156a KUHP," kata Roy.

Bunyi Pasal 156a KUHP, "dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

Jadi, Polda Metro menolak laporan Roy. "Setelah konsultasi cukup panjang tidak seperti biasanya saya keluar membawa surat tanda laporan, saya hari ini tidak berhasil membawa surat tanda laporan," kata mantan Menpora itu.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,

menegaskan bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ia menegaskan kabar Yaqut membandingkan dua yang berbeda tersebut sangat tidak tepat.

"Menag sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara Anjing, tapi Menag sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara," kata Thobib dalam keterangannya resminya, Kamis, 24 Februari 2022.

Gus Yaqut saat ditanya wartawan tentang surat edaran itu, kata Tho-

toleransi dari tetangga yang memelihara," kata dia.

Thobib menilai Yaqut saat itu hanya sekadar mencontohkan bahwa suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan di masjid/musala, bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Jadi, sambungnya, perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara agar toleransi dan keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga.

"Dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim

memang menjabat Ketua Umum GP An-sor di samping duduk sebagai anggota parlemen. Sedangkan Dendy menjelaskan, LBH Ansor, sedang mengumpulkan bukti-bukti pemotongan video yang diduga ditujukan untuk upaya framing sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain."Bukti itu akan kami tindaklanjuti dengan laporan polisi berdasarkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE," ujar Dendy.

Menurut Dendy, laporan Roy Suryo lemah karena hanya berbasis video yang sudah dipotong-potong sehingga tidak



bib, hanya menjelaskan bahwa hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Sehingga perlu pedoman kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara yang bisa membuat tidak nyaman.

"Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya, makanya beliau menyebut kata 'misal'. Yang dimaksud Gus Yaqut adalah misalkan umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada

yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain. Sehingga, keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga," tandas Thobib.

Persoalan berlanjut dengan niat Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor akan melaporkan balik Roy Suryo ke polisi. "Hati-hati, kita juga bisa melaporkan dia terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah," kata Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa dalam keterangannya tertulis, Kamis, 24 Februari 2022.

Gus Yaqut sebelum menjadi Menag

utuh. "Roy Suryo bukan ahli bahasa, bukan ahli hukum, bukan pemuka agama Islam, dia juga tidak tabayyun dulu ke Menteri Agama, tahu-tahu membuat laporan polisi setelah lihat video," kata dia.

Menurut Dendy sikap Roy Suryo melayangkan masalah ini ke jalur hukum berpotensi semakin memperkeruh suasana, sebab faktanya Menag Yaqut sama sekali tak pernah membandingkan antara azan atau pengeras suara dengan gonggongan anjing.

Menag dalam konteks tersebut, menurut dia, hanya mencontohkan di antara bentuk kebisingan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat.

Kemudian, lanjut Dendy, media massa yang melakukan kesalahan penulisan juga sudah menyampaikan klarifikasinya.

Pelaporan ke polisi, kata dia, adalah hak setiap warga negara dan dilindungi undang-undang, namun materi laporan tidak boleh serampangan. "Pelaporan polisi tidak boleh didasari itikad buruk dan motif jahat yang bertujuan semata-mata untuk merusak nama baik terlapor," kata dia.

Tak urung, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat telanjur mengharamkan Gus Yaquut datang ke Ranah Minang. Pernyataan

terlalu sekali apa yang diucapkannya, kita akan perjuangan ini bersama-sama ya, haram baginya menginjakkan kaki ke tanah Minangkabau," tegas Fauzi yang pernah menjabat Wali Kota Padang dua periode itu.

Ia menjelaskan, tak ada masalah jika Menag membuat aturan, karena itu juga tugasnya sebagai lembaga negara. Namun, Fauzi menyayangkan sikap Menag yang sembarang ucap tentang azan.

"Kalau Menag membuat aturan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ya silakan saja, tidak ada

saling mengganggu di antara manusia itu tidak tersampaikan dengan baik. "Tidak ada kata membandingkan atau memper-samakan antara azan atau suara yang keluar dari masjid dengan gonggongan anjing," tandasnya.

Soal substansi surat edaran itu, Gus Menag mengemukakan selama ini ia mendapatkan masukan bahwa masyarakat bisa menolerir adanya suara azan, padahal sebenarnya juga banyak diprotes masyarakat di luar umat Islam.

Jadi, sambungnya, pesan ucapannya itu adalah bagaimana suara azan yang di-



LKAAM ini menyikapi terkait pemberitaan gonggongan anjing dan azan itu

"Di Minangkabau sejatinya Islam. Kita memakai adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Apa yang disampaikan Menteri Agama yang menyamakan azan dengan suara lolongan anjing itu, sungguh melukai hati masyarakat Minangkabau khususnya," kata Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar seperti dikutip Langkan, Kamis, 24 Februari 2022.

Selain melukai hati masyarakat Minangkabau, Fauzi menyatakan pernyataan Menag itu juga sudah keterlaluan, dan tidak menunjukkan seorang yang memimpin sebuah Kementerian Agama. "Ke-

yang melarang kok. Asalkan untuk kebaikan. Tapi kan ya jangan juga disamakan suara azan dengan suara hewan, kan melukai hati masyarakat muslim juga," jelasnya.

Belakangan Gus Yaquut menegaskan, kegaduhan terkait pernyataannya itu terjadi karena misleading (sesat) dalam memaknai ucapannya di pemberitaan media massa. "Judul itu misleading dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," ungkapnya dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam, 24 Februari 2022.

Menurut dia, judul pemberitaan gagal memaknai pesan kerukunan agar tidak

kumandangkan melalui toa atau pengeras suara, tidak mengganggu masyarakat yang bukan beragama Islam. "Saya hanya berusaha sekuat saya, menahan agar agama tidak menjadikan manusia sewenang-wenang terhadap manusia lain, mentang-mentang besar, banyak, kuat," kata Gus Yaquut.

Tampak bukan lagi substansi surat edaran itu yang menjadi persoalan, melainkan lebih ke ucapan personal Gus Yaquut. Seperti menyoal gonggongan anjing, sementara soal volume suara azan akan berlalu begitu saja. Relevan pula dengan peringatan terhadap jerat hate spin dalam demokrasi kita ♦



PERCEPATAN BSI JADI BUMN UNTUK KEMASLAHATAN

Bank Syariah Indonesia akan menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status persero. Melalui penyertaan modal negara tentunya.

Coba saja perhatikan, belum ada tambahan persero dalam nama resmi Bank Syariah Indonesia Tbk. Status persero adalah tanda bahwa sebuah perusahaan berada dalam kendali penuh negara.

Nah, untuk BSI, pemerintah berencana melakukan penyertaan modal negara melalui saham Seri A Dwiwarna pada emiten bank syariah BUMN, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Langkah ini merupakan upaya pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

Terkait hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna tersebut

dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP," ungkap Wapres saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro Nomor 2 Jakarta Pusat, Kamis, 24 Februari 2022.

Lebih lanjut, Wapres juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan

dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI, mengingat 3 (tiga) bank PSP ini merupakan perusahaan publik. "Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat," ungkapnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung. "Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan Dewan Pengurus (Direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan pe-



nyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini. "Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini," ungkapnya.

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya. "Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan," kata dia.

Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas Industri Halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia. "Kalau kita lihat, kita merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi tingkat produktivitasnya belum masuk lima besar Industri Halal dunia. Karena itu kita dorong BSI ke sana," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa sebagai lembaga pengawasan, BPKP siap membantu mengawasi proses penyertaan saham Dwiwarna di BSI hing-

ga tingkat resiko dan compliance-nya. "Kami siap mengawal proses ini supaya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," tegasnya.

Kalau kita lihat, kita merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi tingkat produktivitasnya belum masuk lima besar Industri Halal dunia. Karena itu kita dorong BSI ke sana.

Turut hadir pada rapat ini, Direktur Utama Bank BRI Sunarso, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Sedangkan Kiai Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha Ahmad Lutfie.

Gagasan agar BSI menjadi bank BUMN dengan diberi label 'persero' melalui keikutsertaan saham merah-putih sudah mengemuka pada akhir 2021 lalu. tahun depan. Sekjen Masyarakat Ekonomi Indonesia (MES) Iggi Haruman Achsien mengemukakan, dengan status BUMN, BSI dapat menjadi wajah pemerintah dalam industri keuangan syariah dunia.

Menurut Iggi, BSI sudah membawa nama Indonesia di mata dunia sehingga layak nantinya disematkan menjadi bank BUMN, bukan lagi anak usaha BUMN. Dia berharap hal tersebut dapat diimplementasi secepatnya.

Status BUMN persero untuk BSI, kata dia, sekaligus mencerminkan komitmen lebih lanjut dari pemerintah bagi BSI maupun bagi pertumbuhan industri keuangan syariah. "Kalau BSI masuk menjadi BUMN maka akan menjadi Himbara kelima, paling tidak ada kepemilikan pemerintah RI

secara langsung, misal ada saham dwi-warna merah-putih walaupun hanya selembar,” ungkapnya Oktober 2021 lalu.

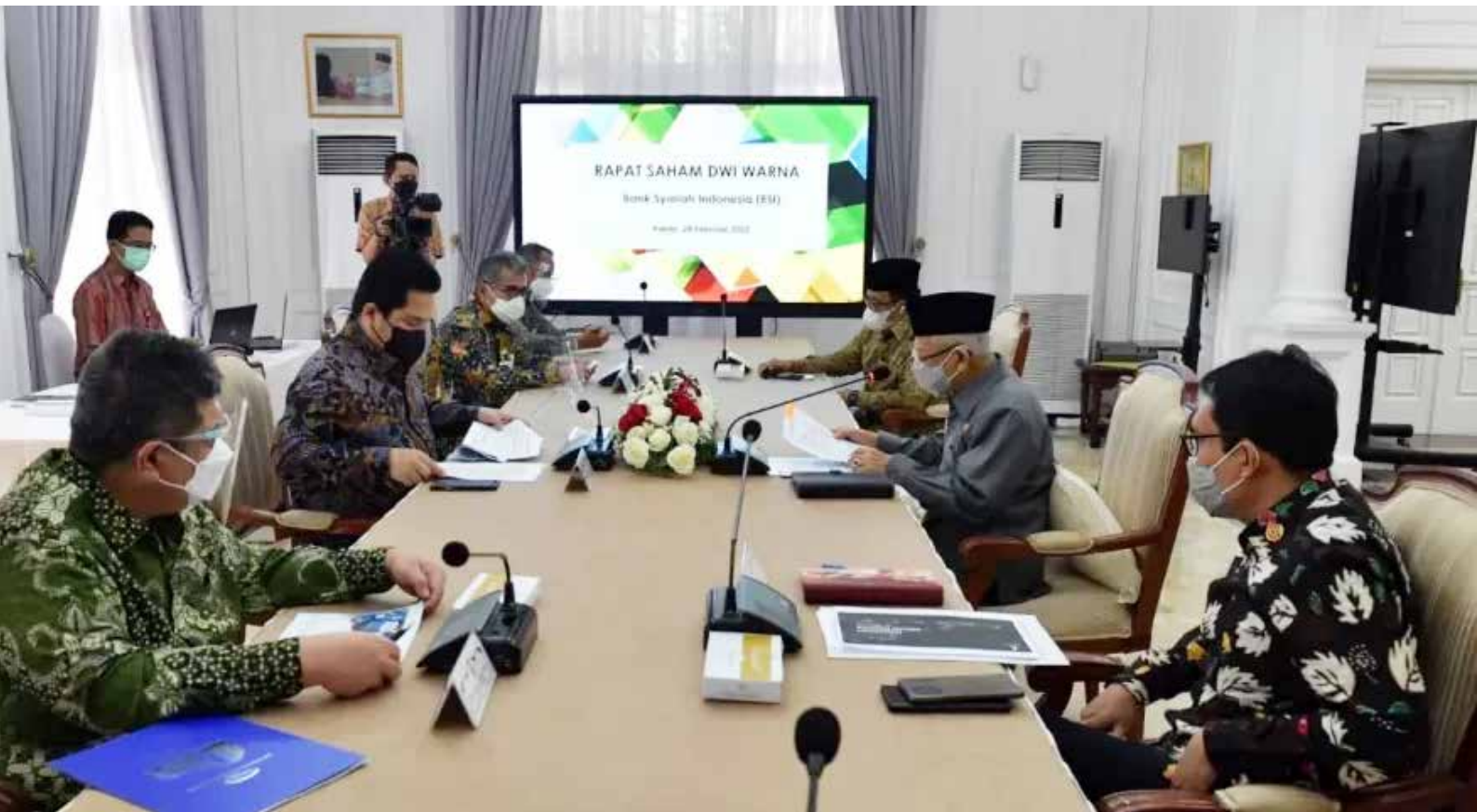
Menurut Iggi, saat ini total aset keuangan syariah Indonesia masih di peringkat tujuh global, meski seluruh industri keuangan syariah tetap tumbuh saat pandemi. Pencapaian itu pun diharapkan terus berlanjut dan bisa dilakukan lebih masif se-

dana syariah dan penerbitan sukuk yang tentu akan terus bergulir.

Lebih lanjut, dia menuturkan, BSI dan sejumlah industri jasa keuangan lain, serta setiap pelaku dari ekosistem ekonomi syariah menjadi ujung tombak menjadi pusat halal supply chain di dunia. Mengutip Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Iggi menerangkan, ekspor makanan

dunia, Ranking Global Islamic Economic Indicator menyematkan Indonesia di peringkat empat, di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan UEA.

“Ini menjadi ironi karena potensi Malaysia sebenarnya tidak terlalu besar, sedangkan Arab Saudi ada Ka’bah disana, sementara Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar. Indonesia juga menempati per-



hingga peringkat sektor keuangan syariah Indonesia bisa meningkat.

“Mudah-mudahan estimasi kami dalam tiga tahun ke depan bisa meningkat lebih kuat melihat adanya terobosan-terobosan oleh pemerintah melalui KNEKS serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Di sektor keuangan sendiri, salah satu terobosannya adalah merger BSI. Merger ini harus diapresiasi dan menjadi terobosan, dampaknya secara nasional dan internasional mulai akan terasa pada tahun-tahun mendatang,” beber dia.

Iggi menilai, pertumbuhan anorganik BSI akan lebih cepat lagi, seiring aksi korporasi juga akan lebih banyak di tahun mendatang. Pada saat yang sama, hal itu turut mendorong pertumbuhan aset pada industri keuangan syariah lainnya. Dengan agresivitas BSI di tahun mendatang, asuransi syariah yang menjadi bisnis turunan bank syariah akan terus tumbuh. Begitu juga pasar modal syariah melalui rekasa

halal terbesar untuk daging unggas dikontribusikan oleh Brazil dan diserap aktif oleh Arab Saudi. Suatu catatan negatif bagi Indonesia yang seharusnya bisa memanfaatkan potensi tersebut. Hal sama terjadi pada ekspor daging sapi terbesar masih dikuasai Australia dan Selandia Baru.

“Ini menjadi catatan agar Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Maka ekosistem halal value chain harus bisa dibantu. Secara sederhana misalnya sertifikasi halal untuk perusahaan atau UMKM. Saat ini yang beredar di masyarakat adalah sertifikasi itu dianggap lama dan mahal. KNEKS berupaya hal itu bisa dilakukan cepat dan murah. Realisasinya dilakukan bersama MES untuk turut adanya pendampingan UMKM untuk bisa cepat dan murah,” jelas dia.

Sementara itu, Iggi menerangkan, ekonomi syariah tentu tidak melulu bicara keuangan syariah, melainkan harus melihat ekosistem secara keseluruhan. Dengan potensi penduduk muslim terbesar di

ingkat ketiga terkait fesyen muslim, nomor empat di halal, posisi lima di media dan rekreasi, keuangan syariah menempati peringkat enam, dan industri obat-obatan dan kosmetik di posisi tujuh, dan muslim travel di peringkat delapan,” kata dia.

Iggi kembali mengingatkan bahwa berbagai peluang harus bisa dimanfaatkan pelaku ekonomi syariah dan industri keuangan syariah, baik di perbankan syariah, IKNB syariah, maupun pasar modal syariah. Selain menyoal peringkat di atas, ekspor fesyen muslim dan kosmetik yang tercatat terus meningkat di masa pandemi masih kalah besar dibandingkan realisasi impor, sehingga tentu neraca perdagangan Indonesia pada sektor tersebut tercatat defisit. “Hal itu yang harus dibalik dalam jangka waktu dekat. Harapannya MES dapat memberi kontribusi untuk membantu mengakhiri ironi itu,” ujarnya.

Selain menjadi BUMN dan Himbara kelima, Iggi mengingatkan pentingnya

segenap ikhtiar mulai dari sekarang dan berkelanjutan berikut sinergi dari semua pihak. “Insya Allah dengan ikhtiar tersebut akan mengakhiri ironi Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar tapi kontribusi ke ekonomi nasional dan global masih belum seberapa. Di tahun-tahun mendatang, diharapkan tidak lagi disebut tidak seberapa, tapi sudah signifikan dan makin

maupun fintech yang memiliki bisnis baik. Tentu berbagai potensi pengembangan bisnis BSI sangat memungkinkan terjadi di berbagai aspek guna mendukung ekonomi syariah di Indonesia. “Saya rasa itu possible, beberapa bank dan BUMN lain polanya juga seperti itu dan ternyata sukses.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di tahun pertama sejak merger pada Febru-

Kini, langkah BSI akan berlanjut dengan status BUMN persero dan Himbara. Toh, Wapres Kiai Ma’ruf sudah mengingatkan agar prosesnya benar-benar mengikuti ketentuan. Saham merah putih ini bisa berbeda-beda kondisinya dalam setiap entitas perusahaan.

Apapun, bismillah terucap sudah. Semoga mendapat ridho Allah. ♦



signifikan,” tandas dia.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan, di Indonesia atau negara lain, bank memang menjadi anchor karena memiliki basis nasabah yang besar. Misalnya sekarang BSI sudah memiliki nasabah sebanyak 15-16 juta yang dapat menjadi modal dasar untuk melakukan bisnis cross selling. Artinya, sangat memungkinkan bagi BSI untuk menjadi konglomerat keuangan syariah.

“Di suatu hari nanti mimpinya mungkin dia (BSI) akan memiliki insurance, baik life maupun general. Kemudian asset management, fintech untuk wakaf, serta perusahaan yang masuk pada ekosistem lainnya. Istilahnya orang tuanya (BSI) itu sudah kaya duluan, sehingga anak-anaknya bisa cepat kaya dan tumbuh juga,” ujar Hery.

Dengan demikian, sambung dia, perlu ketahanan modal yang memadai untuk BSI setidaknya bisa menghadirkan anak perusahaan asuransi, asset management,

ari 2021 menorehkan kinerja positif. Hal itu terlihat dengan perolehan laba bersih mencapai Rp 3,03 triliun atau naik 38,42 persen secara year on year (YoY).

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi menyebut raihannya sejalan dengan konsistensi BSI dalam membangun pondasi, transformasi digital dan pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Pihaknya akan menjaga kinerja perseroan agar berkembang secara berkelanjutan.

“Kami akan terus fokus menumbuhkan bisnis syariah yang berkelanjutan dan sehat, mengedepankan fee based dan akselerasi digital, serta membangun pondasi yang kokoh untuk pengembangan ekosistem halal di Indonesia dan kancah global. Pembukaan kantor representatif BSI Di Dubai di awal tahun ini akan menjadi kado istimewa dan hub bagi perbankan syariah nasional,” kata Hery awal Februari 2022 lalu.

• •

Di suatu hari nanti mimpinya mungkin dia (BSI) akan memiliki insurance, baik life maupun general. Kemudian asset management, fintech untuk wakaf, serta perusahaan yang masuk pada ekosistem lainnya.

Volkswagen T-Cross SUV KOMPAK PREMIUM BERTEKNOLOGI JERMAN



PT Garuda Mataram Motor resmi memperkenalkan Volkswagen (VW) T-Cross. Mobil ini menjadi satu-satunya SUV kompak premium berteknologi Jerman yang hadir bagi konsumen otomotif di Tanah Air. Selain itu, kendaraan ini merupakan model SUV kedua yang ditawarkan Volkswagen yang sebelumnya telah meluncurkan Tiguan.

VW T-Cross hadir dengan berbagai fitur keselamatan terdepan, termasuk 6 airbag, ESC, tiga sandaran kepala lengkap di baris belakang, sabuk pengaman 3 titik untuk kelima penumpang (semua mendapatkan tingkat keamanan yang sama), ISOFIX, dan sandaran kepala yang dapat disesuaikan untuk semua kursi.

"T-Cross menawarkan sistem perlindungan pengemudi dan penumpang terbaik, termasuk sensor jarak parkir belakang, hill-hold control dan sistem peringatan tekanan ban," kata Ahmad Badawi, Head of Sales, PT Garuda Mataram Motor dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi.

Resmi diluncurkan pada 23 Februari 2022, T-Cross dibangun di atas platform MQB (modular transverse matrix) Volkswagen yang sudah terbukti secara global. T-Cross menawarkan bahasa desain yang karismatik, dengan eksterior yang

menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri, serta interior yang menawarkan keleluasaan.

"VW T-Cross adalah kombinasi sempurna antara kedinamisan, kekuatan, dan keleluasaan ruang yang mengombinasikan DNA inti Volkswagen, yaitu disain yang dinamis, keselamatan, dan kesenangan berkendara," tambah Ahmad Badawi.

Bagian depan VW T-Cross tampil tegas dan berotot yang menonjolkan garis desain keluarga Volkswagen. Penggunaan sentuhan chrome yang melimpah pada bagian grille 3D depan, menjadi salah satu ciri khas terbaru Volkswagen.

Lampu berteknologi LED dengan Daytime Running Lights (DRL) langsung menyambut sang pemilik bahkan sebelum perjalanan dimulai. Lampunya dapat dimatikan dan diredupkan melalui pengendalian yang cerdas. Teknologi lampu yang digunakan dapat menerangi jalan di depannya seterang mungkin, tanpa menyilaukan pengguna jalan lainnya.

"Tak hanya itu penggunaan velg dua-warna berukuran 17 inci dengan desain yang kokoh turut mempertegas kehadirannya di jalan," ujar Ahmad Badawi.

VW T-Cross juga memiliki tampilan bagian belakang yang khas di segmennya. Lampu belakang LED berbentuk huruf C tampil memanjang untuk mempertegas desain bagian belakang yang kuat. Karakter sporty dan superior menambah estetika keseluruhan tampilan T-Cross.

Sedangkan di balik kemudi Volkswagen T-Cross, pengemudi bisa mendapatkan visibilitas superior karena posisi duduk yang lebih tinggi, sebagaimana seharusnya sebuah SUV. Visibilitas ke seluruh arah yang baik juga dapat menimbulkan rasa amandan percaya diri bagi para penumpang T-Cross.

"Jarak sumbu roda yang mencapai 2.651 mm turut berkontribusi menjadikan interiornya terasa lapang dan luasa. Duduk di bangku baris kedua dengan lantai yang rata menyuguhkan posisi duduk nyaman dan lapang bagi penumpang di tengah," terang Ahmad Badawi.

T-Cross memiliki tata letak dashboard modern dengan beberapa aksesoris menarik, ruang penyimpanan yang cerdas, lampu ambient serta jok kulit berventilasi di bagian depan, membuat pengemudi dan penumpang merasa semakin nyaman. Beberapa sentuhan modern pada interior T-Cross disuguhkan oleh panel instrumen digital berlayar 8 inci serta AC otomatis dengan tombol kontrol sentuh.

Selain itu, fitur infotainment dengan layar sentuh 10 inci sudah dilengkapi dengan Apple Carplay dan Android Auto. Juga tersedia akses pengisian daya nirkabel serta 4 (empat) port pengisian USB Type C untuk memastikan tak akan pernah kehilangan daya untuk ponsel cerdas Anda. Setir sport multi-fungsi berlapis kulit serta sunroof elektrik semakin mempertegas nilai premium pada kabin T-Cross.

Di balik kap mesinnya, VW T-Cross ditenagai oleh mesin berteknologi TSI yang telah diakui secara global soal kekuatan dan efisiensinya. Di Indonesia VW T-Cross mengusung mesin kecil 1.0L TSI dengan opsi transmisi otomatis 6-speed generasi terbaru yang membuat perpindahan gigi lebih halus dan responsif.

Mesin kecil tersebut dapat dengan mudah menghasilkan tenaga maksimal hingga 115 PS pada 5.000 hingga 5.500 rpm, serta torsi puncak yang mencapai 178 Nm pada putaran mesin 1.750-4.500 rpm. Hasil pengujian VW, mobil ini diklaim mampu mencapai konsumsi bahan bakar hingga 16,44 km/liter. ♦



Muslim LifeFair

25 - 27 Maret 2022

Istora GBK - Jakarta



**Kajian
Asatidzah**



**Herbal
Thibbun Nabawi**



**Kuliner
KHAS**



**Bazaar
Produk Muslim**



**Sekolah
Sunnah**



**Acara
Komunitas**



Kajian Asatidzah

- UST. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc., MA
- UST. Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
- UST. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc., MA
- UST. Dr. Khalid Basalamah, Lc., MA*
- UST. Muhammad Nuzul Dzikri, Lc.*
- UST. Subhan Bawazier
- UST. Zainal Abidin, Lc., MM.
- UST. Ammi Nur Baits
- UST. Ali Saman Hasan, Lc., MA.

*To Be Confirmed

Organized by:

Hosted by:



Main Sponsor:



Contact Us: • Adam: 0856 9289 0495 • Wini: 0877 3057 5904

• www.muslimlifefair.com @ muslimlifefair

#KITABERSAMA

Supported by:

Media Partner:





H JOHARI ZEIN

PENGUSAHA YANG CINTA MASJID DAN GEMAR SEDEKAH

Haji Johari Zein adalah pendiri sekaligus pemilik perusahaan kurir raksasa di Indonesia, PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Ia dikenal sebagai sosok Muslim yang taat, murah hati atau dermawan, cinta anak yatim, dan cinta masjid.

Johari Zein, yang kini menjabat Komisaris PT JNE, tidak terlahir di keluarga Muslim. Ia mualaf. Pria kelahiran Kota Medan, Sumatera Utara, tahun 1954 ini, merupakan etnis Tionghoa. Ayah dan bundanya menganut Agama Budha.

Sebagai pengusaha sukses, kedua orangtuanya menyekolahkan Johari kecil di sekolah Katolik di Kota Medan. Namun pada 1982, Johari memutuskan memeluk Agama Islam. Awalnya dia pindah agama karena akan menikahi istrinya yang beragama Islam. Namun begitu menjadi mualaf, dia langsung jatuh cinta pada Kitab Suci Al Quran. Sejak itu pula ia menjadikan Al Quran petunjuk hidupnya.

Johari yang karim disapa Pak Jo ini

mengisahkan perjalanan hidupnya dalam video yang diunggah di YouTube dengan judul "Kisah Nyata Bisnis Mualaf | Berkah Akibat Sedekah | Johari Zein JNE".

Sebagai seorang Muslim, kata Pak Jo, sang istri memberikan andil besar dalam kesuksesannya. Istrinya sangat mendukung Pak Jo dan sekaligus menjadi 'teman bicara yang menyenangkan'. Dukungan penuh istrinya itulah yang membuat Pak Jo bisa fokus dalam bekerja. Ia lebih suka menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, karena khawatir ada pekerjaan atau masalah baru.

Dan peran sang istri sangat membantu kehidupannya. Istrinya bisa menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga, seperti pendidikan anak-anak, dan lain

sebagainya. Karena itu Pak Jo karena akhirnya bisa fokus dengan pekerjaan.

"Kita bisa melihat apa yang saya bangun, apa yang saya lakukan di JNE sampai hari ini bisa dianggap sebagai perusahaan tuan rumah di negeri sendiri," tutur Pak Jo.

Tahun 1985 ia mulai merintis perusahaan jasa pengirimannya. Nama awalnya adalah Worldpak yang berganti nama menjadi Pronto. Alhasil, pada tahun 1990 ia menjual seluruh sahamnya di Pronto dan mendirikan JNE.

Saat ia mendirikan JNE, Pak Jo sudah 8 tahun memeluk agama Islam. Ia meyakini apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan membantu orang lain.

Saat umrah pada 2009, ia berdoa di Masjidil Haram, memohon kepada Allah

agar diizinkan mendirikan masjid. Ia mendapatkan jawaban melalui mimpi, "Jagankan satu, 99 masjid pun diizinkan". Kira-kira seperti itulah jawaban dalam mimpinya.

Pak Jo menganggap itu bukan mimpi biasa melainkan perintah yang harus dilaksanakan. Hingga ia pun bertekad untuk mendirikan 99 masjid dengan nama sesuai Asmaul Husna. Untuk itu pada 3 Mei 2017, ia mendirikan Johari Zein Foundation agar terlaksana cita-citanya membangun 99 masjid di 8 penjuru dunia.

Pak Jo merupakan sosok yang selalu senang melakukan kegiatan sosial dan gemar bersedekah. Dengan itu, ia melaksanakan perintah Allah SWT dalam Al Quran. Lagi pula baginya, berbagi dan sedekah adalah hal penting yang harus dilakukan.

Sebab bagi Pak Jo, agama bukan hanya soal ibadah dan seremoni, tetapi juga tingkah

laku, salah satunya dengan memberi makan dan berbagi kepada anak yatim piatu dan orang miskin.

"Karena itu saya simpulkan bahwa di kegiatan

komersial, diperlukan kegiatan sosial. Karena komersial tanpa sosial, bisa-bisa tidak panjang umurnya," ujar Pak Jo, "Jadi sesuatu yang panjang umurnya adalah ketika dia menjadi berkah, menjadi berguna."

Karena itulah, yayasan sosial yang dibuat Pak Jo memiliki harapan agar kegiatan komersialnya bisa menjadi berkah. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa JNE sukses karena menggunakan 'manajemen spiritual'. Pak Jo mengaku bahwa di setiap kegiatan, pasti ada anak yatim yang diundang dan disantuni. Itu sudah berjalan selama 29 tahun.

Kegiatannya pun bukan hanya sekedar memberikan nasi kotak, tetapi mengajak makan di restoran di mall, menonton film di bioskop hingga berbelanja di supermarket.

"Itu menyenangkan karena melatih mereka kepemimpinan, dan melatih mereka memikirkan temannya," tutur Pak Jo. ♦ros





10 POIN PENJELASAN MENTERI AGAMA TERKAIT PERSIAPAN IBADAH HAJI 1443H/2022M

Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, menyampaikan 10 poin terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M. Hal ini disampaikan Menag dalam rapat kerja Menteri Agama RI dan Komisi VIII DPR RI tentang Penjelasan Persiapan Pelayanan dan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M, Rabu (16/2/2022).



H/2022 M," lanjut Gusmen.

Ketiga, pengisian kuota haji dan jamaah yang diberangkatkan, apabila tahun ini ada pemberangkatan. Gusmen mengatakan, pengisian kuota berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 April 2019.

"Adapun jamaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M adalah jamaah haji yang berhak berangkat pada tahun 1441 H/2020 M," jelas Gusmen.

Keempat, skenario penyelenggaraan ibadah haji. Gusmen memaparkan, mengingat sampai saat ini wabah Covid-19 belum berakhir, yang ditandai dengan munculnya varian baru Omicron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443

Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M hanya berkisar tiga bulan 15 hari

H/2022 M dengan tiga opsi.

Ketiganya adalah kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jamaah haji. Gusmen menyampaikan, pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama, yaitu kuota penuh.

Kelima, waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai perkiraan jadwal, kelompok terbang (kloter) pertama jamaah haji tahun 1443 H/2022 M direncanakan berangkat pada 4 Dzulq'adah 1443 H/5 Juni 2022 M.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M hanya berkisar tiga bulan 15 hari," kata Gusmen.

Keenam, pelayanan jamaah haji di Arab Saudi. Gusmen mengutarakan, telah membentuk Tim Penyediaan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi bagi jamaah

Gusmen (Gus Menteri, panggilan akrab Menag) mengikuti rapat secara daring dari Rembang. Hadir secara luring di Gedung DPR, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief beserta jajarannya.

Gusmen menyampaikan 10 hal terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pertama, kepastian Penyelenggaraan Ibadah Haji. Gusmen menyampaikan, kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443 H/2022 M sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.

"Sampai dengan saat ini, kepastian

tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443 H/2022 M, belum dapat diperoleh, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Rapat Kerja sebelumnya," kata Gusmen.

Kedua, tentang MoU persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Gusmen menyampaikan, salah satu tahapan persiapan adalah dilakukannya MoU tentang penyelenggaraan ibadah haji.

"Dalam rangka memperoleh kuota haji, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Namun sampai saat ini kami belum mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443

haji di Arab Saudi.

"Insya Allah, dalam waktu dekat tim tersebut segera berangkat ke Arab Saudi untuk menyiapkan layanan di Arab Saudi," tambah Gusmen.

Ketujuh, pelayanan di embarkasi haji. Kementerian Agama terus melakukan peningkatan pelayanan di embarkasi. Antara lain melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana asrama haji, perekaman data biometrik jamaah, dan pelayanan barang bawaan jamaah di embarkasi.

Kedelapan, Kementerian Agama akan memberikan insentif Kepala Regu (Karu) dan Kepala Rombongan (Karom). Tujuannya, untuk memberikan semangat ke-

demis dan Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Tahun 1443 H/2022 M.

Pembinaan Jamaah Haji di dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik haji di tingkat KUA Kecamatan dan Kankemenag Kab/Kota.

Manasik di tingkat KUA Kecamatan dilakukan sebanyak delapan kali untuk wilayah luar Jawa dan enam kali untuk wilayah Jawa. Adapun manasik di tingkat Kankemenag dilakukan sebanyak dua kali.

"Selain manasik, jamaah haji juga dibekali buku panduan manasik haji," terang Gusmen.

Sementara itu, pembinaan jamaah haji

tang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji tahun 1443H/2022M.

Kedua, melakukan integrasi Siskohat dengan aplikasi Peduli Lindungi, serta aplikasi Tawakkalna, sehingga identifikasi atas status vaksinasi jamaah haji dapat dilakukan dengan mudah.

Ketiga, penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.

Menteri Agama Usulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 1443 H Rp 45 juta

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1443 H/2022 M



Jemaah Haji Indonesia

pada jamaah haji yang mendapat tugas tambahan sebagai Karu dan Karom.

"Kepada jamaah tersebut diberikan insentif berupa insentif Karu sebesar Rp 750.000 dan Karom sebesar Rp 1.250.000 per orang," jelas Gusmen.

Kesembilan, pembinaan jamaah haji di dalam negeri dan luar negeri. Gusmen mengatakan, pihaknya telah menyusun buku Panduan Manasik Haji di Masa Pan-

di luar negeri dilakukan dalam bentuk badal haji bagi jamaah yang meninggal, sebelum waktu wukuf dan jamaah sakit yang tidak dapat melakukan safari wukuf.

Kesepuluh, mitigasi penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M. Mitigasi dilakukan dengan tiga langkah.

Pertama, papar Gusmen, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi ten-

senilai Rp 45.053.368,00.

Usulan ini disampaikan Gus Menteri, panggilan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI tentang Penjelasan Persiapan Pelayanan dan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443H/2022M.

Raker yang digelar secara hybrid ini berlangsung pada Rabu (16/2/2022). Gus Menteri mengikuti rapat secara dar-

ing dari Rembang. Hadir secara luring di Gedung DPR, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Subhan Cholid, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Jaja Jaelani, beserta jajarannya.

Gusmen mengatakan, kebijakan komponen Bipih tersebut diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang.

"Keseimbangan tersebut dimaksudkan, agar jamaah tidak terlalu terbebani

uler dan Khusus Tahun 1443H/2022M.

Untuk BPIH reguler, ada dua komponen, yaitu: komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi), dana efisiensi haji, dan sumber lain yang sah.

Komponen BPIH yang dibebankan langsung kepada jamaah disebut dengan Bipih. Sedangkan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi), dana efisiensi haji, dan sumber lain yang sah, disebut dengan pembiayaan tidak langsung (bantuan).

Tahun 2022, BPIH untuk jamaah haji reguler yang bersumber dari dana nilai

kewajaran harga, dan kualitas layanan dalam pembiayaan komponen BPIH. Untuk komponen operasional di dalam negeri, biaya haji disusun sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk komponen di Arab Saudi, dasar pembiayaannya menggunakan Ta'limatul Hajj Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar," tutur Gus Menteri.

Menag menambahkan, penyusunan BPIH



Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief

dengan biaya yang harus dibayar, mengingat sudah dua tahun melakukan pelunasan Bipih. Namun di sisi lain juga harus menjaga prinsip istita'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya," papar Gusmen.

Usulan Kemenag ini sudah disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI, melalui Surat Nomor MA/ 042/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Usulan BPIH Reg-

manfaat (optimalisasi), dana efisiensi, dan sumber lain yang sah diusulkan sebesar Rp 8.994.750.278.321,83.

"Untuk komponen biaya penerbangan haji, disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak (dekat/jauh) dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi," jelas Menag.

Gus Menteri mengatakan, pemerintah mengedepankan prinsip rasionalitas,

ini tetap mempertimbangkan hasil evaluasi internal dan eksternal, terutama rekomendasi hasil pengawasan DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji 1440 H/2019 M.

"Mohon kiranya usulan BPIH tahun 1443 H/2022 M tersebut, dapat segera dibahas bersama antara Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI dengan Panja BPIH Kementerian Agama," imbuhnya. ♦mt

Jakarta Fashion Trend 2022

HADIRKAN SINERGI BARU ANTARA FASHION DAN SENI

Membahas trend fashion seperti tidak ada habisnya, dunia fashion terus berkembang dengan pesat, para desainer pun berlomba memperlihatkan gaya busana dengan identitas Indonesia. Mulai dari busana etnik kontemporer, classy elegant, sporty casual, modest wear hingga busana Muslim Syar'i.

Seperti halnya di ajang tahunan Jakarta Fashion Trend yang digelar oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) Jakarta Chapter pada Rabu (9/2/22) di Soehanna Hall, The Energy Building SCBD, menghadirkan sinergi baru antara fashion dan seni. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuat semangat baru dunia fashion maupun seni di Tanah Air.

Hannie Hananto, Ketua Indonesian Fashion Chamber (IFC) Jakarta Chapter mengatakan, fashion dan seni merupakan penggerak industri ekonomi kreatif yang dinilai potensial.

"Acara yang diadakan secara hybrid ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya," katanya.

Hannie menjelaskan, Jakarta Fashion Trend 2022 bekerja sama dengan Institut

Kesenian Jakarta (IKJ) dengan misi untuk memajukan fashion di Indonesia, khususnya di Jakarta. Hal ini dipilih karena melihat IKJ sebagai institusi pendidikan seni dengan misi selaras, yakni menciptakan dan mengembangkan seni urban dan industri budaya di Indonesia.

"Selepas pandemik yang membuat surut dunia fashion dan seni selama 2 tahun, IFC Jakarta tahun ini berusaha



membawa rekan-rekan dari Institut Kesenian Jakarta untuk membuat langkah awal bersama melalui pagelaran Jakarta Fashion Trend. Kami mengajak pelaku fashion di Jakarta untuk mulai bergerak bersama," ujarnya.

Dengan mengangkat tema FashionArt, hasil kolaborasi IFC Jakarta dan IKJ dalam gelaran Jakarta Fashion Trend 2022 dituangkan dalam pertunjukan yang memadukan peragaan busana, tari kontemporer, dan rupa gambar multimedia. Kolaborasi ini, bertujuan untuk memperlihatkan pertumbuhan budaya urban melalui peran seni rupa, tari, dan fashion ke ranah publik.

"Fashion show didukung multimedia yang dibuat oleh mahasiswa Prodi Desain Komunikasi Visual (DKV) FSRD IKJ. Sebagai pembuka dan penutup setiap Fashion Parade akan ditampilkan tari kontemporer oleh mahasiswa Prodi Seni Tari dari Fakultas Seni Pertunjukan IKJ," terangnya.

Dalam Press Conference yang diadakan sebelum fashion show berlangsung, Han-

nie menceritakan bahwa karya-karya yang disajikan pada Jakarta Fashion Trend 2022 banyak terinspirasi dari griya art city urban. Ini karena pihak IFC sendiri menganggap bahwa fashion dan art harus bersinergi.

"Jakarta Fashion Trend 2022 terinspirasi dari griya art city urban. Kami menganggap bahwa fashion dan art harus bersinergi dengan menganggap FashionArt, menjadi arah segar yang baru bagi dunia fashion dan dunia art," katanya.

Jakarta Fashion Trend 2022 menghadirkan Fashion Parade karya 14 fashion designer yang tergabung dalam IFC Jakarta, serta perwakilan dari IFC chapter lainnya. Tidak hanya itu, ada pula karya kolaborasi mahasiswa Program Studi (Prodi) Desain Produk Mode dan Busana Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) IKJ.

Fashion parade terbagi menjadi lima sesi. Semua koleksi busana yang dipergakan pun memperlihatkan fragmen perkembangan dan keragaman gaya busana Indonesia.

"Mulai dari busana etnik kontemporer,

classy elegant, sporty casual, modest wear, dan busana muslim syari dengan mengangkat konten lokal dan mengacu pada tren global, termasuk isu sustainable dan ethical fashion yang tengah menjadi perhatian dunia," tuturnya.

Taruna K Kusmayadi selaku Advisory Board IFC, yang turut hadir dalam perhelatan tahunan IFC ini menerangkan, jika koleksi yang ditampilkan mengimplementasikan tren fashion di 2022. Tren tersebut nantinya dibagi ke dalam empat sub tema, yakni essential, spirituality, exploration, dan exploitation.

"Pertama essential, hidup sehat, mulai curiga apakah orang ini sehat atau gak, dengan wujud seperti APD dengan konsep yang lebih homey. Kedua, spirituality, menjunjung tinggi nationality. Exploration, mengeksplor teknologi untuk membantu kita melakukan sesuatu. Exploitation, lebih kepada apa yang kita alami karena kerakusan manusia juga, yang gak melindungi alam, yang akhirnya bumi dieksploitasi oleh masyarakatnya," pungkasnya. ♦irm





Mengusung Fashion Modest Wear

BRAND FLORIMIA JAJAL PASAR ASIA

Modest wear atau modest fashion, gaya berbusana yang pertama kali diperkenalkan ke pencinta fashion pada 2016 di Istanbul. Lalu menyusul sejumlah negara lain, seperti London dan Dubai, dan Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Laman The Every Girl menjelaskan, bahwa modest fashion merupakan gaya berbusana sederhana yang mengedepankan unsur kesopanan, karena pakaian sengaja dibuat menutupi sebagian besar tubuh. Yaa, pakaian oversize, berleher panjang, berleher tinggi (turtleneck), dan rok panjang adalah deretan model busana yang ditawarkan modest wear.

Tapi sebenarnya, modest wear bukan hanya diperuntukkan untuk perempuan berhijab saja. Inspirasi modest wear dieksplorasi lebih inklusif dan beragam, agar bisa digunakan para wanita yang menyukai tren berbusana ini.

Tidak bisa dipungkiri, memang tren modest wear banyak dicintai kaum hawa di seluruh penjuru dunia, termasuk Indo-

nesia. Itu karena banyaknya koleksi tunik, kaftan, bahkan maxi dress yang menarik.

Alhasil sejumlah brand kenamaan dunia pun mulai merilis modest wear untuk para konsumennya. Apalagi dalam waktu dekat, dunia akan memasuki bulan Ramadhan dan menyambut Idul Fitri.

Sejumlah koleksi ready to wear dari modest fashion pun pastinya sudah disiapkan. Berbagai bahan pakaian mulai dari knit, chiffon, satin, crepe, jersey, dan katun dide-sain sedemikian rupa untuk mendapatkan busana dengan tren modest wear.

Kombinasi bahan seperti tulle, chantilly, dan brocade masih menjadi primadona fashion muslimah 2022, bahkan trend fashion ini bukan hanya diminati oleh muslimah Indonesia, tapi juga merambah hingga Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura hingga Taiwan.

Owner Brand Florimia, Nelva Amelia mengatakan, paling rutin pengiriman baju dari brand Florimia yaitu ke Malaysia berupa dress atau tunic, yang biasa digunakan untuk acara formal atau festive.

Dalam waktu dekat, muslimah asal



Aceh ini, akan mengeluarkan produk terbaru untuk Ramadhan dan Idul Fitri nanti.

"Ada Raya Collection, kita buat atasan dan dress yang bisa dipakai untuk Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri nanti," ungkapinya.

Dia menambahkan, jumlah pengiriman produk biasanya disesuaikan dengan orderan pelanggan, dengan sistem order baru dijahit dan dikirimkan. Tak tanggung-tanggung, wanita berhijab ini mengirim produk ke Malaysia hingga mencapai 30 baju dalam setiap bulannya, jumlah tersebut konsisten sejak akhir 2020.

Sementara ke Brunei Darussalam dan Singapura, dikatakan Nelva, sejauh ini masih tidak menentu. Justru orderan dari Hongkong atau Taiwan terbilang banyak dibanding ke Brunei dan Singapura.

"Meskipun yang order rata-rata merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana," tambahnya.

Sedangkan di Aceh, Nelva mengaku, pihaknya sangat jarang mendapat orderan. Karena memang target market Florimia adalah seluruh Indonesia. Florimia sendiri sudah hadir sejak 2012 dengan mengusung gaya urban modest wear.

Bentuk pemasaran dan promosi yang dilakukan, pihaknya menggunakan selebgram lokal di daerah tersebut untuk endorse sebagai media promosi.

"Misalnya kita mau coba pasar di daerah A, jadi kita pakai influencer atau selebgram lokal di daerah A itu untuk endorse sebagai media promosi. Karena kita untuk lihat pasar di satu daerah itu ada semacam riset kecil-kecilan sebelum memutuskan untuk mencari market di daerah itu," kata perempuan asal Banda Aceh ini.

Apabila untuk domestik, lanjutnya, justru lebih banyak orderan datang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, Kalimantan dan Papua.

Dalam mengawali bisnisnya, Nelva Amelia melakukan semua proses produksi seorang diri, serta kesulitan dalam memutar modal dari omset yang didapatnya yang saat itu belum signifikan.

"Awal itu zaman kuliah tahun 2012, mulai coba-coba jahit baju dan iseng-iseng foto terus upload di sosial media dan e-commerce, kemudian ternyata ada yang suka dan order, nah dari situ saya memulainya," kata Nelva.

Ketika sudah mulai banyak pesanan, kemudian Nelva merekrut penjahit untuk memproduksi baju yang di desainnya sendiri.

Sejauh ini Nelva masih kesulitan untuk menyetok bahan kain yang digunakan. Sebab, saat ini masih bergantung pada ketersediaan bahan kain di toko-toko tekstil yang ada di Banda Aceh.

"Sering kewalahannya itu di bahan ya. Misalnya untuk motif ini yang order 300 pakaian, ternyata bahannya yang ada di toko sini hanya cukup untuk 100 pakaian, kendalanya sering disitu," ucapnya.

Sejauh ini, Florimia mengeluarkan minimal tiga desain baju busana muslim dalam sebulan. Untuk pemasarannya hanya online di akun Instagram Florimia dan E-commerce secara ready dan pre order, jadi ukurannya juga bisa ditentukan sendiri oleh pembeli sebelum di produksi. ♦ irm



WAHAI PEJABAT, JAGA MULUT!

Sambil menikmati pergerakan kereta api bawah tanah (Subway) di kota New York saya mencoba membaca beberapa highlights (breaking news) baik domestik maupun di dunia global. Pada tataran global, Rusia saat ini secara membabi buta menyerang Ukrain secara masif. India terus melakukan ragam kezholiman kepada Umat Islam. Uighur dan Rohingya masih dalam penderitaan panjang. Kashmir apalagi Palestina menuju masa depan yang nampak semakin kelam.

Dalam negeri tercinta Indonesia juga mengalami berbagai kekisruhan, tidak secara fisik. Tapi secara lisan, tulisan yang melibatkan emosi massa. Terjadi peperangan dahsyat di dunia maya tentang banyak hal. Dari tuduhan membenarkan KDRT oleh seorang penceramah, pengharaman wayang juga oleh seorang da'i dan kounter wayang yang menghina da'i, hingga ke masalah pembesar suara dari masjid-masjid yang ingin diatur oleh Kementerian Agama RI.

Dan semua itu terjadi di saat masyarakat mengalami tingkatan emosio dan sensitifitas yang kritis. Semuanya dipicu juga oleh banyak hal. Dari pandemi yang belum juga berakhir, tergantung "tendensi" (kecenderungan) menempatkannya (kadang naik, tiba-tiba biasa saja, lalu mendadak naik lagi). Hingga ke berbagai kebijakan publik yang dianggap semena-mana dari para pengambil kebijakan. Dari Mas'udi Omnibus law, UU IKN, hingga ke meningginya harga minyak yang menghilang dari pasar secara mendadak.

Dan runyamnya lagi karena di tengah situasi yang tidak menentu dengan suasana emosional itu, seorang pejabat tinggi negara memberikan komentar yang bagaikan menyiram bensin ke tengah kobaran api.

Di sinilah ironisnya, tidak jarang yang juga sering menjadi pemicu ragam kekisruhan dan kemarahan itu karena pemegang otoritas negeri (pejabat) yang seharusnya menjadi tauladan justru tidak mampu mengontrol pernyataan-pernyataannya yang insensitif.

Benarlah kata sebagian orang bijak: kata itu bisa jadi air yang menyejukkan. Tapi juga bisa jadi api yang membakar.

Hakikat inilah diingatkan secara tersirat tapi tegas oleh beberapa ayat Al-Quran. Dua ayat yang ingin saya kutip di bawah ini saya kira mewakili urgensi seseorang men-



Oleh: Shamsi Ali

imam di Islamic Center of New York
dan direktur Jamaica Muslim Center



*Pemimpin itu katanya didengar.
Baik dalam makna positif (diikuti)
atau dalam makna negatif (ditolak).
Tapi Intinya kata-kata Pemimpin itu
didengar oleh publik dan karenanya
kerap menimbulkan kekisruhan dan
kemarahan.*

jaga kata atau pernyataan.

Ketika Allah bersumpah dengan lisan dan bibir: wa lisānaw wa syafatain (dan demi lidah dan dua bibir) para Ulama mengungkapkan bahwa salah satu maksud terpenting dari ayat itu adalah Urgensi menjaga kata-kata atau pembicaraan.

Demikian juga ketika Allah menggandengkan beberapa hal pokok kehidupan manusia di awal Surah Ar-Rahman. Satu yang terpenting di antaranya adalah urgensi membangun komunikasi yang tidak saja benar. Tapi juga berkesesuaian (proporsional), termasuk di dalamnya menjaga sensitifitas objek pembicaraan.

'allahmahul-bayān (Allah mengajarkan al-bayaan) oleh sebagian ulama dimaknai sebagai ekspresi sosial manusia dengan alam sekitarnya. Termasuk di antaranya urgensi menjaga kata dan pembicaraan.

Rasulullah SAW sendiri bahkan menjamin syurga bagi siapa yang mampu menjaga lisanya. Ini sekaligus menandakan urgensi berhati-hati dalam berkata atau berbicara. Karena benar juga kata orang bijak: sebuah kata dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh sebuah jarum.

Dan pastinya akan sensitif dan sangat disayangkan ketika kata atau pernyataan itu keluar dari mulut seseorang yang terlanjur menjadi figur publik (public figur). Apalagi jika figuritas itu karena sebuah posisi publik, khususnya para pemimpin negeri.

Pemimpin itu katanya didengar. Baik dalam makna positif (diikuti) atau dalam makna negatif (ditolak). Tapi Intinya kata-kata Pemimpin itu didengar oleh publik dan karenanya kerap menimbulkan kekisruhan dan kemarahan.

Contoh terdekat yang sering saya sampaikan selama ini adalah Donald Trump. Sebelum menjadi Presiden Amerika Donald Trump sering memberikan statemen atau pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Tapi ketika itu tidak terlalu menimbulkan "pubic damage" (kerusakan umum) yang terasa. Bahkan saya sendiri pernah berkesempatan menemuinya ketika memberikan statemen yang sangat tidak bersahabat dengan Islam. Tapi semua itu terasa biasa saja. Berlalu tanpa ada dampak yang terlalu berarti.

Berbeda ketika Trump telah terpilih jadi presiden. Kata-katanya walaupun itu nampak kecil ternyata memiliki dampak besar di benak banyak rakyat Amerika. Pernyataan Trump misalnya bahwa "Islam hates

us” atau “Islam membenci kita” membawa dampak destruktif yang luar biasa.

Akibat statemen-statemen Donald Trump yang ugal-ugalan begitu banyak warga Amerika yang mengambilnya secara hitam putih sehingga terbangun ketakutan, kecurigaan, bahkan ketakutan dan kebencian kepada agama ini.

Di sinilah saya ingin mengingatkan kepada semua jajaran kepemimpinan di tanah air, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pada skala apapun untuk menjaga mulut (pernyataan-pernyataan). Karena begitu kata atau pernyataan itu keluar ke publik menimbulkan kegelisahan, keresahan, kekisruhan, kemarahan dan perdebatan yang membawa kepada permusuhan dan perpecahan di antara sesama.

Ada baiknya para pejabat negeri untuk sadar bahwa kata atau pernyataan mereka itu memiliki dampak yang besar, sekaligus pertanggung jawaban besar dunia akhirat. Di dunia akan direspon oleh publik. Jika baik akan di sanjung. Tapi jika salah dan tidak sensitif akan menimbulkan kekisruhan dan kemarahan.

Yang paling berbahaya dari pernyataan para pejabat adalah ketika diterima publik sebagai bentuk kezholiman dan upaya belah bambu. Usaha membangun toleransi dan kesatuan akan ambruk karena prilaku dan ucapan pejabat yang semborono.

Ingat, di akhirat kelak akan ada dipertanggung di hadapan yang Maha Pemilik Hari Pengadilan (Malik yaumiddin). Para pejabat itu harus sadar dengan sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka hendaknya berkata yang baik atau diam”.

Dan ada baiknya para pejabat itu ingat



Yang paling berbahaya dari pernyataan para pejabat adalah ketika diterima publik sebagai bentuk kezholiman dan upaya belah bambu. Usaha membangun toleransi dan kesatuan akan ambruk karena prilaku dan ucapan pejabat yang semborono.

kembali seruan: kerja, kerja, kerja! Jangan terlalu banyak ngomong. Apalagi tentang hal yang tidak didasari keilmuan yang cukup dan kemampuan komunikasi amburadul.

Akhirnya pejabat dituntut mampu membuat kebijakan-kebijakan publik yang penting dan membawa manfaat Umum ke publik. Pengaturan suara dari masjid baik itu azan, sholawat, dan lain-lain ada kebijakan yang tidak perlu.

Azan, lonceng, dan semua suara-suara dari rumah ibadah telah menjadi tradisi kehidupan masyarakat yang telah diterima. Apalagi disadari bahwa itu kegiatan ritual agama yang diakui. Karenanya yang perlu adalah “penerimaan” (acceptance) melalui saling memahami (Understanding) dan menghormati (respect). Itulah esensi toleransi.

Jika hal-hal seperti ini diatur secara formal maka tidak perlu lagi toleransi antar Umat beragama. Karena memang yang demikian Sudah sebuah pengaturan formal dari otoritas.

Dan kalau alasan pengaturan ini adalah menjaga “perasaan” mereka yang berbeda maka ini runyam bagi upaya membangun relasi harmoni antar Umat ke depan. Ketika umat Kristiani akan bangun gereja, atau beribadah di sebuah lokalitas haruskah dibatasi karena ada perasaan tidak enak dari warga lain?

Karenanya sebelum membuat kebijakan berpikirlah. Dan yang terpenting cari masukan dari semua stakeholder (tokoh agama khususnya) biar tidak nampak otoriter. Kecuali memang kalau ingin dianggap kuat dan “pintar” untuk menutupi kebalikannya.

Lelah bangsa ini dijadikan ribut oleh sebagian pejabatnya sendiri! ♦





SUMSEL JADI ROLE MODEL TRANSPORTASI UMUM TERINTEGRASI

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Walikota Palembang Harnojoyo, melaunching Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum (GNKAU) di Pelataran Halaman Parkir Palembang Icon.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menunjuk Provinsi Sumsel tepatnya Kota Palembang sebagai role model kota yang sukses menerapkan angkutan umum. Ditunjuknya Kota Palembang karena kota ini termasuk salah satu kota yang pertama di Indonesia yang memiliki 5 moda transportasi yang lengkap, khususnya untuk angkutan jalan dan kereta api.

Menhub Budi Karya menuturkan, kegiatan Gerakan Nasional Kembali ke Ang-

kutan Umum bertujuan untuk mengajak masyarakat. Sekaligus mensosialisasikan program Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi/ kota di wilayah Sumatera Selatan dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"GNKAU sebagai salah satu wujud kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan masyarakat semua pihak harus mendukung kembali ke angkutan umum. Kota Palembang ini lengkap, di dalamnya terdapat transpor-

tasi darat, sungai dan udara, dan juga kereta api yang terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam melayani masyarakat kota Palembang," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini pula secara simbolis Menhub Budi Karya Sumadi memberikan secara simbolis Kartu berlangganan LRT Sumsel, kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Mahasiswa dan Pelajar. Dikatakan Menhub, Kartu Uang Elektronik berlangganan LRT bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel, dapat diakses hanya dengan membayar Rp.25.000.

"Satu bulan kulu kilir, 25 ribu dari ujung ke ujung. Saldo 25 ribu untuk satu bulan pelajar dan mahasiswa kita harapkan ini digunakan secara masif kolaboratif, semoga ini bermanfaat Palembang makin modern," pungkasnya.

Sementara Gubernur Sumsel H Herman Deru menuturkan, Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang telah melakukan sejumlah langkah, yaitu melakukan rerouting trayek angkot dan Bus Rapid Transit (BRT) dan pembangunan fasilitas halte bus di dekat stasiun LRT.

"Terimakasih Bapak Menteri yang juga putra daerah asli Sumsel, atas arahan Presiden harus siap merubah mindset. Tidak ada yang lebih pantas, selain ungkapan terimakasih kami kepada Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian khusus kepada provinsi Sumsel," tuturnya.

Herman Deru mengaku, Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah bekerjasama dengan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, serta didukung oleh Bank Sumsel Babel telah menerbitkan ID-Card bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel secara bertahap.

"Sebagai alat ganti pembayaran tunai yaitu Kartu Uang Elektronik (K.U.E) yang terintegrasi dengan LRT, BRT, BTS, Angkot, transportasi lainnya, penyeberangan Tanjung Api Api, Tol serta fasilitas layanan publik lainnya," tandasnya.

Launching Gerakan Nasional Ayo Naik Kendaraan Umum di Sumsel tersebut diawali dengan menggunakan moda transportasi umum Light Rail Transit atau Lintas Rel Terpadu (LRT) Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri, Walikota Palembang H. Harnoyo.

Setibanya di Stasiun LRT Dishub Palembang, Gubernur dan rombongan selanjutnya menggunakan moda angkutan umum, angkot dan angkutan umum ber-AC lainnya secara estafet menuju lokasi launching di stasiun LRT Bumi Sriwijaya Palembang.

Dalam LRT, Gubernur dan Menhub berdialog dengan para penumpang yang menggunakan moda LRT.

Upaya tersebut menjadi salah satu ajakan bagi masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk kembali menggunakan transportasi umum dalam beraktivitas sehari-hari.

Upaya tersebut menjadi salah satu ajakan bagi masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk kembali menggu-

gunakan transportasi umum dalam beraktivitas sehari-hari.

"Usai launching gerakan nasional ini, tugas kita sekarang baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota maupun masyarakat menggunakan angkutan umum saja untuk kegiatan sehari-hari selain aman tentunya juga nyaman," kata Herman Deru.

Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Kementerian Perhubungan RI lanjut Herman Deru akan meluncurkan angkutan umum ber-AC yang direncanakan akan beroperasi pada April 2022 mendatang.

"Di awal april nanti kita akan melaunching angkutan umum ber-AC. Dibuat nyaman mungkin. Tadi saya sudah mencoba bersama Pak Menteri," tuturnya.

Sementara itu Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel dan pihaknya telah menyediakan kartu elektronik untuk para pelajar dan mahasiswa untuk naik LRT dengan saldo Rp 25 ribu yang dapat digunakan selama satu bulan.

"Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan kartu untuk para pelajar dan mahasiswa. Kartu ini saldonya Rp 25 ribu untuk pemakaian satu bulan," kata Menhub.

Dia mengharapkan masyarakat Kota Palembang untuk kembali menggunakan transportasi umum secara masif.

"Kita juga berharap masyarakat di Palembang bisa menggunakan transportasi umum secara masif sehingga Palembang bisa makin maju dan oke," pungkasnya. ♦rhd/***



JEMBATAN TANJUNG LONTAR, BUKTI JALANNYA KOLABORASI PUSAT DAN DAERAH

Jembatan Tanjung Lontar yang berada di Desa Tangsi Lontar Kecamatan Pengadonan dan Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan berhasil menarik perhatian banyak kalangan. Hingga membuat dua menteri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung untuk meresmikannya.

Meski bangunan jembatan itu biasa saja namun itulah bentuk nyata kolaborasi yang dibangun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR RI dengan berhasil menciptakan produk pembangunan yang berkualitas.

Namun yang paling penting, kini impian masyarakat Desa Tangsi Lontar Kecamatan Pengadonan dan Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU untuk menikmati akses transportasi berupa jembatan permanen akhirnya terwujud.

Jembatan Tanjung Lontar diresmikan

Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Menteri PUPR RI, M. Basuki Hadimoljono, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dan Ketua KPK RI Firlil Bahuri bertempat di Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU, Minggu lalu.

Jembatan yang memiliki panjang 90 meter dan lebar 6 meter ini membentang



di atas Sungai Ogan sekarang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai akses lalu lintas ekonomi masyarakat utamanya dalam membawa hasil produksi pertanian serta aktivitas perekonomian lainnya.

Gubernur Herman Deru menyebut, jembatan yang dibangun secara permanen tersebut dibangun dengan pendanaan hasil kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kementerian PUPR RI.

"Jembatan ini dibangun tidak ada yang mengira. Ketika saya berdiskusi dengan Ketua KPK pak Firli Bahuri saat itu masih menjadi Kapolda Sumsel. Beliau mengatakan bahwa daerah ini butuh akses khusus untuk mempercepat produksi pertanian agar bisa keluar, sebab daerah ini sebagai penghasil padi yang luar biasa," ucapnya.

Namun belakangan wilayah itu lanjut Herman Deru, produksi padi dikawasan sekitar berkurang karena irigasinya rusak karena diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Karena itu dia berharap kepada Kementerian PUPR agar dapat memban-



gun bedungan/irigasi untuk pengairan sawah irigasi.

"Kita lihat saja sungai disini tetap bertahan karena masyarakat sudah berupaya menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS). Mo-

hon pak menteri PUPR untuk dapat membangun bendungan untuk pengairan sawah irigasi," tutupnya.

Menanggapi hal itu, Menteri PUPR RI, M. Basuki Hadimoeljono mengucapkan



terima kasih kepada Ketua KPK RI, Firli Bahuri yang sudah mengusulkan pembangunan jembatan ini sehingga dapat menggantikan jembatan gantung.

"Semoga jembatan ini bisa dimanfaatkan dengan masyarakat sebaik-baiknya dalam aktivitas sehari-hari," katanya.

Lebih lanjut Menteri Basuki menegaskan

masyarakat yang juga terus digencarkan.

Pada kesempatan ini, Basuki juga menjawab keinginan masyarakat untuk perbaikan irigasi. Apalagi dia melihat begitu bagusya tanaman padi disini termasuk kualitas air sungainya yang masih jernih dan ini membuktikan bahwa DAS masih

Sementara Ketua KPK RI, Firly Bahuri yang merupakan putra daerah kelahiran Desa Lontar mengatakan, keinginan warga setempat sudah lama untuk memiliki jembatan permanen dan ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik pada warganya.



kan, dibangunnya jembatan tersebut juga menjadi bukti bahwa pemerintahan di era Presiden Jowo Widodo sangat fokus pada pembangunan infrastruktur bukan hanya jalan nasional, jalan tol, bendungan besar tapi juga pembangunan infrastruktur ke-

terjaga baik.

"Saya ingin memperbaiki irigasi. Tahun ini kita survei dan bikin desainnya, tahun depan kita bangun agar masyarakat bisa menanam minimal dua kali dalam setahun," ucapnya.

"42 tahun yang lalu kita tidak pernah terbayang kalau akan ada jembatan yang semegah ini," kata Firli

Dia berbagi kisah hidupnya saat masih tinggal di desa lontar, ketika jembatan gantung putus, masyarakat terpaksa

menggunakan alat transportasi berupa lanting terbuat dari bambu untuk digunakan untuk menyeberang termasuk bagi anak-anak sekolah.

"Alhamdulillah perhatian pemerintah telah memberikan sumbangsih sehingga Desa Lontar yang dulunya hanya mengandalkan jembatan gantung kini memiliki

lang tadi akan dibangun bendung. Kalau dibangun bendung maka akan mengiliri sawah yang luar biasa," ucapnya.

Salah satu warga Desa Tang Silontar Kecamatan Pengandonan, Heri Aguspien (30), yang hari-harinya sebagai pedagang juga merasa bangga sudah dibangunnya jembatan oleh Gubernur Sumsel dan Men-

OKU, Edward Candra mengaku kalau peresmian jembatan Desa Lontar ini merupakan hari bersejarah bagi Kabupaten OKU khususnya masyarakat Desa Lontar dan Tangsi Lontar, sebab kehadiran jembatan ini sudah sejak lama diidamkan oleh masyarakat.

"Jembatan ini menghubungkan dua



jembatan permanen," katanya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR yang telah memenuhi keinginan masyarakat di wilayah setempat untuk membangun irigasi.

"Alhamdulillah pak Menteri sudah bi-



teri PUPR.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Menteri berkat adanya jembatan ini akan mempermudah kami dalam beraktivitas," terangnya.

Kedatanga tiga pejabat negara ini membuat pelaksana harian (Plh). Bupati

kecamatan yaitu Kecamatan Pengadonan dan Kecamatan Muara Jaya. Tentu Jembatan ini sangat bermanfaat untuk akses mobilitas penduduk serta mengembangkan sentra perekonomian masyarakat yang mana daerah ini basisnya pertanian," pungkasnya. ♦rhd/***

ROBOT VS PATUNG

Setelah membahas wayang, lalu merembet ke wayang orang dan boneka, muncul lagi pertanyaan terkait robot. Kan robot itu mirip manusia, apakah robot juga haram hukumnya?

Tentu saja yang kelimpungan menjawab pertanyaan yang nggak ada habis-habisnya. Walaupun sebenarnya juga agak penasaran. Tapi sayangnya saya tidak punya literatur dari kitab fiqh klasik terkait hukum robot.

Sebab di masa klasik dulu kan tidak ada robot, bahkan terbayang pun tidak. Lagian mau cari pakai keyword apa? saya tanya mbah google yang suka kasih terjemahan unik, eh dia bilang insan aali.

Kira-kira maknanya manusia komputer barangkali. Sebab kalau komputer di-arabkan menjadi hasub aali. Tapi saya tidak yakin orang Arab paham makna insan ali. Tapi kalau disebut robot pasti mereka paham.

Jadi intinya tidak ada pembahasan tentang hukum robot dalam fiqh klasik. Sehingga kalau ada yang berfatwa tentang halal haramnya robot, sudah bisa dipastikan itu bukan fatwa fuqaha dan mujtahid klasik. Tapi lebih merupakan opini dan cara pandang orang zaman sekarang.

Dan bisa saja mereka yang terlanjur semangat mengharam-haramkan patung, boneka dan sejenisnya, otomatis akan mengharamkan robot juga.

Sebab dalam pandangan mereka robot itu intinya adalah patung, bahkan lebih haram lagi, karena patungnya bisa bicara, bergerak bahkan berjalan. Sehingga unsur 'menirukan ciptaan Allah' semakin terpenuhi. Wajar kalau ada yang bilang bahwa robot itu haram, haram dan haram. Haram pangkat tiga, karena nyaris menandingi ciptaan Allah.

Sebagai sebuah opini pribadi orang zaman sekarang mewakili genre kelompok muslim tertentu, saya nggak bisa menolak. Itu adalah hak yang punya opini. Benar tidaknya wallahu 'alam.

Namun saya sendiri boleh dong punya opini yang sedikit beda. Dalam pandangan saya, robot ada dua macam, robot dalam cerita fiksi dan robot dalam dunia nyata.

Yang sebenarnya sudah terwujud dan benar-benar ada dalam dunia nyata umumnya malah tidak berwujud seperti manusia, hewan atau makhluk hidup lainnya.



OLEH:

USTADZ AHMAD SARWAT, LC., MA

Pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI),
Direktur Sekolah Fiqih, Penulis 18
Seri Fiqih Kehidupan, Ketua Umum di
Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah.

MC Di sektor rumah tangga, sudah mulai banyak diciptakan robot yang bisa menyapu atau mengepel rumah. Robot WorxLandroid bisa memotong rumput di halaman. Robot Dolphin Nautilus bisa menyelam di kolam renang untuk membersihkannya.

Di dalam industri dan pabrik, lengan robot sudah banyak membantu pekerjaan manusia. Tapi bentuknya jauh dari manusia. Sebab robot macam itu diciptakan dengan niat bukan sekedar ingin meniru ciptaan Allah. Tetapi dari awal tujuannya untuk membantu pekerjaan manusia.

Kadang ada robot yang ditugaskan untuk menyelam ke dasar lautan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang mustahil dikerjakan manusia.

Ada juga robot yang diciptakan untuk menjelajahi planet lain, yang mustahil manusia bisa hidup disana. Ada juga robot penjinak bom, yang pastinya amat berbahaya kalau dikerjakan oleh manusia.

Di sektor rumah tangga, sudah mulai banyak diciptakan robot yang bisa menyapu atau mengepel rumah. Robot WorxLandroid bisa memotong rumput di halaman. Robot Dolphin Nautilus bisa menyelam di kolam renang untuk membersihkannya.

Di masa covid ini muncul TEMI dan AMY, masing-masing robot dari Amerika dan China, yang bisa menangani pasien covid di rumah sakit meski tidak menggantikan 100%, setidaknya bisa membantu para tenaga kesehatan dalam pekerjaan mereka yang penuh resiko.

Namun dari semua robot yang sudah eksis dan amat berguna itu, tak satu pun yang didesain menyerupai manusia. Sehingga pertanyaan bagaimana hukum robot dalam pandangan syariah, menurut saya tidak ada hubungannya. Sebab robotnya amat sangat tidak mirip dengan manusia.

Mungkin yang ditanyakan itu adalah robot-robot yang dibuat seperti manusia.

Lalu saya katakan, apakah robot yang seperti manusia itu sudah ada di tengah kita dalam keseharian?

Yang bertanya bilang ada, tapi ketika saya cecar, jawabannya di pameran robot. Itu pun di luar negeri, bukan di negara kita. Ketika saya tanya apakah dijual di pasaran, jawabannya tidak tahu.

Maka saya bilang santai saja dulu. Robot-robot yang anda intip di Youtube itu bukan robot betulan, semua hanya prototype. Bahkan tidak ada yang dijual di pasaran. Kalau pun ada, harganya pasti mahal banget. Tidak seperti hayalan kita.

Kalau yang ada di hayalan kita selama ini adalah robot fiksi. Pada dasarnya robot

fiksi itu diciptakan untuk hiburan dan seru-seruan, sedangkan dalam kenyataannya tidak pernah ada.

Biar gampang mari saya ingat-kan dengan T-800, T-850, T-1000T-XTOK715T-3000 hingga Rev-9. Semua itu karakter robot dalam film The Terminator yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger.

Robot-robot itu awalnya diciptakan oleh manusia dan diberi kemampuan kecerdasan buatan artifisial inteligent (AI) yang saking sempurna, sampai bisa berpikir untuk mengalahkan manusia.

Maka di masa mendatang diceritakan robot-robot itu berhasil mengambil alih hegemoni kekuasaan dari manusia, bahkan menjadi pembasmi manusia (The Terminator).

Sebagai hiburan boleh dibilang penampilan robot dalam Terminator mendulang sukses, setidaknya sampai dibuat berkali-kali, Ada The Terminator (1984), Terminator 2 : The Judgement Day (1991),

MC

Robot-robot itu awalnya diciptakan oleh manusia dan diberi kemampuan kecerdasan buatan artifisial inteligent (AI) yang saking sempurna, sampai bisa berpikir untuk mengalahkan manusia.

Terminator 3 : Rise of The Machine (2003), Salvation (2009), Genisys (2011) dan Dark Fate (2019).

Tapi sekali lagi, robot macam itu tidak pernah ada, cuma hayal dan kalau pun ada, tidak secanggih itu. Dan tidak akan mengalahkan manusia. Itu hanya hayalan yang mendatangkan uang buat yang punya novel atau film.

Jadi sebenarnya sebelum memberi opini secara hukum fiqih, mohon dipastikan dulu apakah objeknya benar-benar ada. Jangan jadi orang yang latah dan ikut-ikutan trend.

Sebab saya pernah ditanya orang : Apa agama yang dianut alien yang di dalam UFO alis piring terbang? Apakah kepada mereka juga diturunkan para nabi dan rasul?

Saya jawab gini : Mending panggil saja aliennya kesini, biar kita wawancara bareng-bareng. Sekalian juga tanyain di-sono ada warung padang apa nggak? ♦



KEMENDAGRI PERKUAT CORE VALUES ASN BERAKHLAK

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perkuat core values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menggelar kegiatan “Kemendagri BerAKHLAK Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0”. Acara ini dilaksanakan secara hybrid di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Agenda tersebut menghadirkan pembicara kunci Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan dua

Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian.

Mendagri Tito menyampaikan, saat ini dunia sudah berubah. Hadirnya kegiatan Kemendagri BerAKHLAK bertujuan agar para ASN menyadari apa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan memberikan pengaruh terhadap organisasi maupun individu itu sendiri. Sebagaimana fenomena yang terlihat di masyarakat, kecanggihan digital dan hadirnya media sosial membuat demokrasi semakin terbuka.

“Pengaruhnya adalah keterbukaan, transparansi, memotong birokrasi, semua informasi-informasi yang berhubungan dengan birokrasi, (dan) pelayanan-pelayanan publik oleh pemerintah,” katanya.

Deputi Bidang SDM KemenPANRB Alex Denni dalam materinya mengatakan, di era digital seperti sekarang ini disrupsi terjadi. Diperkirakan 85 juta pekerjaan akan hilang sehingga perlu terobosan agar fungsi ASN tetap sesuai dengan zaman. Oleh karena itu, penguatan budaya kerja

“Sehingga perlu ada terobosan di bidang learning dan development. Agar ASN kita tetap relevan,” ujarnya.

Denni menuturkan, Kemendagri mempunyai peran vital dalam transformasi SDMA karena sebagian besar ASN berada di bawah lingkup Pemerintahan Daerah dari Sumatra hingga Papua. Denni juga berujar terkait ekspektasi kepada seluruh ASN, yaitu mereka segera memahami dan menyelaraskan perilakunya dengan core values ASN yang sudah ditetapkan. Basic beliefs Pancasila dan core values BerAKHLAK dinilai menjadi pondasi yang kuat untuk transformasi ASN.

“Ke depannya ini akan sangat menentukan masa depan Anda sebagai ASN, mencakup dan tidak terbatas pada aspek terkait evaluasi kerja, tunkin, bonus, tallent class, peluang pengembangan karier dan kesempatan untuk learning dan development,” jelasnya.

Di sisi lain, Pendiri ESQ Center Ary Ginanjar Agustian mengungkapkan, agar bisa bertahan di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity) maka harus memiliki core values dan core purpose BerAKHLAK. Selain itu juga, para ASN perlu memiliki kemampuan super agility.

Super agility yang dimaksud adalah kemampuan untuk change agility (mampu beradaptasi dengan perubahan apapun), mental agility (mampu bertahan dalam kondisi apapun), people agility (mampu kerja sama dengan siapapun), learning agility (mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat), dan result agility (mampu tetap berprestasi dalam kondisi apapun).

Ary menjelaskan pula terkait delapan langkah dalam membangun budaya kerja BerAKHLAK. Langkah itu meliputi, (1) mapping, (2) sosialisasi, internalisasi, (3) memiliki kompetensi membangun budaya kerja, (4) membentuk leader, (5) agen perubahan, (6) evaluasi dan intervensi, (7) award dan apresiasi, (8) serta memanfaatkan teknologi. Implementasi core values BerAKHLAK ini harus terinternalisasi dan menjadi keyakinan.

“Belief systems are working model of the world that enables people to achieve desired outcomes and avoid untoward ones,” tandasnya mengutip ahli psikologi dunia Albert Bandura. ♦



Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

narasumber yakni Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni, serta

dan employer branding merupakan bagian dari strategi akselerasi transformasi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) khususnya ASN.

KEMENDAGRI DORONG PEMDA DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan transformasi digital dalam tata pengelolaan keuangan mereka. Hal tersebut perlu dilakukan guna memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, guna di daerah.

Menurut Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatono, seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders harus memiliki komitmen yang sama dalam mendorong tata kelola keuangan daerah. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang telah dibangun Kemendagri.

"Kemendagri akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Agus Fatono.

Dia juga menyampaikan, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD sebagai salah

salah satu sistem yang digunakan pemerintah daerah.

Sistem yang digunakan meliputi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pelaporan kinerja daerah, dan yang lainnya. "Nanti akan terintegrasi menjadi satu dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang STRANAS PK dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE," sebut Fatoni

Fatoni mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Banten yang pertama kali telah menyerahkan LKPD kepada BPK dan mudah-mudahan hasilnya nanti juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya,"

ujarnya.

Pihak Kemendagri juga mengapresiasi Pemprov Banten maupun pemda di wilayah tersebut yang terus konsisten membenahi tata kelola keuangan daerah, termasuk juga dalam penggunaan SIPD.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diturunkan secara teknis ke dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saat ini, di 2022 diterbitkan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD melalui Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

"Di 2022 juga telah diterbitkan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2022," pungkas Fatoni. ♦



Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatono



INDONESIA PERLU PERSIAPAN HADAPI AGING-POPULATION

Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2035, bahkan kemungkinan puncaknya akan maju di 2032. Setelah era bonus demografi selesai, penduduk usia produktif yang semula mendominasi otomatis akan bergeser menjadi penduduk usia tua.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan para pemangku kepentingan, terutama pemerintah, agar dapat mempersiapkan hadimnya penduduk usia tua yang akan mendominasi pasca era bonus demografi atau saat memasuki aging-population atau aging-society.

"Kita perkirakan 2045 kita sudah tidak lagi memasuki bonus demografi. Sudah lewat dan kita akan memasuki aging society atau aging population. Karena itu sekarang pemerintah juga sedang siap-siap menyongsong hadimnya warga negara usia tua itu," ujar Menko PMK saat mewakili Presiden Jokowi membuka Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) di Universitas Sebelas Maret (UNS),

Solo, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Pada kesempatan tersebut, hadir secara langsung Rektor UNS Jamal Wiwoho, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Koordinator Presidium Himpuni Akhmad Muqowan, para Ketua Ikatan Alumni PTN, serta para peserta Munas Himpuni. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut hadir secara daring.

Menko PMK menjelaskan, apabila Indonesia tidak segera bersiap menyambut hadimnya aging-population, dikhawatirkan negara akan menanggung beban biaya yang tidak sedikit. Karenanya, upaya untuk itu dilakukan dengan benar-benar menyiapkan generasi produktif saat ini.

"Kita perlu beri warning bahwa tugas kita adalah mempersiapkan angkatan kerja untuk produktif. Karena orang yang berada di usia produktif belum tentu produktif kalau dia tidak bekerja secara produktif juga. Ini yang harus kita pastikan supaya nanti siap memasuki aging-population," cetusnya.

Dalam rangka mempersiapkan genera-

si produktif agar tidak menjadi beban saat memasuki aging-population, Menko PMK berharap seluruh pihak dapat ikut berkontribusi. Termasuk, Himpuni yang memang memiliki jaringan luas dalam tataran PTN di Indonesia.

Salah satu yang dapat diberikan Himpuni sebagai wujud nyata kontribusi dalam pembangunan manusia Indonesia, menurut Muhadjir, ialah dengan turut menyosialisasikan dan memberi masukan supaya perjalanan bangsa ini dapat betul-betul berdaulat dan bermartabat.

"Kita harap nanti Himpuni akan ambil bagian, misalnya dalam penanganan stunting, merdeka belajar, kampus merdeka. Itu semua adalah tema-tema besar yang sekarang diupayakan untuk membangun manusia Indonesia, terutama sekarang ini kaitannya adalah dengan penyediaan lapangan kerja. Ini pekerjaan yang besar, tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan masyarakat termasuk Himpuni," tandas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. ♦

AKURASI DATA BANSOS KUNCI ATASI KEMISKINAN EKSTREM

Akurasi data menjadi salah satu masalah utama dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di tanah air. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat rapat bersama para pakar membahas strategi penghapusan kemiskinan ekstrem menuju target 0% di 2024.

Menurut Muhadjir, kesalahan dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) menjadi salah satu masalah dalam mengatasi kemiskinan melalui skema Bansos. "Inclusion error (orang yang mendapatkan bantuan sosial (Bansos), padahal tak masuk dalam kriteria penerima manfaat) dan exclusion error (orang yang semestinya mendapatkan bantuan, justru tidak sama sekali menerimanya) menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pengantasan kemiskinan melalui Bansos," kata Muhadjir baru-baru ini.

Untuk itu, Menko dan para pakar sepakat bahwa pakar tersebut juga sepakat bahwa penyempurnaan data sangat diperlukan dalam upaya mengatasi kemiskinan. "Itu (data) memang menjadi kendala dan saya rasa dari dulu yang menjadi topiknya adalah masalah integrasi data. Karena itu pada kesempatan ini juga saya berharap ada masukan sebetulnya faktor apa yang paling peka untuk bisa melakukan perubahan paling signifikan dalam konteks penanganan kemiskinan," ujar Muhadjir.

Untuk itu, lanjutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus disempurnakan. Menurut Muhadjir, DTKS merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Sebab, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata akan dapat diatasi "Data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan," kata Muhadjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di slum area

atau daerah kumuh harus tetap mendapatkan bansos. Mereka tidak boleh terlewat karena di daerah kumuh biasanya banyak keluarga miskin.

Data pokoknya, lanjut Muhadjir, harus terus disempurnakan, dicek di lapangan seperti apa sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan.

"Jangan sampai daerah slum ini tidak dapat, sebagian besar dia harus dapat karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak

wilayah dengan membangun lingkungan layak huni.

Sementara itu, Founder dan Chief Executive Asakreativita, Vivi Alatas yang menjadi salah satu pakar yang memberikan masukan dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran Bansos yang dilimpahkan kepada daerah akan lebih memungkinkan untuk dapat mengontrol kinerja pemerintahan daerah. "Memang akan lebih susah, tapi secara terperinci menjadi lebih terukur," tuturnya.

Bukan hanya itu, Vivi pun mengutarakan beberapa strategi termasuk pemberian Bansos yang telah dilakukan oleh pemerintahan Cina dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Terbukti dalam



merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," kata dia.

Selain itu, Menko PMK juga mengungkapkan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan.

Dia menerangkan, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum). Karena itu, menurut Muhadjir, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan

kurun 8 tahun (2012-2020), Cina berhasil menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0%.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di saat ini mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema. ♦



KEMENKOP UKM BERKOMITMEN CETAK WIRUSAHA BARU DI PESANTREN

Pesantren memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung perekonomian negara, terutama melalui pengembangan kewirausahaan para santrinya. Atas dasar pertimbangan tersebutlah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen mencetak wirausaha baru yang datang dari lingkungan pesantren.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara KemenKopUKM bersama PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), terkait peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat di kalangan santri. Kesepakatan tersebut sekaligus dalam perayaan Harlah NU Ke-99 yang digelar di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Bangkalan, Madura, Jawa Timur baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki hadir bersama Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur Jawa Timur (Ja-

tim) Khoffah Indar Parawansa, dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menteri Teten mengatakan, MoU tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Di mana rasio kewirausahaan ditarget tumbuh 3,95 persen pada 2024. Sementara di negara maju, rasio kewirausahaan sudah mencapai 10-14 persen.

"Saya diingatkan oleh Gus Yahya, bahwa MoU ini jangan cuma asal teken saja, tapi harus ada bukti. PBNU bilang menargetkan mampu mencetak 10.000 wirausaha baru, justru saya bilang ini sedikit.

Jumlah santri yang tersebar di seluruh Indonesia saya rasa, kita bersama bisa mencetak jumlahnya lebih dari itu," ucap MenKopUKM.

Ia mengatakan, penciptaan wirausaha baru tersebut, akan dilakukan melalui pendekatan inkubasi yang programnya sudah ada di KemenKopUKM. Tinggal nanti pembiayaannya bisa disinergikan dengan Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir.

"Selain itu ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlahnya kita terus tambah. Perbankan pun diminta menaikkan pembiayaannya ke UMKM hingga 30 persen di tahun 2024. Bahkan KemenKopUKM juga



ada LPDB-KUMKM yang bisa membantu pembiayaan dana bergulir lewat koperasi," ujar Menteri Teten.

KemenKopUKM lanjut dia, diberikan tugas untuk mengembangkan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren). Di mana saat ini pihaknya telah melakukan piloting di Koppontren Al-Ittifaq (Jawa Barat), sebagai salah satu koperasi sektor riil di sektor pangan yang terhubung dengan modern market.

"Kebutuhan pasokan hingga 56 ton, namun yang baru bisa dipenuhi baru 6 ton. Koppontren ini akan menjadi distributor dari pesantren lainnya tak hanya di Jabar. Selain itu ada juga Ponpes Sunan Drajat di Lamongan (Jatim, memiliki koperasi yang menghubungkan 17 ponpes lainnya di Jatim sebagai contoh jaringan ritel modern," sebut Menteri Teten.

Menurut hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 90,48 persen dari 11.868 pesantren sudah memiliki unit usaha. Bahkan sebanyak 2,58 persen pesantren memiliki 3-5 jenis usaha.

"Sinergi dan kolaborasi bisa kita bangun dengan kuat, maka akan mendatangkan dampak yang besar bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Termasuk yang datang dari lingkungan pesantren," ujar Teten.

Tahun 2022 ini, sambung MenKopUKM, kementerian ingin mewujudkan Pemulihan Transformatif pada UMKM dan Koperasi. Yaitu, pemulihan yang tidak sekadar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum

MoU ini jangan cuma asal teken saja, tapi harus ada bukti. PBNU bilang menargetkan mampu mencetak 10.000 wirausaha baru, justru saya bilang ini sedikit.

pandemi, tetapi sekaligus menyiapkan UMKM dan koperasi lebih siap menghadapi krisis ataupun perubahan lingkungan di masa-masa akan datang.

"Ke depan KemenKopUKM akan men-yasar langsung pelaku UMKM dan koperasi anak muda, perempuan, dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan. Tentunya keterlibatan

santri-santri muda dan alumni pesantren sangat kami harapkan," imbaunya.

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pihaknya siap mendorong terciptanya wirausaha baru. BUMN dalam hal ini diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengintervensi menuntaskan kesenjangan sosial. Di mana salah satu upayanya dengan memperkuat ekonomi umat, yakni dari pesantren.

"Indonesia ini masyarakat muslimnya terbesar, tapi kita tidak masuk 10 bahkan 5 besar industri halalnya. Untuk itu kami mendorong PBNU menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi dengan kerja sama BUMN dan PBNU," kata Erick.

Sebagai langkah awal, BUMN dan pesantren di bawah NU, mempersiapkan untuk penyediaan komoditas pangan dari pesantren. "Meningkat saat ini kita tahu ada gonjang ganjing soal stabilitas harga pangan. Kami di BUMN punya banyak sektor usaha di pangan sehingga ini sangat bisa disinergikan," tambah Erick.

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berharap, kerja sama tak hanya mendorong peningkatan kualitas SDM, tapi juga membangun kemandirian ekonomi pondok pesantren. "Semoga MoU dengan KemenKopUKM membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat, serta bangsa dan negara," katanya. ♦

TAHURA RADEN SOERJO JAWA TIMUR RAIH NILAI EFEKTIVITAS TERTINGGI

Berdasarkan hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan dengan menggunakan instrumen METT (Management Effectiveness Tracking Tools) yang dilakukan oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK, untuk tahun 2021 Tahura Raden Soerjo memperoleh nilai 82 persen.

"Nilai ini merupakan nilai tertinggi efektivitas pengelolaan Tahura se Indonesia yang berjumlah 38 Tahura," ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Khofifah menyebut bahwa nilai METT tertinggi tahun 2021 ini mengulangi prestasi yang pernah diraih Tahura Raden Soerjo pada tahun 2019 dengan nilai METT 77% yang juga merupakan nilai tertinggi

dari efektivitas pengelolaan Tahura se Indonesia pada saat itu.

"Nilai efektivitas pengelolaan Tahura Raden Soerjo mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 5 persen jika dibandingkan dengan raihan nilai tahun 2019," terangnya.

Menurut Khofifah, capaian ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan kawasan hutan konservasi yang merupakan kewenangan Pemprov Jatim.

Khofifah mengatakan, peningkatan nilai METT yang diraih merupakan indikator dari kualitas dan efektivitas pengelolaan Tahura Raden Soerjo sebagai kawasan konservasi yang menunjukkan mengalami peningkatan dan kemajuan cukup signifikan.

Artinya, lanjut dia, bahwa fungsi Tahura Raden Soerjo untuk menjamin proses-proses ekologis sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam hal pengatur tata air dari DAS Brantas dapat

Pesona Wisata TAHURA RADEN SOERJO

The charm of the Raden Soerjo forest ecotourism

Taman Hutan Raya adalah kawasan konservasi alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alamiah dan dilindungi. Kawasan ini bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai tempat untuk penelitian, pendidikan, dan rekreasi.

Forest Park is a Nature Conservation Area for especially collection of natural flora or original animal species of wildlife which its not invasi. The purpose work for education, research, scientific, culture, ecotourism, and recreation

PEMAMBIAN AIR PANAS CANGGAR

CANGGAR HOT SPRING POOL

Tempat pemandian air panas berkisar 45° - 50° C dengan latar belakang pemandangan hutan alam dan panorama gunung Welirang.

The temperature of hot spring range from 45° - 50° C with background of natural forest and welirang mountains



AIR TERJUN WATU ONDO

WATU ONDO WATERFALL

Disebut juga air terjun kembar karena di lokasi ini terdapat 2 air terjun yang saling berhadapan, berjarak 2 km dari Canggar ke arah Pacet Mojokerto.

Watu Ondo is twin waterfalls. This is consist of 2 similar waterfall facing each others. The location is 1 km from Canggar - Batu



AIR TERJUN TRETES - JOMBANG

TRETES WATERFALL - JOMBANG

Merupakan air terjun dengan ketinggian ±170 m terletak di kaki gunung Gentong Gowah Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

The height of Tretes Waterfall ± 170 m, located at the foot of Mount Gentong Gowah Galengdowo Village, Wonosalam District, Jombang Regency




AIR TERJUN WATU LUMPANG

WATU LUMPANG WATERFALL

Tidak hanya menawarkan satu air terjun, namun ada dua sekaligus. Air terjun utama tidak langsung mengalir ke bawah, melainkan berjalan menuruni bebatuan dinding tebing.

not only offers one waterfall, but there are two at once. The main waterfall does not directly flow down, but runs down the cliff wall rocks



PANORAMA PETUNG SEWU

PETUNG SEWU PANORAMIC

Spot selfie dengan latar belakang Gunung Welirang dan panorama hutan bambu Petung Sewu. Berapa di pinggir jalur alternatif Batu - Pacet.

A selfie spot with a background in Mount Welirang and the Petung Sewu bamboo forest. Located at the edge of the alternative route of Batu - Pacet




PENDAKIAN ARJUNO - WELIRANG

ARJUNO - WELIRANG HIKING

Ketinggian puncak Arjuno ± 3.338 mdpl. Dapat ditempuh melalui beberapa pos pendakian: Pos Tretes - Prigen; Pos Tambakaari; Pos Wonorejo; Pos Canggar

The height of the peak Arjuno ± 3333 mdpl. It can be reached by several posts: Tretes - Prigen; Tambakaari; Wonorejo; Canggar



PENDAKIAN GUNUNG PUNDAK

PUNDAK MOUNT HIKING

Berada di ketinggian 1.544 mdpl dengan panorama Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Jarak tempuh ± 2,2 km dari Buper Claket Kecamatan Pacet - Mojokerto

It located at 1,544 mdpl with panoramic views of Mount Welirang and Mount Penanggungan. The distance ± 2.2 km from the Buper Claket District Pacet - Mojokerto



PENDAKIAN WATU JENGER

WATU JENGER HIKING

Ketinggian puncak Watu Jengger ± 1.100 mdpl cocok bagi pendaki pemula untuk menikmati indahnya Sunset. Berada di desa Tawangrejo Kecamatan Jatirejo - Mojokerto

The height peak of Watu Jengger ± 1,100 mdpl, it is suitable for beginner hiker to enjoy the beautiful Sunset. Located in the village of Tawangrejo, Jatirejo Subdistrict - Mojokerto



LOKA WISATA SURYA

Terletak pada kawasan wisata Pacet menjadi daya tarik tersendiri terhadap obyek wisata ini. Terdapat 2 air terjun, Sumpit dan Banyu Adam dan Pendakian Gunung Pundak - Polosari

It located in The Pacet tourist area become the main attraction of this tourist. There are 2 waterfalls: Sumpit and Banyu Adam and Pundak Mount Hiking - Polosari





dipertahankan.

Selain itu melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan Tahura Raden Soerjo merupakan penyedia jasa lingkungan berupa sumber air yang dimanfaatkan oleh 47 HIPAM dan PDAM untuk memenuhi air bersih untuk kebutuhan air rumah tangga. Diperkirakan sebanyak 40.000 KK memenuhi kebutuhan airnya dari Tahura R. Soerjo.

Tahura Raden Soerjo sendiri, kata Khofifah, adalah merupakan kawasan hutan konservasi yang tujuan utamanya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Wilayah Taman Hutan Raya ini secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan

dan Kota Batu.

"Penilaian efektifitas pengelolaan Tahura ini diperlukan sebagai umpan balik untuk perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga dihasilkan pengelolaan kawasan yang efektif, efisien dan berkualitas," tuturnya.

Penilaian efektifitas tersebut dilakukan dengan melihat 6 aspek utama yaitu, Pemahaman akan konteks dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan parapihak yang terlibat

Kedua, perencanaan ter-

hadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan.

Ketiga, alokasi sumberdaya (input), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan.

Selain itu, keempat, kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (proses). Kelima, produk dan jasa (output) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan. Dan, keenam yaitu dampak atau outcome yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan bahwa capaian ini bukanlah akhir iktiar, mengingat masih pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Khususnya, kata dia, terkait aspek produk dan jasa yang dihasilkan agar dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemulihan fungsi kawasan sebagai perlindungan system penyangga kehidupan.

"Salah satu kebijakan strategis yang akan diambil dalam pengelolaan Tahura R. Soerjo adalah menjalin kemitraan konservasi dengan masyarakat desa penyangga. Tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelesaian keterlanjuran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan untuk usaha tani dan aktifitas pengambilan tumbuhan secara illegal," pungkasnya. ♦irm



ANIES SIAPKAN JAKARTA JADI PUSAT EKONOMI GLOBAL

Jakarta akan berperan sebagai pusat ekonomi bisnis skala global pasca pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan. Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam forum konsultasi publik penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026.

Anies mengungkapkan bahwa peran Jakarta sebagai pusat ekonomi bisnis global bakal berdampak pada beberapa aspek fundamental. Misalnya aspek administrasi, kewenangan, dan perekonomian.

"Karena periode 2023-2026 ini periode yang pendek, sehingga harus kita siapkan fondasi untuk Jakarta menjadi kota perekonomian global," kata Anies baru-baru ini.

Untuk itu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan ke depan agar rencana Jakarta sebagai kota perekonomian global terwujud. "Bukan hanya pusat ekonomi Indonesia tapi pusat ekonomi global," ucap dia.

Anies mengajak masyarakat berkolaborasi untuk bersama-sama membangun

kota. Dia tak merincikan kontribusi yang bisa dikerjakan warga.

Forum hari ini merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. Instruksi itu memuat soal tahapan dan tata cara penyusunan RPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam forum tersebut, Anies Baswedan juga menyinggung soal pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan agar mengubah Jakarta menjadi kota lebih berketahanan. Menurut dia, pemerintah DKI perlu merespons perubahan tersebut serta mempersiapkan desain pembangunan dan pengelolaan kota yang lebih berketahanan. ♦

JAKARTA TAK LAGI JADI KOTA TERMACEK DI DUNIA

Dalam rentang waktu kurang dari lima tahun, Jakarta berhasil keluar dari peringkat 10 besar sebagai kota termacet di dunia. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menjadi keynote speaker dalam acara U20 Jakarta E-Mobility secara virtual di YouTube Pemprov DKI Jakarta, baru-baru ini.

Anies mengungkapkan bahwa pada awal masa kepemimpinannya pada tahun 2017, DKI Jakarta sempat menempati peringkat empat kota termacet di dunia. Namun, berkat integrasi moda transportasi publik, saat ini sudah berhasil keluar dari daftar 10 kota termacet di dunia.

"Kami tidak suka di dalam 10 besar. Kami ingin keluar. Maka pada 2020, kami turun ke-31. Pada 2021, kami turun di 46. Bayangkan, dalam waktu 5 tahun kami turun dari posisi keempat kota termacet di dunia. Sekarang, kami di posisi 46 di dunia," kata Anies.

Tak hanya itu, Anies juga turut mengapresiasi masyarakat yang sudah menggunakan transportasi publik guna menekan kemacetan di Ibu Kota. "Ini bukan hanya karena pekerjaan kami di pemerintahan tapi juga karena masyarakat," ungkapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menerangkan, integrasi antar moda transportasi yang di jalan telah berhasil mengatasi penggunaan kendaraan pribadi. Adapun integrasi yang dimaksud Anies ini mencakup angkutan masal berbasis rel, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodetabek.

Pemerintah DKI, lanjutnya, juga tengah menggencarkan sistem integrasi transportasi publik bernama Jak Lingko. "Alhamdulillah, saat ini integrasi yang dilakukan rutanya sudah mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta," terangnya.

Cara lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan infrastruktur non-bermotor. Anies mencontohkan pembangunan 364 kilometer trotoar di Ibu Kota dan 63 pinjaman sepeda atau bike sharing di area transit. "Hal ini sangat membantu masyarakat, terutama di jalan-jalan sibuk," ujar Anies. ♦





UNTUK PENDIDIKAN AGAMA, GANJAR GELONTORKAN RP107,1 MILIAR

Menyadari pentingnya anak-anak diajarkan karakter dan moderasi, Gubernur Ganjar Pranowo memberikan dana hibah tahun 2022 untuk bidang pendidikan agama dalam jumlah yang wah. Hibah Rp107,1 miliar itu diperuntukkan bagi 2.201 lembaga pendidikan keagamaan, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di Jawa Tengah (Jateng).

Dana hibah bidang pendidikan keagamaan tersebut sudah dapat dicairkan setelah secara simbolis diserahkan Gubernur Ganjar Pranowo di Aula Gedung Monumen PKK, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Senin (21/2/2022).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ganjar mengatakan, "Dalam catatan kita ini angkanya lumayan, jadi yang tahun ini kira-kira Rp107,1 miliar, ini untuk 2.201 lembaga pendidikan keagamaan. Hari ini sudah mulai dicairkan (untuk tahap I), kurang lebih Rp22,1 miliar untuk 405 lembaga pendidikan keagamaan."

Ganjar Ganjar menjelaskan, bantuan atau hibah ini diberikan untuk mendorong dan membantu pendidikan

keagamaan. Tujuannya dalam rangka membangun pendidikan yang lebih maju dan berkarakter.

"Tadi juga saya titipkan agar anak-anak diajarkan pendidikan karakter. Jadi agamanya bagus, terus kemudian pergaulan antaranak bagus," tandasnya.

Menurut Gubernur, karakter seperti itu akan menumbuhkan generasi penerus yang moderat. Jadi dengan ini maka cerita moderasi beragama bisa dimulai dari sekolah-sekolah ini, dan akan menjadi investasi yang baik untuk masa depan Indonesia. Apalagi Indonesia sangat beragam, dan satu hal yang penting yang diperlukan adalah rukun.

"Kalau mereka bisa bertemu dengan berbagai kelompok suku, agama,

ras, golongan dan tiap hari mereka bisa berkomunikasi dengan baik, maka menurut saya moderasi beragama menjadi investasi yang baik untuk masa depan," tambah Gubernur Ganjar.

Selain itu, Gubernur yang begitu dekat dengan warganya ini terus mendorong program pemberian insentif guru agama di Jateng. Program ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir dan akan terus dilakukan.

"Sama juga kita titipkan kepada seluruh guru agama, agama apa pun, agar yuk kita berikan kepada anak-anak kita pendidikan moderasi beragama, sehingga orang bergaul sehari-hari itu adanya senang dan menghormati," tandasnya.

♦ros

RELAWAN GANJAR MAKIN BANYAK DAN KIAN KREATIF

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih lama. Namun dari hari ke hari, jumlah relawan yang mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo jadi Presiden 2024 terus bertambah. Selain Relawan Sahabat Ganjar, telah dideklarasikan pula Ganjar Milenial Center (GMC).

Di samping jumlah relawan Ganjar makin banyak, dan mereka makin kreatif dalam menyosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Kreativitas mereka setidaknya terlihat saat pembagian sembilan bahan pokok (sembako) oleh GMC. Pun oleh Relawan Sahabat Ganjar yang dalam pembagian sembako menggunakan aplikasi.

Pada Sabtu (26/2/2022), GMC Jawa Tengah menggelar deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan Ganjar calon presiden 2024 diikuti sekitar 30 orang. Mereka kompak mengenakan kaos putih bergambar Ganjar Pranowo.

"Alasan kenapa kita ke Pak Ganjar itu dibuktikan dengan beberapa prestasi yang bisa memajukan Jawa Tengah," kata Koordinator Wilayah GMC Jateng Aris Lukmana Putra di Bendung Tirtonadi Solo, Jawa Tengah.

, Sabtu (26/2/2022). Selain bisa memajukan Jateng, lanjut Aris, Ganjar merupakan sosok pemimpin daerah yang memiliki gagasan yang inovatif, kreatif dan dekat dengan anak muda milenial.

"Kami berdiskusi persoalan di 2024 yang memutuskan bahwa Pak Ganjar salah satu orang yang pantas untuk memimpin dan menahkodai Indonesia ke depan," ujar dia.

GMC Jateng dibentuk tahun 2022 di Solo, dan anggotanya tersebar di 15 provinsi di Indonesia. GMC Jateng tidak berafiliasi dengan partai politik, dan pembentukannya berawal dari kekaguman kepada Ganjar.

"Organisasi ini lahir secara organik jadi kami tidak ada afiliasi dengan partai manapun. Selain itu, teman-teman juga kagum dengan Pak Ganjar sehingga membentuk satu komunitas yang mencintai Pak Ganjar dan menamai dengan Ganjar Milenial Center," ungkap Aris di sela-sela pembagian sembako.

Seorang penarik beca yang menerima paket sembako dari GMC, Sutrisno (65)

mengaku sangat senang. Ia menilai, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang baik. Dirinya sangat mendukung Ganjar maju Pilpres 2024.

"Pak Ganjar bagus seperti Pak Jokowi," kata Sutrisno.

Sementara itu pada Ahad (27/2/2022), Relawan Sahabat Ganjar membagikan sembako kepada masyarakat di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, Jawa Tengah. Hebatnya pembagian sembako ini tidak menimbulkan kerumunan.

Bagaimana bisa pembagian sembako tak ada kerumunan? Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sahabat Gan-

ngi adalah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, Jawa Tengah.

"Harapannya dengan kami turun langsung bisa mengenalkan Pak Ganjar kepada masyarakat. Ternyata banyak masyarakat yang secara sukarela meminta ikut bergabung ke Sahabat Ganjar," kata Maryoko.

Usai membagikan sembako, relawan Sahabat Ganjar juga menggelar aksi laris modalin kepada para pelaku UMKM. Para relawan Sahabat Ganjar membeli dagangan pelaku UMKM lalu membagikannya kepada masyarakat sekitar.

Sebelumnya, Koordinator Wilayah



jar Kabupaten Brebes Maryoko dalam keterangan tertulisnya hari ini, Minggu (27/2/2022), mengatakan bahwa Sahabat Ganjar memberikan sembako lewat aplikasi 'Sahabat Ganjar'.

Selain mencegah kerumunan, kata dia, pembagian menggunakan aplikasi ini dapat menertibkan pendataan agar tidak terjadi pengulangan penerimaan sembako.

"Selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk menambah dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo di masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang," kata Maryoko.

Di samping memberikan paket sembako melalui aplikasi, Sahabat Ganjar juga mendatangi warga secara door to door. Adapun wilayah yang didata-

(Korwil) Ganjar Milenial Center Jawa Tengah Aris Lukmana Putra menjelaskan sosok Ganjar hadir dari keresahan, khususnya di kalangan pemuda. Dia menilai Ganjar Pranowo, sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia di 2024.

"Dari diskusi warung kopi, kami menyimpulkan pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa ini adalah ayah Ganjar Pranowo," ujar Aris dalam siaran persnya, Sabtu (26/2) Aris menambahkan untuk mencapai perubahan dan kemajuan tentunya dibutuhkan seorang sosok yang mampu menjangkau semua kalangan.

Tak hanya itu, calon pemimpin juga harus inovatif dan mampu merangkul milenial agar bisa menjawab tantangan era globalisasi yang pesat. ♦ros



RIDWAN KAMIL JAJAL PELUANG INVESTASI DENGAN AMERIKA SERIKAT

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi, Jawa Barat tertinggi dalam realisasi investasi di seluruh Indonesia dengan angka Rp136,1 triliun. Namun, investasi dari Amerika Serikat masih belum menjadi yang pertama di Indonesia.

"Saya sampaikan kita (Jabar) investasi selalu juara satu dan berharap bisnis dari Amerika Serikat bisa datang lebih besar. Amerika belum masuk ke lima besar (investor)," ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate saat bertemu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yi Kim.

Pria yang kerap disapa Kang Emil menambahkan, sektor ekonomi masih akan menjadi fokus pada peluang kerja sama dengan Amerika Serikat.

Meskipun tidak menutup kemungkinan mendatang membahas peluang kerja sama di bidang lain seperti pendidikan dan kebudayaan.

"Fokus pada ekonomi menjadi prioritas dan alhamdulillah Jawa Barat dipilih sebagai tempat pertama dalam perbin-

cangan untuk peningkatan ekonomi dari Amerika Serikat," kata Kang Emil.

Ekonomi adalah pintu pertama dan Jabar tidak akan membatasi kerja sama. Setelah itu kerja sama di sektor lain seperti kebudayaan, pendidikan pun akan dijejaki.

Emil menjelaskan Jabar memiliki peluang untuk dilirik investor, seperti dalam bidang ekonomi hijau, digital ekonomi, pelayanan kesehatan dan energi terbarukan. Dubes AS juga sempat diajak Emil untuk melihat Jabar Digital Service.

"Melihat command center untuk menunjukkan Jabar full speed dalam transformasi digital," kata Emil.

Menurut Ridwan Kamil, kunjungan delegasi Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia adalah untuk membicarakan peluang peningkatan investasi

di Jabar. Pasalnya, potensi Jawa Barat untuk Amerika Serikat mengembangkan investasinya sangat besar.

"Dulu sebelum Covid -19 birokrat terbaik kita ada pertukaran program ke Amerika. Sau saya lobi untuk diadakan (kembali)," imbuh Kang Emil.

Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yi Kim mengatakan, kedatangannya ke Bandung adalah untuk membahas rencana peningkatan investasi Amerika Serikat di Jawa Barat. Hal ini juga sebagai upaya peningkatan hubungan diplomasi antar dua negara.

"Saya mendengar dari Pak Gubernur (Ridwan Kamil) rencana besar dan kuat terkait investasi bisnis Amerika Serikat. Saya menantikan untuk bisa bekerja sama dengan Jabar serta memastikan

kita bisa memaksimalkan kesempatan kerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat dan meningkatkan hubungan kedua negara (US-Indonesia)," kata Sung.

Ini adalah kunjungan pertama Kim sebagai Duta Besar yang baru menjabat. Kim mengaku terkesan dengan sosok Ridwan Kamil yang merupakan pemimpin muda yang menyenangkan.

Dengan ide-ide yang cemerlang dan mewakili kalangan muda, Kim percaya jika Ridwan Kamil memiliki masa depan yang cerah di Indonesia.

"Setelah bertemu dan menghabiskan waktu bersama, saya bisa mengerti kenapa dia termasuk sosok (pemimpin) yang populer di dunia perpolitikan Indonesia," katanya.

"Dia masih sangat muda, jadi saya rasa dia punya masa depan yang cerah," tutup Kim.

Sebelumnya, Kang Emil optimis 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan menargetkan, untuk tingkat kunjungan ke Jabar mencapai 40 jutaan wisatawan.

"Semoga sumbangan pariwisata Jawa Barat di tahun 2022 bisa meningkat. Target kita antara 36 juta sampai 40 juta wisatawan. Mudah-mudahan terus meningkat, sehingga sampai ke level yang dulu pernah di puncak kejayaan tahun 2018, sekitar 60 jutaan," imbuhnya.

Ada beberapa indikator yang membuat dirinya optimis sektor pariwisata bisa bangkit dan meraup banyak wisatawan. Pertama, jika pandemi Covid-19 akibat Omicron segera melandai.

Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi Jabar kini sudah mulai kembali "rebound". Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jabar tumbuh sebesar 3,74 persen atau membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi 2,52 persen (year on year/yoy).

"Ekonomi kita sudah tumbuh di atas tiga persen. insyaallah, varian Omicron terkendali, dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Rate/BOR) tidak terlalu tinggi per harinya, hanya 20 persen," tuturnya.

Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk sama-sama memajukan pariwisata Jabar. Misalnya, dari sisi masyarakat umum, Ridwan Kamil mengajak untuk kembali berwisata ke Jawa Barat.

Namun Gubernur juga mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker

hingga menjaga jarak. Pasalnya, saat ini situasi pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum berakhir sepenuhnya.

Sedangkan bagi pengelola tempat wisata, Gubernur berpesan agar konsisten dalam penerapan kedisiplinan prokes. Contohnya adalah dalam penerapan aplikasi Peduli Lindungi yang perlu dimaksimalkan kembali.

yang sudah aman. Dengan begitu kita bisa move on dan produktif membangun pariwisata Jawa Barat," jelasnya.

Gubernur juga menyinggung, dari sisi pemerintah, Pemda Provinsi Jabar akan kembali membangun beberapa infrastruktur sebagai penunjang pariwisata. Tak hanya itu, ada beberapa acara juga yang akan dilaksanakan untuk me-



"Tolong semangat kawan-kawan, silahkan berwisata, tapi tetap disiplin protokol kesehatan bagi wisatawan. Untuk pengelola wisata, tolong (penerapan) Peduli Lindungi dimaksimalkan, sehingga bisa memilah mana pengunjung yang memiliki potensi Covid-19, dan mana

narik wisatawan ke Jabar.

"Kita ingin memulihkan, mengembangkan, dan membangun fasilitas pariwisata dan event karena Jabar mempunyai kapasitas untuk menjadi provinsi terbaik dari ekonomi pariwisata," ujarnya.

[irm] ♦ irm



SUMBAR DIGUNCANG GEMPA, GUBERNUR MAHYELDI LANGSUNG SELAMATKAN WARGA

Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Jumat pagi (25/2/2022) lalu. Dari peristiwa itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 410 rumah mengalami kerusakan.

Rinciannya, 100 rumah mengalami rusak berat, 300 rumah rusak sedang, dan 10 rumah rusak ringan. Selain rumah, dilaporkan juga satu masjid, satu sekolah, satu bank, satu balairung, dan satu aula kantor bupati.

Gempa di Pasaman Barat terjadi pada pukul 08.39 WIB. BMKG menyatakan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,14° LU ; 99,94° BT atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 12 km Timur Laut wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat pada kedalaman 10 km.

Gempa utama berkekuatan magnitudo 6,2 ini sebelumnya didahului satu kali kejadian gempa pendahuluan dengan magnitudo 5,2. Hingga pukul 10.06 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi 15 aktivitas gempa bumi susulan den-

gan magnitudo terbesar 4,2.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi langsung menginstruksikan OPD terkait melakukan pendataan, koordinasi serta pengiriman bantuan dan logistik ke beberapa daerah yang terdampak parah, yakni di Malampah, Kajai dan Talu.

"Ada pelayanan kesehatan, sarana ibadah dan sekolah serta banyak rumah penduduk yang rusak. Sambungan komunikasi dan listrik terputus, Tapi sudah kita koordinasikan dan Alhamdulillah BPBD, Dinas Sosial bersama TNI Polri di daerah segera menuju ke lokasi," kata gubernur," disela koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Ruang Zoom Meeting Istana Kompleks Gubernur Sumbar.

"Yang penting penyelamatan

masyarakat ke tempat yang lebih aman dan kondusif sehingga jika ada gempa susulan bisa meminimalisir korban. Maka dari itu, tadi yang pertama diingatkan masyarakat agar bisa mencari daerah teraman terlebih dahulu. Selanjutnya dirikan tenda dan dapur umum, dan menenangkan warga supaya tidak panik," sambung gubernur.

Mahyeldi juga langsung meninjau kondisi para pengungsi. Didampingi Wakil Bupati Pasbar Risnawanto, Sekda Pasbar Hendra Putra, Kepala BPBD Provinsi, Jumaidi berusaha menenangkan para pengungsi yang ada di beberapa titik.

Di halaman kantor Bupati Pasbar, gubernur melihat langsung kondisi warga yang sebagian besar berasal dari Jorong Simpang Timbo Abu, Kecamatan Talamau,

Pasaman Barat.

Sedikitnya 300 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal di jorong ini. Rumah warga rata dengan tanah dan menelan korban jiwa.

"Rumah kami ndak ada lagi pak, rata dengan tanah semuanya. Tolong lah pak, jemput keluarga kami disana. Gempanya ndak henti-henti, setiap menit ada pak," ujar Saparudin (50) salah seorang warga kepada Gubernur.

Selanjutnya gubernur juga melihat kondisi korban yang ada di RS. Yarsi Pasbar. Di rumah sakit ini terdapat 26 korban gempa dengan luka ringan hingga berat. Rata-rata pasien menderita cedera kepala dan fraktur. 1 orang pasien dengan cedera kepala berat dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang.

Satu persatu korban yang berjejer di teras dan halaman rumah sakit ini diberi semangat oleh Buya Mahyeldi untuk tetap tabah.

"Yang kuat dan sabar ya buk. Inshaallah disini dokter dan perawat sudah siap. Jangan pikirkan masalah biayanya, itu sudah ada yang mengurus. Yang penting sekarang berobat dulu," ujar Buya pada Asni (41) yang mengalami patah kaki.

Gubernur dan rombongan kemudian beranjak ke Kajai dimana masyarakat disini masih dalam proses evakuasi oleh petugas gabungan dan relawan.

"Pertama kita menyelamatkan korban yang luka-luka di rumah sakit terdekat dan dibantu oleh tenaga Puskesmas. Lalu, kepada warga yang kehilangan tempat tinggal kita siapkan tenda di halaman kantor bupati dan juga ada di Tigo Nagari dan juga rumah singgah Dinas Sosial," ujar Buya Mahyeldi.

"Kedua bantuan makanan kita siapkan dan kita dirikan dapur umum, sekarang sudah ada dua dapur umum. Jadi yang penting masyarakat berada di tempat yang aman dulu," lanjut Buya.

Secara keseluruhan data korban yang dirawat di Pasaman Barat, berjumlah 67 orang yang tersebar di RS. Yarsi 26 orang, RSUD Pasbar 15 orang, Puskesmas Talu 18 orang dan di Lapangan MTQ Padang Tujuh 8 orang.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Camat Malampah, di Malampah ada 4 korban jiwa dan 1.000 lebih orang berada di pengungsian.

Kepala BNPB Suharyanto, didampingi Wakil Gubernur Sumbar, Audy Jinaldy menyampaikan tiga hal prioritas yang menjadi fokus utama dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tim gabungan yang terdiri dari BNPB, SAR, Kementerian Sosial, TNI Polri, Pemprov Sumbar serta Kabupaten Pasbar dan Pasaman, menyusul tanggap darurat bencana yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dikomandoi Kepala BNPB, langsung dari Kantor Bupati Pasaman Barat, ia menerangkan prioritas utama tanggap bencana adalah pencarian korban yang masih

nargetkan pendataan kerusakan harus diselesaikan dalam 14 hari masa tanggap darurat. Audy menekankan betul hal ini karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar persiapan dan pendanaan bantuan bagi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan.

"Untuk bantuan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa sudah kita dudukan. Bantuan bagi rumah yang mengalami rusak berat kewenangannya



dinyatakan hilang, pemenuhan kebutuhan pengungsi dan perbaikan rumah warga yang terdampak gempa. Disampaikan Suharyanto, hal tersebut merupakan pesan yang ia bawa dari Presiden Jokowi.

"Barusan Saya ditelpon Pak Jokowi, menanyakan kondisi di Pasaman. Pesan beliau utamakan pencarian korban hilang, dan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Beliau juga menanyakan bagaimana kondisi rumah-rumah warga di Pasaman paska gempa," ujar Suharyanto.

Sementara khusus untuk kerusakan rumah warga, Wagub Audy Jinaldy me-

nanti di pemerintah pusat, rusak sedang di provinsi, dan rusak ringan akan diberikan bantuan oleh pemerintah kabupaten," terang Audy.

"Oleh sebab itu, inventarisasi kerusakan rumah kita segerakan, supaya pembagian kewenangannya jelas, dan masyarakat cepat mendapat bantuan," ia melanjutkan.

Menindaklanjuti ketiga prioritas tersebut, tim gabungan telah membentuk satgas dan komando posko, guna bergerak cepat mengkoordinir pencarian korban, pendataan kerusakan, hingga distribusi bantuan.

♦irm



HNW TOLAK BPJS KESEHATAN JADI SYARAT UMRAH DAN HAJI

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak pemberlakuan syarat administratif baru bagi para calon jemaah haji dan umrah khusus. Diketahui, Presiden RI Jokowi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mensyaratkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan bagi para calon jemaah tersebut.

Menurut HNW, syarat kepemilikan kartu BPJS Kesehatan aktif ini tidaklah relevan dan akan memberatkan calon jemaah umrah dan haji khusus yang sudah tertunda keberangkatannya selama pandemi COVID-19. Ia pun menilai hal ini dapat menimbulkan inefisiensi bagi para calon jemaah yang pada umumnya telah memiliki kartu asuransi jaminan kesehatan pribadi.

"Prinsipnya kami mendukung suksesnya program BPJS, karena memang bermanfaat untuk warga. Tapi dia harus berlaku secara elegan, program yang prinsipnya sukarela itu mestinya tidak diwajibkan untuk hal-hal yang tidak relevan, seperti bagi para calon jemaah haji khusus dan umrah, penyelenggara perjalanan Haji dan Umrah, serta pendidik dan

peserta didik di lingkungan Kementerian Agama," ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (22/2).

Ia menilai penambahan aturan ini malah menambah masalah besar yang sebelumnya dikeluhkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Menurutnya, hal ini juga tidak sesuai dengan janji Presiden Jokowi untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi.

"Untuk mensukseskan BPJS Kesehatan dengan semangat gotong royong, Presiden seharusnya lebih fokus dan rinci membuat Inpres untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan dan layanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas rujukan BPJS Kesehatan. Bukan malah membuat aturan tambahan yang justru menambah beban kepada birokrasi juga kepada kelompok masyarakat yang tak langsung terkait. Seperti para jemaah um-

rah dan haji khusus, yang umumnya sudah punya kartu asuransi mandiri di luar BPJS Kesehatan," sambungnya.

Untuk diketahui, dalam Inpres 1/2022 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 Januari 2022 terdapat tiga kelompok yang diinstruksikan oleh Presiden bagi Menteri Agama untuk memiliki kepesertaan BPJS aktif. Kelompok ini terdiri dari pelaku usaha dan pekerja pada PPIU dan PPIH, calon jemaah umrah dan jemaah haji khusus, serta peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Kemenag.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menilai ketentuan tersebut menambah beban yang tidak relevan. Pasalnya, syarat untuk mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan harus membayar premi bulanan.

Menurutnya, hal ini justru memberi bi-



aya tambahan bagi calon jemaah, selain juga merugikan bagi mereka yang umumnya telah memiliki asuransi kesehatan pribadi di luar BPJS Kesehatan.

Ia mencontohkan jika satu keluarga berisi 4 orang hendak umrah, maka harus ada biaya sekitar Rp 600.000 yang harus dikeluarkan untuk mendaftar BPJS kelas I. Belum lagi jika keberangkatan umrah ditunda karena peningkatan kasus COVID-19, maka biaya premi tersebut harus dibayar tiap bulannya agar kepesertaan mereka tetap aktif.

"Padahal mungkin sebagian mereka tidak akan menggunakan layanannya karena sudah memiliki asuransi lain. Boleh saja mereka

diimbau
untuk
sedekah/
hibah
membantu
BPJS
Kesehatan,
tapi
men-

jadikannya sebagai persyaratan wajib, selain tidak rasional juga bisa berdampak kepada pelanggaran terhadap hukum Agama," ungkapnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan calon jemaah umrah/haji khusus semestinya dimudahkan. Bukan malah diwajibkan melakukan sesuatu yang tidak relevan dan tidak wajib yang kalau ditolak bisa jadi mengganggu keberangkatan mereka ke tanah suci.

Terkait hal ini, ia pun mengingatkan pemerintah agar tak mewajibkan apalagi menjadikan aturan baru dalam Inpres tersebut sebagai sumber pendanaan bagi BPJS. Hidayat mengungkap dari

kewajiban kepesertaan jemaah umrah dan haji khusus dalam kondisi sebelum pandemi COVID-19 saja, setiap tahunnya ada 1 jutaan jemaah umrah dan 17 ribuan jemaah haji khusus yang jika ditotal bisa diperoleh nilai setoran mencapai Rp 1,83 Triliun per tahun.

HNW pun meminta pihak Kemenag untuk cermat bila akan menindaklanjuti aturan tersebut dengan melihat situasi penyelenggara dan calon jemaah haji dan umrah. Menurutnya, sikap dari Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) yang meminta agar tidak ada aturan tambahan yang menyulitkan para jemaah pun harus dipertimbangkan.

Kendati Inpres terkait aturan BPJS ini sudah keluar, HNW menyebut hal ini belum menjadi bahasan dalam rapat terakhir Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag.

"Ada baiknya Menteri Agama bersama Dirjen PHU membahasnya bersama Komisi VIII DPR-RI, sehingga bisa dicari solusi terbaik yang menyuksekan BPJS, tapi tidak memberatkan bagi para jemaah haji dan umrah. Misalnya, dengan menyampaikan agar soal kepesertaan aktif kartu BPJS kesehatan untuk Kemenag hanya merupakan imbauan, dan sama sekali bukan aturan tambahan apalagi syarat untuk calon jemaah haji khusus dan jemaah umrah," pungkasnya. ♦tyo





BPJS KESEHATAN JADI SYARAT MACAM-MACAM

► Puan: Perbaiki Dulu Layanannya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta layanan BPJS Kesehatan diperbaiki sebelum dijadikan syarat sejumlah pelayanan publik. Hal ini merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Diketahui, Inpres tersebut mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk calon jemaah haji dan umrah, permohonan SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Selain itu juga untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bahkan untuk jual beli tanah hingga permohonan perizinan berusaha.

"Perbaiki layanan BPJS Kesehatan adalah keharusan agar masyarakat bisa menerima ketentuan baru ini," kata Puan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (25/2).

Puan mengatakan, banyaknya penolakan dari masyarakat terkait aturan tersebut akibat masih kurang optimalnya layanan BPJS Kesehatan.

"Kalau layanan BPJS semakin baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas,

polemik terkait BPJS Kesehatan sebagai syarat pasti lambat laun akan mereda," kata Puan.

Puan mengaku, DPR RI kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Misalnya, repotnya birokrasi untuk bisa menerima manfaat layanan. Diantaranya mengenai lama dan berbelitnya sistem bagi pasien yang hendak mendapat surat rujukan ke rumah sakit.

Banyak juga pengaduan mengenai diskriminasi kepada peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan pihak rumah sakit. Tak sedikit pasien yang mengeluhkan sulitnya mencari ruang perawatan di rumah sakit hingga diminta membeli obat yang masuk dalam paket BPJS Kesehatan.

"Perbaiki layanan BPJS Kesehatan ini menjadi pekerjaan rumah serius melihat sejumlah kasus-kasus yang semestini-

ya tidak dialami masyarakat selama ini," tegas Puan.

"Sistem ini yang harus dibenahi. Ketika pelayanan BPJS Kesehatan sudah sangat baik, itu akan berdampak kepada tingkat kepercayaan publik. Niscaya masyarakat berbondong-bondong bersedia menjadi peserta BPJS," imbuhnya.

Lebih lanjut, Puan meminta agar ada peningkatan sosialisasi mengenai aturan kewajiban kepesertaan BPJS sebagai syarat layanan publik, sehingga masyarakat bisa lebih memahami tujuan dibuatnya aturan tersebut.

"Gencarkan sosialisasi terhadap aturan ini kepada masyarakat. Dengan pemahaman dan edukasi yang baik terhadap pentingnya jaminan kesehatan, saya yakin masyarakat akan menerima regulasi ini dengan lebih baik," pungkasnya. ♦tyo

BPJS KESEHATAN JADI SYARAT WAJIB URUS PELAYANAN PUBLIK

► Faldi Zon: Kebijakan Gegabah

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional seharusnya tidak mengikat bagi seluruh masyarakat.

Pasalnya, Inpres yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari tersebut menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib dalam mengurus sejumlah pelayanan publik, mulai dari pembuatan SIM dan SKCK, pengurusan STNK, izin usaha, jual beli tanah, naik haji, umrah, hingga keimigrasian.

Inpres tersebut ditujukan ke beberapa kementerian, kepolisian hingga kepala daerah tingkat I dan II secara vertikal, termasuk yang menjadi mitra Komisi I DPR RI seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Menurut saya, Inpres tersebut memang disusun sangat gegabah, karena mengabaikan banyak sekali aspek, mulai dari soal filosofi, keadilan, kepastian, serta prinsip pelayanan publik itu sendiri," jelas Fadli dalam keterangan tertulis, Minggu (27/2).

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini memiliki beberapa catatan mengenai Inpres yang dinilai kurang patut tersebut. Pertama, pelayanan kesehatan serta layanan publik lainnya, terutama yang bersifat dasar, pada prinsipnya adalah hak rakyat, yang seharusnya dilindungi oleh negara. Sehingga, tambah Fadli, negara tak boleh memposisikan hak tadi seolah-olah adalah kewajiban.

"Apalagi, hak rakyat dalam satu bidang kehidupan, dalam hal ini kesehatan, kemudian hendak dijadikan penghalang bagi hak dalam bidang kehidupan lainnya. Dari sudut filosofi pelayanan publik, ini jelas keliru," jelas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

Kedua, dari sisi tata peraturan perundang-undangan, Inpres itu kedudukannya tak bisa mengikat umum (semua orang, atau setiap orang). Kedudukan Inpres hanya bersifat mengikat ke dalam para pejabat pemerintah di bawah Presiden. Selain itu, Inpres juga seharusnya tidak memasuk-

kan muatan yang bersifat pengaturan di dalamnya dan sedapat mungkin tidak menimbulkan efek pengaturan terhadap masyarakat, karena Presiden telah diberi kewenangan lain untuk menetapkan peraturan, yaitu berupa Peraturan Presiden.

"Dengan demikian, Inpres bukanlah bagian dari peraturan perundangan atau peraturan kebijakan. Sehingga, jika Inpres Nomor 1 Tahun 2022 kemudian diterjemahkan menjadi peraturan-peraturan baru terkait BPJS, maka hal itu bukan hanya menyalahi prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan, tapi bahkan bisa melangkahi kewenangan sebuah undang-undang," tambahnya.

Fadli menambahkan syarat administratif orang membuat SIM, misalnya, sudah diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Syaratnya hanyalah KTP, mengisi formulir permohonan, serta rumus sidik jari. "Sehingga, menjadikan BPJS sebagai syarat

baru, hanya dengan bekal Inpres, tak cukup punya dasar," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini.

Ketiga, meskipun UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan semua orang mendaftarkan diri dalam kepesertaan BPJS, mestinya pemerintah menyelidiki terlebih dahulu kenapa orang tak mendaftar. Kendala sosiologis dan strukturalnya mestinya dipahami dan dibenahi terlebih dahulu.

"Inpres Nomor 1 Tahun 2022 jangan menjadi alat pemaksaan BPJS. Tugas pemerintah mencari tahu atau memahami kendala yang dihadapi masyarakat mengapa tak daftar BPJS. Jangan sampai masyarakat jadi kian antipati terhadap BPJS," tegas legislator dapil Jawa Barat V tersebut. Keempat, Inpres tersebut sangat tak adil bagi masyarakat. Di satu sisi masyarakat mau dipaksa menjadi peserta BPJS, namun sistem dan manfaat pelayanan BPJS sendiri masih kerap berubah-ubah. ♦tyo





Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin

SULTAN: ATURAN SYARAT BPJS BERLEBIHAN DAN HAMBAT PROSES PEMULIHAN EKONOMI

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak memiliki urgensi dan terkesan sangat berlebihan untuk diterapkan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat.

"Kita tentu menghargai dan menghormati upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna kartu JKN atau BPJS. Semua warga negara memang disarankan untuk berstatus sebagai pengguna asuransi BPJS", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (21/02).

Menurutnya, BPJS telah terbukti menjadi instrumen asuransi kesehatan yang berdampak signifikan secara luas. Meskipun masih terdapat banyak hal yang harus dievaluasi.

"Tapi, tidak perlu rasanya melaksanakan kehendak pemerintah kepada

masyarakat dengan cara-cara yang tidak rasional. Tidak ada urgensinya", tegas Sultan.

Karena menurut informasi yang kami dapatkan, Per 17 September 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 226,3 juta peserta atau sekitar 83,5% dari total jumlah penduduk Indonesia. Tidak demokratis memaksakan keinginan negara yang sifatnya parsipatory kepada masyarakat.

Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengingatkan bahwa aturan wajib BPJS tersebut berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Setidaknya, hal ini menjadikan urusan birokrasi menjadi semakin rumit.

"Sangat kontradiktif dengan semangat debirokratisasi UU Cipta Kerja. Entah apa motifnya, sebaiknya pemerintah tidak menghambat proses pelayanan publik dengan modus wajib BPJS ini", tutupnya.

Diketahui, terdapat instruksi presiden yang mewajibkan bahwa, Warga yang ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, melaksanakan ibadah Haji atau Umrah, bahkan jual beli tanah harus memiliki kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat.

Hal tersebut tertera dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ♦tyo

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual-Beli Tanah dan Naik Haji-Umrah LANYALLA: INI BENTUK PEMAKSAAN NEGARA

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengkritik keras kebijakan kartu peserta BPJS Kesehatan yang menjadi syarat transaksi jual beli tanah, pembuatan SIM, STNK dan juga syarat naik haji dan umroh. Kabarnya syarat itu akan diberlakukan mulai 1 Maret 2022.

LaNyalla meminta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan hak asasi warga negara.

"Kebijakan tersebut tidak rasional dan merupakan bentuk pemaksaan dari negara. Dan berulang kali saya sampaikan, pemerintah jangan sering membuat kebijakan yang kontroversial di tengah masa sulit rakyat akibat dampak pandemi," kata LaNyalla, Senin (21/2/2022).

Dijelaskannya, jika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat maka setiap orang harus mendaftar BPJS dan dikenakan iuran. Hal ini sangat tidak logis karena ada sebagian orang tidak mendaftar kepesertaan BPJS.

"Sebagian orang ketika sakit membayar sendiri pelayanan jasa kesehatan yang dibutuhkannya. Selain itu banyak kelompok masyarakat yang berkeberatan karena sedang tidak mampu bayar BPJS akibat terkena PHK, usahanya bangkrut dan masalah lainnya," paparnya.

Oleh karena itu, jika pemerintah memaksakan iuran BPJS bagi seluruh warga yang memerlukan SIM, STNK dan pengajuan lainnya, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah.

"Optimalisasi program JKN jangan sampai memaksa rakyat yang lagi dalam keadaan sulit. Kebijakan itu harus memudahkan urusan masyarakat bukan menjadi lebih rumit. Memaksa rakyat itu tidak beda dengan otoriter, seharusnya tidak boleh dilakukan di negara demokrasi kita ini," tegas LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur.

Di sisi lain, Ketua DPD RI menilai seharusnya optimalisasi BPJS Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan dan pelayanannya.

"Artinya kalau masyarakat paham pengelolaan dan puas dengan pelayanannya, saya kira akan tertarik dengan sendirinya untuk aktif sebagai peserta BPJS. Bukan dengan memaksakan BPJS Kesehatan sebagai syarat ini dan itu," tu-

kasnya.

Diketahui, salam surat Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022, Kementerian ATR/BPN mewajibkan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli

Dikutip dari surat tersebut, aturan baru ini diberlakukan sebagai bagian dari optimalisasi pelaksanaan program Jaminan

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Dengan demikian, seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

2. Berdasarkan diktum KEDUA an-



Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Kesehatan Nasional (JKN).

Sedikitnya, ada tiga hal yang disampaikan untuk diimplementasikan di lapangan:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk

gka 17 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan. ♦tyo



PENTINGNYA VAKSIN BOOSTER UNTUK LANSIA

Dengan adanya varian Omicron, pemerintah terus mempercepat pemberian vaksin booster kepada para lansia. Pemberian vaksin penguat diharapkan bisa menambah imun tubuh.

Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 penguat atau dosis ketiga dapat meningkatkan perlindungan terhadap kelompok lansia khususnya yang memiliki komorbid.

"Bagi kelompok lansia khususnya yang memiliki komorbid agar segera mendapatkan vaksinasi penguat," kata Yudhi.

Menurut pengajar di Fakultas Kedokteran Unsoed tersebut program vaksinasi Covid-19 bagi lansia harus terus digencarkan guna mempercepat target kekebalan kelompok.

"Vaksinasi hingga dosis ketiga sangat diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan kasus kematian akibat Covid-19 mengingat kelompok lansia khususnya

mereka yang memiliki komorbid termasuk kelompok yang rentan bila terinfeksi Covid-19," katanya.

Selain melakukan vaksinasi, kata dia, kelompok lansia dan mereka yang memiliki komorbid juga harus memperkuat disiplin penerapan protokol kesehatan.

"Jika perlu menggunakan masker yang memiliki daya saring yang tinggi atau memiliki tingkat perlindungan yang baik, yang perlu diperhatikan adalah harus memakai masker dengan cara yang baik dan benar," katanya.

Selain itu ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah memanfaatkan program posyandu lansia di tiap desa/kelurahan untuk mempercepat laju vaksinasi bagi lansia.

"Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan program Prolanis atau Pro-

gram Pengelolaan Penyakit Kronis dan Posbindu atau Pos Binaan Terpadu untuk mendorong percepatan vaksinasi bagi lansia," katanya.

Dia menambahkan bahwa sosialisasi secara masif harus terus digencarkan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya para lansia dan mereka yang memiliki komorbid.

"Selain itu pemerintah daerah juga perlu memperkuat gerakan Jogo Tonggo atau saling menjaga tetangga secara bersama-sama selama pandemi COVID-19 sesuai dengan program yang digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," katanya.

Dia menjelaskan gerakan saling menjaga tetangga yang dimaksud adalah dengan mengedepankan kearifan lokal dapat dilakukan dengan saling bergotong-royong dan berempati.

"Contohnya adalah jika ada tetangga yang ternyata positif tolong dibantu keluarganya, jangan dikucilkan, selain itu bagi mereka yang abai protokol kesehatan juga diingatkan antarsesama tetangga," katanya.

Pasalnya, semangat gotong royong diperlukan agar masyarakat bisa bersama-sama mengatasi dampak Covid-19.

"Perlu gerakan bersama dalam mengatasi dampak Covid-19 agar cepat selesai karena jika tidak ada gotong royong, maka akan sulit, inilah peran penting meningkatkan simpati dan empati antartetangga," katanya.

Wajib Ulang Vaksin I Lagi

Jangan lengah dan abai. Harus diingat bahwa masa untuk mendapatkan Vaksin Covid-19 Dosis II maksimal 6 bulan setelah Vaksinasi Dosis I. Bila sudah melewati waktu 6 bulan, walau sehari saja, maka Vaksinasi Dosis I harus diulang lagi karena itu masuk kategori Drop Out.

Demikian terungkap dari penjelasan Juru Bicara Pemerintah untuk Program Vaksinasi COVID-19 dr Siti Nadia Tarmizi.

Penjelasan serupa disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, di mana ia mengatakan bahwa vaksinasi harus diulang atau drop out dari dosis pertama, karena terjadi penurunan efikasi dan dosis pertama vaksin belum terbentuk proteksi maksimal, bila dalam waktu 6 bulan setelah Dosis Pertama tidak ditindaklanjuti dengan Dosis II.

Dikatakannya, data Kementerian Kesehatan mencatat saat ini secara nasional ada 20 juta orang yang belum mendapatkan vaksin kedua.

Sebanyak 5 juta di antaranya di Jawa Barat dengan rentang waktu belum mendapatkan dosis kedua setelah divaksinasi pertama dengan rentang waktu 1-5 bulan.

"Dengan kondisi ini pemerintah berusaha melakukan tindakan cepat untuk segera melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dengan terbuka pada saran berbagai ahli termasuk dari ITAGI," katanya.

Upaya ini, dirangkum Pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.06/II/921 tahun 2022 tentang pemberian vaksinasi Covid-19.

Untuk itu, dimohon seluruh Kepala Dinas Kesehatan seluruh Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota untuk serius melakukan arahan pemerintah pusat.

Di antaranya, segera melakukan vaksin dosis kedua bagi sasaran yang mengalami drop out dalam waktu kurang atau sama dengan 6 bulan dengan platform yang menyesuaikan ketersediaan di masing-

Positif Covid-19, Kapan Bisa Vaksin Booster?

Penyintas Covid-19 atau orang yang sudah sembuh dari Covid-19 juga direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin booster

Berapa lama seseorang bisa vaksin booster setelah positif Covid-19?

Jeda waktu dibagi berdasarkan **gejala yang muncul saat terinfeksi Covid-19**

- 3** Penyintas Covid-19 gejala berat booster diberikan setelah 3 bulan sembuh
- 1** Penyintas Covid-19 gejala ringan/sedang booster diberikan setelah 1 bulan sembuh

Vaksinasi COVID-19 dosis booster dapat dilakukan secara *homolog* atau *heterolog*

Tetap diberikan dengan syarat yang bersangkutan sudah divaksin lengkap minimal 6 bulan sebelumnya

25-02-2022
PAPOI, Kompas.com, sumber lain

IndonesiaBaik.id | IndonesiaBaik.id | Riset Tuli N. Graha Chandra



masing daerah.

Melakukan pengulangan vaksinasi primer bagi sasaran yang mengalami drop out dalam waktu lebih dari enam bulan dan dapat menggunakan platform yang berbeda dari vaksin semula.

Lalu, untuk kedua upaya ini wajib memprioritaskan penggunaan platform jenis

vaksin dengan memperhatikan masa kadaluarsa serta stoknya khususnya jenis vaksin yang hanya diberikan pada populasi khusus karena jumlahnya terbatas.

"Untuk itu dimohon kepada masyarakat ikut berpartisipasi dan pihak media untuk membantu mengencakan program ini," kata dia. ♦



PALEMBANG JADI KOTA PERCONTOHAN GERAKAN ANGKUTAN UMUM

Kota Palembang ditunjuk menjadi kota pertama percontohan gerakan penggunaan transportasi umum di Indonesia dengan menjadi tuan rumah Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum (GNKUA). Gerakan nasional ini resmi di buka langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Budi Karya Sumadi.

Menteri Perhubungan, Budi Karya mengatakan, Kota Palembang dinilai mampu mengendalikan penggunaan transportasi umum yang terkoneksi baik darat, sungai dan udara.

Budi juga mengatakan akan menjadikan Palembang sebagai role model kota yang sukses menerapkan angkutan umum.

"Palembang menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki angkutan umum Light Rail Transit (LRT), Transmusi, angkutan kota serta angkutan sungai. Makanya kita lakukan GNKAU di sini," ujar Budi, usai melaunching GNKAU.

Ia menyampaikan, kegiatan ini mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum. Yang mana kota Palembang telah memiliki pengembangan angkutan umum berbasis jalan dan rel di

kawasan perkotaan.

"Kenapa kita lakukan di Palembang, karena Palembang memiliki angkutan massal yang lengkap," kata Menhub Budi Karya.

Upaya Kementerian Perhubungan menjadikan Palembang kota model penerapan transportasi umum juga didukung penuh oleh semua pihak, baik Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, ASN, pelajar hingga masyarakat umum.

Dalam kesempatan itu juga, Menhub Budi Karya juga meluncurkan kartu angkutan khusus mahasiswa dan pelajar seharga Rp 25 ribu untuk transportasi selama sebulan.

"Jadi kartu yang seharga Rp 25 ribu ini bisa digunakan untuk LRT, BRT (Transmusi) dan angkot selama sebulan," kata Budi.

Kartu berlangganan untuk pelajar dan

mahasiswa ini akan berkerja sama dengan bank daerah, dan akan mengeluarkan kartu sebanyak 5000 kartu secara bertahap.

"Edukasi naik LRT ke sekolah bagi pelajar maupun masyarakat umum, perbaikan fasilitas untuk pejalan kaki di stasiun stasiun LRT, penyediaan tas belanja untuk ibu ibu pengguna LRT dan menerbitkan aturan memperbolehkan penumpang LRT membawa sepeda lipat dan non lipat," Budi menerangkan.

Sementara itu terkait titik rute Transmusi, Wali Kota Palembang, H Harnojoyo mengungkapkan ada 17 titik yang beroperasi secara bertahap.

"Saat ini yang beroperasi ada dua rute yakni Bukit-Sematang Borang, Sematang Borang-Asrama Haji, dan sisanya dilaksanakan secara bertahap" ujar Harnojoyo.

Harnojoyo juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementerian Perhubungan, yang telah mempercayai Kota Palembang sebagai tuan rumah GNKAU.

"Kami siap terus berinovatif seperti yang disampaikan Menteri Perhubungan, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sarana angkutan umum bagi kehidupan masyarakat," ulasnya. ♦





REVITALISASI SUNGAI DI PALEMBANG DILAKSANAKAN BERTAHAP

Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi genangan air maupun banjir. Antara lain melalui program revitalisasi sungai. Akan tetapi, hal itu tidak bisa diwujudkan secara cepat.

Wali Kota Palembang, Harnojojo mengatakan, program revitalisasi sungai membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sebagai contoh, revitalisasi Sungai Sekanak Lambidaro diperkirakan menelan dana hingga Rp 400 miliar.

"Kita sudah mulai untuk Sungai Sekanak dan Lambidaro dahulu. Itu panjangnya sekitar 11 kilometer dan menelan dana sekitar 400 miliar rupiah, ya," kata

Harnojojo.

Ia menyebutkan, Palembang memiliki sebanyak 116 sungai yang tersebar di seluruh wilayah.

"Tantangan yang sangat besar apabila program revitalisasi sungai dicanangkan secara sekaligus. Sebab anggaran yang cukup besar harus disiapkan untuk program revitalisasi sungai tersebut," kata Harnojojo.

Maka dari itu, program revitalisasi sungai harus dilakukan secara bertahap dengan beberapa langkah.

Program revitalisasi sungai tersebut juga nantinya akan mengkoneksikan seluruh sungai yang ada. Sehingga bisa

mengembalikan fungsi dari sungai sebagai sarana transportasi ataupun pengendali banjir di Kota Palembang.

"Proyek puncaknya nanti kita koneksi seluruh sungai ini agar bisa menjaga banjir. Untuk yang pertama yakni Sungai Sekanak Lambidaro dan Sungai Bendung," demikian Harnojojo.

Proyek Sekanak Lambidaro Tahap Dua

Revitalisasi Sungai Sekanak Lambidaro yang dilaksanakan beberapa waktu lalu dinilai berhasil karena punya dampak luas. Untuk itu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII akan melanjutkan pengerjaan proyek Sekanak-Lambidaro

tahap dua.

"Kita akan lanjutkan ke fase kedua yakni sepanjang 1,3 km mulai dari jembatan PIM sampai ke DPRD Sumsel," kata Kepala BBWS Sumatera VIII, Maryadi Utama.

Ia mengatakan ruas jembatan PIM-DPRD ini akan dimulai pada awal April mendatang.

"Target selesai di tahun 2022 ini juga, dengan nilai sebesar Rp 98 miliar," Maryadi menyebutkan.

Untuk konsep, kata Maryadi, sama saja dengan ruas 26 ilir-PIM, dengan memperbaiki marka jalan, dinding turap dan lain sebagainya.

Menurut Maryadi, tujuan utama dari restorasi Sungai Sekanak-Lambidaro sepanjang 11 km, ini untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai pengendali banjir.

Maryadi menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang terkait kebersihan di destinasi wisata Sekanak Lambidaro, terutama usai pelaksanaan festival belum lama ini.

"Kita juga terus mengedukasi masyarakat bersama pemerintah setempat untuk mengajak masyarakat menjaga sungai ini," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang H Harnojoyo, mengatakan, usai festival, Sekanak Lambidaro tetap menjadi destinasi wisata baru dan potensial di Palembang.

"Kedatangan para wisatawan tentu akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi, salah satu syaratnya kita harus menjaga sungai tetap bersih, sehingga akan menjadi daya tarik wisatawan datang ke kota Palembang," ujar Harnojoyo.

Pemerintah Kota Palembang terus mengedukasi masyarakat untuk menjaga sungai antara lain dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan, Pemkot Palembang bersama kepolisian telah menggagas anak sungai musi dijadikan Kampung Tangguh Nusantara Musi.

"Kita jadikan Kampung Tangguh Nusantara Musi ini terbebas dari sampah," kata Harnojoyo.

Adapun kampung tangguh yang dijadikan proyek percontohan, lokasinya di Sungai Karangkuang, di Jalan Rasad Nawawi, Lorong Kebangsaan II, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga.

Harnojoyo optimistis dengan membentuk Kampung Tangguh dan menata anak sungai, lingkungan dan kesehatan masyarakat bakal lebih baik.

"Kita atur warga agar tidak buang

sampah ke sungai. Jadi, walaupun tidak membersihkan, tapi tidak mengotori sudah cukup," ujarnya.

Sementara itu, mengedukasi masyarakat menjaga lingkungan, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Mokhammad

etakkan di RT 08 dan di RT 09, lima kotak sampah drum potong warna merah diletakkan di RT 07, dan dua kotak sampah di letakan di pinggir sungai dan lainnya.

"Ini salah satu upaya kita menjaga kebersihan lingkungan. Yakni dengan



Ngajib, membagikan kotak sampah kepada warga di Jalan Rasad Nawawi, Lorong Kebangsaan II Sungai Karangkuang, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga.

Kotak sampah itu secara simbolis diberikan Kapolrestabes, melalui Wako Polsek IT Tiga, AKP Hary Dinar. Kotak sampah itu diberikan untuk mulai dari RT 06 hingga RT 09, dan beberapa tempat lainnya. Total ada 13 kotak sampah. Masing-masing satu kotak sampah besar dil-

membuang sampah pada tempatnya. Di tempat/kotak sampah. Jangan di aliran sungai, karena ini bisa berdampak buruk pada lingkungan," ujar AKP Hary Dinar.

Ia meminta warga untuk bahu membahu menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi di musim penghujan sekarang ini. Sampah yang menumpuk, terutama di aliran sungai maupun parit-parit warga, tentu akan membuat aliran air tersendat. Akibatnya air menggenang, dan banjir. ♦

BATASAN PATUH DAN TUNDUK

Rasulullah SAW bersabda: "Tunduk dan taat itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim dalam hal yang ia benci, selagi ia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh tunduk dan tidak boleh pula taat." (HR. Imam Bukhari dan Muslim melalui Imam Ibnu Umar RA).

Maksudnya, bahwa kewajiban patuh itu jika diajak melakukan kebaikan, namun jika diajak berbuat kedhaliman, maka tidak ada keharusan tunduk atau patuh terhadap siapapun, kecuali hanya taat terhadap aturan Allah Yang Maha Kuasa.

Mengapa ajakan berbuat kedhaliman itu tidak boleh ditaati?

Bahwa pelaku kedhaliman itu diancam oleh Allah dengan ancaman yang mengerikan, sebagaimana digambarkan dalam hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Qiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya adalah pemimpin yang dhalim" (HR. Tirmidzi).

Rasulullah SAW juga mendoakan kesu-



OLEH: LUTHFI BASHORI

Pengasuh Pondok Pesantren Ribath al-Murtadla al-Islami, Singosari, Malang

sahan dan kesukaran bagi siapa saja yang menindas umat Islam dengan kedhaliman: "Ya Allah, siapa saja yang mengemban tugas mengurus umatku kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia, dan siapa saja yang mengemban tugas mengurus umatku lantas ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah ia," demikianlah munajat Rasulullah SAW kepada Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dalam Alquran sendiri ditegaskan bahwa membantu kebaikan itu berpahala, sedangkan mendukung kedhaliman itu berdosa, sebagaimana firman Allah yang artinya:

"Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahalanya). Sedangkan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosanya). Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS An-Nisa': 85)

Dari sini dapat dipahami, bahwa tunduk dan taat serta mendukung terhadap kebaikan itu sangat dianjurkan dalam Islam, sedangkan patuh dan membantu kemunkaran itu termasuk dosa yang dilarang oleh syariat. ♦





PESAN NABI KETIKA MENDENGAR SUARA ANJING

Seperti diketahui, Allah SWT telah menciptakan beraneka bunyi-bunyian yang menjadi kunci dalam kehidupan yakni untuk komunikasi dan memberi Informasi. Terkait dengan bunyi-bunyi hewan tersebut, Nabi SAW pernah bersabda bahwa kita disunnahkan membaca doa dengan bacaan yang berbeda-beda ketika mendengar suara hewan yang berbeda pula.

Misalnya saja ketika mendengar ayam berkokok, kita disunnahkan untuk memohon karunia Allah SWT karena Nabi SAW mengatakan bahwa ayam berkokok karena melihat malaikat. Kita juga disunnahkan untuk berlindung kepada-Nya ketika mendengar anjing menggonggong atau keledai meringkik, karena Nabi Saw. mengatakan anjing dan keledai bersuara karena melihat setan.

“Jika kalian mendengar ringkikan keledai, makanya mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena sesungguhnya ia sedang melihat setan. Dan jika kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah keutamaan dari Allah Swt., karena ayam itu sedang melihat malaikat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Di dalam hadits lain, disunnahkan juga memohon perlindungan kepada Allah ketika mendengar anjing menggonggong. Haditsnya diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah dan terdapat di antaranya dalam Sunan Abi Dawud,

Artinya: “Jika kalian mendengar anjing melolong dan himar/keledai meringkik, maka bermohonlah perlindungan dari Allah Swt. Karena sesungguhnya dia melihat apa yang tidak kalian lihat.”

Para ilmuwan muslim ataupun bukan, mencoba merasionalisasi tema ini. Mereka yang sepakat – umumnya dari

kalangan muslim – mengatakan bahwa hadis ini benar jika dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern. Pada artikel limaadza yanhaaqu al-himaar, disebutkan bahwa anjing dan keledai benar dapat melihat hal-hal gaib seperti setan karena mereka memiliki kemampuan mendengar suara infrasonik dan gelombang cahaya di bawah warna merah.

Di sisi lain terkadang kita tidak terlalu memperhatikan atau menganggap biasa saja/sepele jika kita mendengarnya, akan tetapi syariat yang sempurna ini telah mengatur dan memberi petunjuk ketika kita mendengar suara-suara ini. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

‘Apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari, maka mintalah perlindungan (ta’awwudz) kepada Allah, karena mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat’. ♦



5 Pengusaha Kaya Tionghoa di Indonesia

PUTUSKAN JADI MUALAF

Hidayah bisa datang kapan saja, di mana saja dan juga bisa terjadi kepada siapa saja, tentu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan tak sedikit non-Muslim yang mendapatkan hidayah tersebut, hingga membuatnya tertarik dengan ajaran Islam, lalu mempelajarinya, yang pada akhirnya memutuskan memeluk agama Islam dan menjadi mualaf.

Dan kisah para Mualaf atau orang-orang yang memutuskan masuk agama Islam ini, sering mencuri perhatian. Kisah mereka yang terkadang sangat unik dan menarik, selalu menggugah dan mengundang rasa penasaran di benak masyarakat untuk mencaritahu, bagaimana seseorang tersebut bisa tertarik dan memutuskan untuk menjadi seorang Muslim.

Seperti dikatakan, bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah SWT. Tak hanya dari kalangan selebritis, Politikus, bahkan sejumlah kalangan pengusaha kaya di Indonesia pun, cukup banyak yang mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk menjadi seorang Mualaf.

Lalu bagaimana perjalanan atau kisah mereka menjadi seorang Muslim? Siapakah mereka?

Berikut 5 Pengusaha Kaya Indonesia yang Putuskan Menjadi Mualaf:

1. DJOHARI ZEIN

Pendiri ekspedisi JNE, Djohari Zein, mengungkapkan dahsyatnya sedekah. Pria berusia 66 tahun yang kerap disapa Pak Djo ini mengatakan, bahwa saat memutuskan memeluk agama Islam, itu karena ia hendak menikah dengan istrinya.

Pak Djo mengakui, bahwa faktor keterlibatan istrinya-lah sangat besar. Sang istri sangat mendukung Pak Djo dan juga menjadi 'teman bicara yang menyenangkan'.

Karena peran sang istri inilah, Pak Djo bisa fokus dalam bekerja, karena ia lebih suka menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, lantaran khawatir akan ada pekerjaan atau masalah baru.

Dan peran sang istri sangat membantu kehidupannya. Istrinya bisa menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga, seperti pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya. Karena itu, Pak Djo akhirnya bisa fokus dengan pekerjaan.

"Kita bisa melihat apa yang saya bangun, apa yang saya lakukan di JNE sampai hari ini, bisa dianggap sebagai perusahaan tuan rumah di negeri sendiri," kata Pak Djo di video YouTube bertajuk 'Kisah Nyata Bisnis Mualaf | Berkah Akibat Sedekah | Djohari Zein JNE' ini.

Keluarga Pak Djo merupakan kelompok pedagang Tionghoa yang menganut agama Buddha. Meski begitu, Pak Djo menempuh pendidikan di sekolah Katolik. Kemudian sekitar tahun 1982, ia memutuskan menjadi mualaf serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Bukan sembarang mualaf biasa, Pak Djo bahkan memiliki mimpi besar untuk membangun 99 Masjid.

Setelah memeluk agama Islam, lingkungan Islam sangat menyambut hangat Djohari Zein. Selain itu, banyak juga yang bersedia membantu memberikan ilmu agama kepadanya.

Sementara itu, dalam bisnisnya, Pak Djo memiliki harapan agar kegiatan kom-

ersialnya bisa menjadi berkah. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa JNE sukses karena menggunakan 'manajemen spiritual'.

Pak Djo mengaku bahwa di setiap kegiatan, pasti ada anak yatim yang diundang dan disantuni. Itu sudah berjalan selama 29 tahun.

Kegiatannya pun bukan hanya sekedar memberikan nasi kotak, tetapi mengajak makandi restoran di mall, menonton film di bioskop hingga berbelanja di supermarket.

Dahsyatnya sedekah ini pun dirasakan langsung oleh Pak Djo. Salah satu diantaranya yakni saat krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak orang yang di-PHK sehingga Pak Djo bersedekah memberikan timbangan digital, mengajak orang-orang untuk berbisnis laundry, dan lain sebagainya.

Setelah itu, pada tahun 2000, penjualan online pun mulai menggeliat. Dan ditahun 2010, penjualan online meningkat 30-40% dari Rp 1 Triliun hingga hari ini sehingga JNE pun ikut terkerek. Pak Djo sangat yakin itu berkat sedekah timbangan digital yang ia berikan.

Selain itu, kesuksesan JNE hari ini, juga tak terlepas dari pentingnya komunikasi secara terbuka. Untuk diketahui, JNE hingga hari ini memiliki 23.000 karyawan di berbagai cabang di Indonesia. Sehingga, Pak Djo mengaku akan sulit bagi mereka untuk berkomunikasi jika tidak membuat kegiatan besar. Karenaitulah, Pak Djo membuat JNE Futsal Cop, JNE Idol Competition, dan lain sebagainya untuk membuat mereka saling mengenal meski dari cabang lain.

Pak Djo pun mengatakan, baik seorang pengusaha atau karyawan, itu harus saling memahami posisi kita.

"Sebetulnya, jangan dibedakan antara pengusaha dan karyawan. Pengusaha dan karyawan adalah dua pihak yang menjadi satu hingga tercipta sebuah prestasi," tukas Pak Djo.

Sejatinya, pengusaha dan karyawan saling membutuhkan sehingga dibutuhkan menjagasaling pengertian antara karyawan dan pengusaha.

2. JUSUF HAMKA

Pengusaha sukses Indonesia berdarah Tionghoa, Jusuf Hamka blak-blakan tentang kisah hidupnya yang memberanikan diri untuk belajar agama Islam hingga akhirnya menjadi muallaf.

Saat berbincang di chanel YouTube Denny Sumargo @curhat bang Denny Sumargo, Jusuf Hamka menceritakan

awal mulanya dia akhirnya pindah menjadi Muslim.

"Saya masuk Islam ini bukan ujug-ujug. Saya masuk Islam ini karena temen-temen saya di lingkungan saya dulu, Karanganyar, Pasar Baru, Krekot Bunder itu semua Muslim. Dulu saya Protestan. Saya bahkan waktu anak-anak waktu masih kelas 6 SD, saya selalu ikut panggung pakai baju daerah, pokoknya didandanin," ujamnya mengenang.

Ia menjelaskan, bahwa sejak muda adalah aktivits tapi mengaku tidak menemukan sesuatu yang nyaman.

"Waktu saya lihat temen-temen saya, kalau pagi saya mau pergi atau sore waktu mau main, orangtuanya berkata shalat dulu-shalat dulu. Saya jadi ingin tahu, karena ingin tahu jadi saya belajar. Saya jadi berpikir this is the time," kata Jusuf.

Dia mengaku kepada ibunya bahwa ingin masuk Islam. Namun ternyata ibunya malah mensupport.

"Nanti, mamah yang tanyain ke

"Saat dibawa ke rumah Buya Hamka, saya ditanya. 'Nak mau apa', tanya Buya.

'Yakin mau masuk Islam,' tanya Buya Hamka lagi. 'Yakin. Tapi saya harus tahu dulu syaratnya,' kata Jusuf Hamka.

"Syaratnya dua kalimat syahadat," kata Buya Hamka.

"Ah gampang, tapi saya harus baca teks. Saya hapalin dulu saya pulang dulu," ujar Jusuf Hamka saat itu.

"Gak boleh nak, kamu harus hari ini," kata Buya. "Loh Buya, kok maksa," tanya Jusuf kala itu.

"Saya bukan maksa nak, kamu harus ngerti, barang siapa didatangi orang mau masuk Islam dan saya tunda, kalau terjadi apa-apa pada saat kamu pulang, di kecelakaan dan dia masih dalam keadaan non Muslim, maka yang dosa saya," kata Buya Hamka.

"Saya kaget, akhirnya saya ikutin baca dua kalimat syahadat. Dan saat itu saya sudah masuk Islam," ujar Jusuf Hamka yang saat itu berusia 24 tahun.



papa soal mengenai saya ingin masuk Islam," ujamnya.

Jusuf mengaku kepada papahnya ingin masuk Islam, dan ternyata papahnya tidak bisa melarang, hanya mengingatkan harus bisa menjalaninya.

"Jadi itu semua karena Allah juga. Saya baca majalah, ada seorang pengusaha masuk Islam di Al-Azhar. Terus saya sebenarnya sudah dikhitan duluan waktu itu.

Ingin masuk Islam di Samarinda, tapi saya belum berani. Karena keluarga saya belum Muslim semua," ucap Jusuf.

"Saya tidak langsung masuk Islam, baru satu tahun kemudian setelah bilang ke orangtua saya. Saya ke Masjid Al-Azhar, di sana ketemu ustadz Djaini. Disana dibawa ke rumah Buya Hamka," tuturnya.

Pria yang terlahir dengan nama asli Alun Josef itu mengaku, sangat bahagia bisamenjadi bagian keluarga Buya Hamka. Bahkan dia sampai-sampai diberi nama Islam Jusuf Hamka.

"Beliau mengangkat saya sebagai anak biologisnya. Makanya diberi nama Jusuf Hamka. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi namanya sudah dikasih," kata Jusuf seperti dikutip dari channel YouTube CERITA UNTUNGS.

Ada sebuah pesan yang dipegang teguh oleh Jusuf dari mendiang sang ayahsambungunya, Buya Hamka. Buya meminta Jusuf untuk menyebarkan kebaikan Islam padateman-teman sesama keturunan Tionghoa. Hal itu harus agar supaya mereka kembalimengenal agama leluhurnya yakni Islam.

Diketahui, etnis Tionghoa dulu

banyak yang beragama Islam. Mereka juga menjadipenyebarkan Islam ke berbagai belahan dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah panglima perang China, Laksamana Cheng Ho.

"Pesan beliau, berdakwah di kalangan teman-teman keturunan Tionghoa. Ajak mereka kembali ke leluhur mereka. Agama leluhur mereka adalah Islam katanya, itu pesan beliau," ujar Jusuf.

Tak lama setelah dirinya masuk Islam, ia kemudian menikah dengan istrinya ditahun 1981. Maju ke tahun 1998, Jusuf Hamka dan istrinya harus melewati ujian yang berat.

Kala itu, ia mengalami kebangkrutan karena krisis ekonomi. Dua minggu tak bisamakan, namun perlahan bangkit kembali karena ditolong sang istri.

2. FITRIA JUSUF HAMKA

Nama Jusuf Hamka mungkin tak perlu diragukan lagi di Indonesia. Dia adalah seorang pengusaha sukses, namun juga dikenal dermawan dan taat agama. Jadi,

bukan hal yang aneh, kalau Jusuf Hamka jadi salah satu inspirasi bagi generasi muda saat ini, tak terkecuali bagi puterinya, Fitria.

Seperti ayahnya, Fitria Jusuf rupanya disebut sebagai salah satu pengusaha sukses. Hal ini karena memang

banyak dari usahanya yang memang maju. Bukan hanya itu, dirinya juga sempat menduduki jabatan-jabatan tinggi, yang hanya bisa ditempati oleh orang yang berkompeten.

Misalnya saja, Direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. dan posisi lainnya di beberapa fashion brand. Namun uniknya, anak dari Jusuf Hamka ini memang suka menggeluti banyak bidang. Dilansir dari laman Detik, ternyata perempuan yang satu ini, memang punya passion di bidang yang berbeda-beda, namun demikian semua ditekuni dengan serius hingga memperoleh keberhasilan.

Salah satu kisah yang paling berkesan dari Fitria Jusuf adalah saat dirinya memutuskan menjadi mualaf, mengikuti sang ayahanda.

Hal itu dilakukannya pada 12 Maret 2020 lalu di Masjid Lautze, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dengan disaksikan oleh Ustadz Zaitun Rasmin (Majelis Ulama Indonesia) dan ayahnya, Fitria Yusuf-fakhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat.

Ia memilih agama ini dan akan serius dalam menjalankan segala syariatnya. Jusuf Hamka, setelah putri tercintanya masuk Islam, kelak akan melanjutkan perjuangan dalam membangun 1.000 masjid 'Baba Alun'. Bahkan setelah diunggah di akun media sosial sang ayah, banyak dukungan dari netizen mengenai masuk Islamnya Fitria Jusuf ini.

Usut punya usut, orang yang melatarbelakangi Fitria untuk masuk Islam, tidak dan tak bukan adalah ayahnya sendiri, Jusuf Hamka. Ya, padahal ayahnya sendiri tak pernah memaksakan soal keyakinan pada anak-anaknya. Namun, melihat perilaku dari sang ayah, yang membuat hatinya jadi tergerak.

Setelah masuk Islam, Jusuf Hamka dikenal sangat dermawan dan peduli dengan sesama. Harta yang didapatkan, nantinya akan dikembalikan pada umat dan orang-orang yang membutuhkan. Hal tersebutlah yang membuat Fitria Yusuf juga mulai yakin dengan agama yang dianut oleh ayahnya. Dan akhirnya, hidayah datang dan dirinya memeluk agama Islam.

Ada hal yang menarik lagi dari kehidupan masa lalu dari Fitria Jusuf. Pasalnya, ia ternyata sudah akrab dengan Islam

bahkan masih kecil. Hal ini dibuktikan dengan beberapa foto yang diunggah dalam Instagram pribadinya. Ada foto ketika dirinya membawa Al-Qur'an dan mengenakan hijab seperti seorang santri kecil.

Kisah perjalanan mualaf dari Fitria Jusuf ini, memang sangat menarik. Padahal sudah dibebaskan masalah keyakinan oleh ayahnya, namun siapa sangka hidayah datang padanya. Dan saat ini, menjadi seorang Muslim yang harus teguh dengan pendiriannya.

4. LEE KANG HYUN

Belum banyak yang tahu, bagaimana kisah Lee Kang Hyun mualaf, eks bos Samsung yang

kini menjadi petinggi

di Hyundai Motor Asia Pacific ini. Apa alasan dia pindah agama?

Sebagian orang mungkin sudah mengenal siapa itu Lee Kang Hyun. Di Indonesia, dia sebelumnya dikenal sebagai bos

Samsung. Melalui tangan

dinginnya, Samsung berhasil populer di tengah masyarakat Tanah Air.

Setelah berhasil membawa Samsung terkenal dan populer, Lee Kang Hyun pun pindah ke Hyundai Motor Asia Pacific.

Dan kini, Lee Kang Hyun menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operating Officer (COO). Sangat menarik untuk mengulas sisi lain dari seorang Lee Kang Hyun.

Salah satunya adalah kisah saat Lee Kang Hyun menjadi mualaf dan membaca dua kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Benarkah dia mualaf atas ajakannya?

Lee Kang Hyun adalah pria kelahiran Seoul, Korea Selatan, pada 16 Juli 1966.

Dia datang ke Indonesia pada 1988. Namun, dia datang ke Indonesia bukan sebagai pejabat Samsung. Dia datang untuk mengunjungi sahabat pena-nya asal Indonesia.

Sebelumnya, keduanya melakukan korespondensi tentang agama Islam dan Indonesia.

Lee pun tertarik lebih lanjut dan memutuskan datang ke Aceh. Di sana, di tinggal selama sebulan di rumah temannya tersebut.

"Waktu itu saya belajar bahasa



Indonesia di UI (Universitas Indonesia) Fakultas Sastra selama 23 hari. Zaman itu, Bahasa Indonesia saya lebih bagus dibanding sekarang,” katanya.

Lee terkesan dengan keragaman Indonesia dan keramahmatan masyarakatnya.

Dia juga mulai mengenal agama Islam lebih dalam.

“Agama di sini sudah menjadi bagian kehidupan. Berbeda sekali dengan di Korea. Mayoritas memilih tidak beragama dan hal itu tidak jadi masalah,” ujarnya.

Lee makin tertarik dengan Indonesia dan berkeinginan untuk tinggal di Indonesia. Gayung bersambut, saat dia bergabung dengan Samsung dan diminta ditempatkan di Indonesia.

Pada 1993, dia pun bekerja di Samsung Indonesia, pabrik Cikarang Bekasi.

Bekerja di Indonesia, dia melihat ada korelasi signifikan antara agama dengan prestasi kerja.

Dari sinilah kisah Lee Kang Hyun menjadi muallaf dimulai. Lee Kang Hyun menjadi muallaf di Masjid Sunda Kelapa. Lee Kang Hyun pun makin tertarik dengan agama Islam dan membawanya kepada seorang mantan pejabat BNI berdarah Aceh, Roshim Hamzah.

Dia banyak belajar tentang agama Islam dan kaitannya dengan prestasi kerja.

Dia juga melihat ayah temannya di Aceh, mengajarkan agama Islam pada anak-anak.

“Ada sekitar 20 anak yang dia sekolahkan dan biayai,” ujar dia.

Sementara itu, ibu dari teman Lee mendirikan sebuah panti asuhan.

“Jadi saya benar-benar lihat sendiri, bagaimana umat Muslim berperilaku, kemudian saya diajari shalat,” katanya.

Ayah teman Lee yang kemudian dia anggap sebagai ayah angkat, lalu mengajarkannya ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Di masjid itulah, mantan bos Samsung itu menjadi muallaf dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Lee memutuskan menjadi muallaf pada 1994.

Dia mengaku cukup berat saat menjadi seorang yang baru pindah agama. Terutama saat bulan puasa tiba. Dia juga mengaku, pernah mendapatkan pengalaman spiritual yang tidak bisa dia lupakan.

“Susah dijelaskan dengan kata-kata,” kata Lee.

Lee biasa disapa ‘Pak Haji’ di kalangan wartawan senior. Meskipun, ketika itu dia belum pernah menuaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

“Nama saya KH Lee, mungkin orang-

orang memanggil ‘Kiai Haji Lee, jadi sekalian didoakan,” katanya. Padahal KH Lee maksudnya adalah Kang Hyun Lee.

Meski demikian, ternyata Lee pernah melaksanakan ibadah umrah.

“Tapi saya sudah berjanji kepada istri saya akan berangkat haji,” ujarnya.

Istri Lee adalah wanita berdarah Sunda, bernama Yuliani yang dia nikahi pada 1996. Dari perkawinannya, mereka dikaruniai tiga orang putra. Setelah muallaf, Lee mengaku terus memperdalam agama Islam.

5 HERMANTO WIJAYA

Nama, Hermanto Wijaya dikenal sebagai pengusaha barang-barang elektronik di Palembang. Toko Jaya Raya Elektronik yang kini berganti menjadi toko Jaya Raya Solution merupakan salah satu toko elektronik besar di Palembang.

Keputusan Hermanto Wijaya untuk

Citra Grand City.

Selain orang ternama di Sumsel, terlihat pula ratusan masyarakat yang terlihat antusias, ingin menjadi saksi dari momen bersejarah bagi Hermanto Wijaya.

Selain itu, dalam agenda acara pemerintahan provinsi Sumatera Selatan, Jumat (3/5/2019) acara pengucapan syahadat oleh Hermanto Wijaya pukul 13.30 di Masjid Raya Citra Grand City.

Bahkan undangan untuk menghadiri pengucapan syahadat oleh Hermanto Wijaya, masif beredar di kalangan jurnalis.

Hal yang sama juga dimana akun instagram hits Palembang, bedesau juga membagikan foto Hermanto Wijaya tengah memakai baju gamis warna putih memakai kopiah warna putih.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Sumsel, H. Ahmad Affandi mempunyai



muallaf ini, telah beredar sebelumnya melalui media sosial. Saat itu, foto dirinya sedang memilih baju koko (baju muslim) tersebar di Facebook.

Hermanto Wijaya mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Raya Citra Grand City, Jumat (3/5/2019).

Prosesi pembacaan syahadat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di Sumatera Selatan. Mulai dari Haji Halim (Alim), dan Mantan Gubernur Sumsel, Syarif Oesman hingga Ketua MUI Sumsel, Aflatus Muchtar. Bahkan juga disaksikan langsung Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Selain itu, hadir pula selebgram Palembang, Amir Meletek Dewek, serta Cek Mariayang turut hadir di Masjid Raya

cerita sendiri tentang Hermanto Wijaya.

“Hari ini kita akan mendapat saudara seiman yang baru, yakni saudara Hermanto Wijaya,” kata Ustadz Didi, Jumat (3/5/2019).

Kabar masuk Islamnya Ko HW, begitu ia bisa disapa, memang telah berhembus sejak beberapa waktu lalu. Namun kepastian KO HW akan mengucapkan dua kalimat syahadat adalah pada Jumat ini.

“Beliau itu (Ko HW) sudah lama ingin masuk Islam. Pernah saya tanya ‘apa benar (ingin menjadi muallaf)?’ Beliau jawab iya,” ungkap Ustadz Didi.

“Kita doakan proses pengucapan dua kalimat syahadat saudara kita berjalan lancar,” tutup Ustadz Didi. ♦mt/berbagai sumber

KITA PASTI MENANG: 60 MOTIVASI AL-QUR'AN DAN HADITS BAGI ORANG BERIMAN

MASYA Allah, ini adalah buku motivasi yang sangat menginspirasi dan menguatkan hati untuk senantiasa berpegang di jalan Allah SWT. Motivasi dan nasihat di dalam buku ini sangat kuat, karena dinukil dari Ayat-ayat Al Quran dan Hadits-hadits pilihan.

Salah satu kisahny adalah dalam kitab Faidh Al Qadir, Imam Al Haramain berkata, "Apabila kamu mendengar keadaan orang-orang kafir dan keabadian mereka di neraka, maka janganlah kamu merasa aman atas dirimu sendiri karena masalah ini sangat genting. Kamu tidak mengetahui ketetapan apa yang telah ada bagimu di alam ghaib. Janganlah kamu terpedaya dengan jernihnya waktu, karena di baliknya ada bencana-bencana yang tersembunyi."

Peringatan penting di sini adalah janganlah kalian terpedaya -bagi pencari kebenaran- dengan diluaskanya rezeki, harta benda, kekuasaan, bangunan. Bisa jadi engkau silau atasnya. Kita dituntut untuk memiliki pandangan tajam terhadap keadaan diri sendiri dalam bertafakkur kepada Allah. Apakah kita bergelimang nikmat atau kita istidraj.

Dalam hal kemenangan, janganlah kita lalai dan istidraj, seperti disampaikan Imam al Mawardi bahwa ada 5 hal berlaku istidraj:

PERTAMA: Allah mengazab mereka dalam keadaan lalai dan tidak menyadarinya.

PENULIS
Dr. Khalid Abu Syadi
COVER
Hard Cover
ISI
512 Halaman (2 Color)
BERAT
600 Gram
UKURAN
15 x 23 cm
HARGA
Rp128.000
PENERBIT
Al Kautsar, Jakarta
Cetakan: 2022a

KEDUA: Allah menyusuli nikmat dengan keburukan, dan membuat mereka lupa terhadap taubat.

KETIGA: Allah mengazab mereka di tempat mereka berjalan.

KEEMPAT: Allah menarik mereka kepada azab dengan cara mendekatkan mereka kepadanya sedikit demi sedikit hingga azab itu menimpa mereka tanpa mereka sadari.

KELIMA: Dicoba dengan kebaikan. Dan betapa banyak orang yang tertipu pujian dan orang yang terpedaya dengan ditutupi aibnya.

Sesungguhnya, Allah menetapkan kemenangan itu tidak ditentukan dengan banyak atau sedikitnya jumlah orang, melainkan kemenangan itu datang dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sebagaimana Allah tegaskan, "Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Anfal 10)

Selama kemenangan itu datangnya dari Allah, maka janganlah sekali-kali membandingkan dengan kekuatan kalian dengan kekuatan musuh, karena sesungguhnya Allah punya ukuran kekuatan sendiri yang kita tidak mengetahuinya. Bahkan pertolongan Allah untuk

sebuah kemenangan pun bisa datang dari arah mana pun dengan waktu yang tidak kita ketahui saat yang tepat. Kita hanya berusaha untuk terus menjalankan kebenaran dan berusaha untuk menang dari musuh-musuh Allah. Dan diantara jalan-jalan pertolongan Allah itu adalah:

- Allah memperlihatkan musuh-musuh tampak jelas di hadapan kita.
- Melakukan hal sebaik mungkin sehingga orang-orang kafir melihat orang mukmin dalam jumlah sedikit mempunyai banyak kelebihan dan tak punya rasa surut berhadapan.
- Allah menghujamkan rasa takut di mata para musuh sehingga mereka tunggang langgang.
- Allah mengendalikan faktor-faktor sebab ilahiyah untuk mendukung hambanya dan Allah melibatkan Kuasanya dengan angin, hujan sebagai penolong.

Ditegaskan pula oleh Allah pada firman-Nya, "Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan". (Qs. Al Maidah 100)

Dijelaskan dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, dikatakan, "Hai Rasulullah, katakanlah bahwa tidak sama antara yang buruk dengan yang baik; orang kafir tidak sama dengan orang mukmin, orang bodoh tidak sama dengan orang yang berilmu, kegelapan tidak sama dengan cahaya, dan harta yang haram tidak sama dengan harta yang halal. Maka janganlah tertipu dengan jumlah keburukan yang melebihi jumlah kebaikan, karena bisa jadi Allah memperbanyak harta orang-orang kafir dengan hikmah yang terkandung dibalikny yang Dia ketahui.

SINGKAT kata, ini buku yang layak menjadi pegangan umat Islam, karena sangat menginspirasi dan memotivasi untuk senantiasa bertakwalah kepada Allah SWT. Bahwa setiap Muslim harus memiliki untuk berbuat kebenaran tanpa mengenal takut. Manakala ada kendala dan hambatan, spirit unggul dan menang harus selalu melibatkan Allah SWT. ♦ros





ANDA INGIN BERLANGGANAN

3 EDISI (3 BULAN) RP 125.000,- 6 EDISI (6 BULAN) RP 250.000,- 12 EDISI (12 BULAN) RP 500.000,-



(021) 791 96781
(021) 791 96786



**HUBUNGI: PROMOSI/SIRKULASI
PT. INTER MEDIA DIGITAL**

Jalan Raya Kalibata No. 8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

EMAIL : moeslimchoice@gmail.com

WEBSITE: www.moeslimchoice.com

FACEBOOK : moeslimchoice

TWITTER : @moeslimchoice



Tatar Krimea: ETNIS MUSLIM YANG TERJEBAK DALAM PERANG RUSIA-UKRAINA

Rusia secara resmi menyatakan perang terhadap Ukraina pada Kamis (24/2). Pengumuman perang ini disampaikan langsung oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang memperingatkan tentara Ukraina untuk meletakkan senjata dan kembali ke rumah mereka.

Perang menimbulkan kekhawatiran atas warga sipil yang tinggal di Ukraina, terutama minoritas Muslim Tatar Krimea. Tatar Krimea adalah orang-orang Muslim Turki, yang telah diusir dari rumah mereka pada tahun 1944 dan 2014.

Serangan Rusia ke Ukraina pada Kamis (24/2), mencatatkan seorang anak laki-laki Muslim Tatar Krimea berusia 17 tahun menjadi korban pertama. Korban tinggal di desa Semihatka, dekat Genicesk, Kherson, Ukraina.

"Saya berbicara Tatar, saya tidak punya apa-apa untuk mengatakan kepada Rusia! Semoga Allah menyelamatkan kita dari setan-setan (Rusia) ini!" katanya.

Tatar Krimea adalah etnis minoritas Muslim, yang berasal dari Semenanjung Krimea, di pantai utara Laut Hitam. Mereka telah diperlakukan tidak bersahabat, bahkan sampai pada pangusiran.

Semenjak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dan semenanjung itu menjadi dua Muslim Tatar Krimea kembali ke Tanah Air mereka. Namun kini, mereka

harus kembali terjepit dengan aksi Rusia yang menyerang Ukraina.

Muslim yang Terlupakan

Delapan tahun lalu, Federasi Rusia mencaplok Semenanjung Krimea, setelah pasukan tak bertanda berbaris ke wilayah Ukraina dan mengambil alih parlemen lokal. Dalam enam bulan pertama tahun ini, Tatar Krimea yang telah tinggal di semenanjung itu, setidaknya sejak abad ke-15, menyumbang sebagian besar jumlah aksi penangkapan, sekitar 138

dari 200, yang dilakukan oleh otoritas Federasi Rusia.

Angka-angka, yang dirilis oleh Pusat Sumber Daya Tatar Krimea (CTRC), sebuah organisasi non-pemerintah, hanya menceritakan sebagian kecil dari kisah lengkap ketidakadilan dan pelecehan, yang telah dialami masyarakat sejak pencaplokan semenanjung itu.

Dari 73 penggeledahan rumah yang tercatat, 55 dilakukan di rumah-rumah minoritas Tatar, dan dari 69 penahanan, 57 adalah dari Tatar Krimea, menurut CTCR. Saat ini, Tatar Krimea tidak dapat menikmati keamanan dan kenyamanan, bahkan di tanah leluhur mereka. Namun, mereka tidak asing dengan penindasan dan pelecehan.

Pembantaian Stalin

Pada 1944, diktator Soviet Joseph Stalin menuduh Tatar Muslim berkolaborasi dengan Nazi Jerman dan mengkhianati negara, dan memerintahkan deportasi mereka dari semenanjung. Deportasi ini dilancarkan oleh Larenty Beria, kepala polisi rahasia dan keamanan Uni Soviet, yang bertindak atas nama Josef Stalin.

Dalam waktu tiga hari, polisi rahasia NKVD menggunakan kereta-kereta ternak untuk mendeportasi orang-orang Tatar Krimea, termasuk wanita, anak-anak, lansia, dan bahkan komunis dan anggota Tentara Merah. Mereka dipindahkan secara paksa di wilayah ribuan kilometer jauhnya.

Mereka sendiri merupakan salah satu dari sepuluh suku bangsa yang terkena dampak kebijakan perpindahan populasi di Uni Soviet, yang dicanangkan oleh Stalin. Deportasi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman kolektif, karena tuduhan orang-orang Tatar Krimea berkolaborasi dengan Nazi Jerman.

Sumber-sumber Soviet mendakwa mereka sebagai pengkhianat, tetapi kaum Nasionalis Tatar membantahnya dan mengklaim bahwa program deportasi ini adalah bagian dari rencana Soviet untuk mengakses Selat Dardanelles dan memperoleh wilayah di Turki, yang dihuni oleh kerabat etnis Tatar.

Walaupun Nazi awalnya menganggap rendah orang-orang Tatar Krimea, kebijakan mereka berubah, akibat perlawanan yang sengit dari Uni Soviet. Banyak tahanan perang Soviet yang direkrut oleh Wehrmacht dan dimasukkan ke dalam satuan-satuan pendukung militer.

Sementara itu, 15.000 hingga 20.000 orang Tatar Krimea berhasil diyakinkan untuk membentuk battalion pertahanan

diri untuk melindungi desa-desa Tatar Krimea dari serangan-serangan kelompok partisan Soviet serta untuk memburu mereka.

Moskow berhasil melakukan pemindahan secara paksa penduduk sekitar 230.000 ke negara-negara Soviet lainnya, sebagian besar Uzbekistan. Selain itu, sekitar 80.000 rumah dan 360.000 hektare lahan di Krimea ditinggalkan.

Pada saat itu, jumlah Tatar Krimea

revolusi Ukraina 2014 dan berlangsung di tengah kerusuhan yang meluas di Ukraina selatan dan timur.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan penganiayaan terhadap Tatar Krimea, yang kabarnya mencapai sekitar 300.000, telah berlanjut sejak status referendum 2014. Bentuknya tidak hanya penangkapan, penggeledahan dan pemenjaraan, tetapi juga upaya untuk merusak budaya dan sejarah mereka,



hampir seperlima dari populasi semenanjung itu. Menurut survei para aktivis politik pada 1960-an, lebih dari 46 persen Tatar Krimea tewas karena penyakit dan kelaparan selama tiga tahun pertama deportasi.

Sebagian besar penduduk dapat kembali ke Krimea setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Tatar Krimea mulai mengadakan upacara setiap 18 Mei untuk memperingati pemindahan penduduk secara paksa. Namun, pertemuan itu telah dilarang oleh otoritas Rusia sejak pencaplokan Krimea pada 2014.

Pengambilalihan semenanjung itu, mengikuti intervensi militer di Krimea yang dilakukan Federasi Rusia setelah

menurut kelompok tersebut.

Beberapa aktivis menuduh Federasi Rusia memalsukan sejarah Tatar Krimea untuk membenarkan penganiayaan terhadap penduduk.

"Selama tahun ajaran ini, ditemukan bahwa buku pelajaran kelas sepuluh mengatakan Tatar Krimea berkolaborasi dengan Nazi Jerman," kata Eskender Bariiev, ketua CTCR, kepada Arab News.

Para aktivis juga mengatakan, otoritas Federasi Rusia sedang berusaha untuk mengubah nama etnis Tatar Krimea, yaitu nama yang diberikan kepada kelompok etnis tertentu. Di antara pengganti kontroversial untuk "Tatar Krimea" yang dilayangkan adalah Tatar, Tatar diaspora,

minoritas Tatar atau Tatar Krimea, kata Bariiev.

Sebuah laporan CTRC mengatakan 42 dari 60 tahanan politik Ukraina yang ditahan secara ilegal di wilayah Rusia adalah anggota Hizbut Tahrir, sebuah organisasi politik internasional yang berusaha untuk "mendirikan kembali satu kekhalifahan Islam."

Pada saat yang sama, sejumlah aktivis Tatar Krimea telah dilarang memasuki semenanjung, beberapa hingga 30-50 tahun. Salah satunya adalah Bariiev dari CTRC, yang tidak diizinkan kembali ke tanah airnya sejak 2015.

Muslim Tatar terkemuka lainnya, yang juga dilarang memasuki Krimea adalah Mustafa Dzhemilov, mantan ketua Majelis dan anggota parlemen Ukraina. Dia adalah salah satu dari mereka yang mengalami langsung pengasingan paksa komunitas di Uzbekistan.

Dzhemilov mengatakan, dia dilarang mengambil jurusan bahasa Arab di Tashkent, di Uzbekistan, karena etnisnya.

"Salah satu anggota komite penerimaan mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak menerima Tatar Krimea dan merekomendasikan agar saya tidak membuang waktu saya dan bergabung

dengan departemen yang berbeda," kata Dzhemilov kepada Arab News.

Dia yakin pihak berwenang mencap Majelis sebagai kelompok ekstremis karena badan perwakilan Tatar Krimea telah menolak untuk mengakui kedaulatan Rusia atas Semenanjung Krimea.

Framing dan Penculikan

Tidak cukup sampai di situ, para ahli meyakini Rusia sedang mencoba untuk mencapai beberapa tujuan dalam penganiayaan politik pada Tatar Krimea, salah satunya adalah perang informasi.

"Citra musuh harus dibentuk dan dipelihara secara berkala di televisi Rusia. Selama tujuh tahun sekarang, apa yang disebut mata-mata dan penyabot Ukraina telah digambarkan di sana, menggambarkan Tatar Krimea sebagai teroris dan ekstremis, kata Oleksandra Matviychuk, Ketua Dewan Pusat Kebebasan Sipil, kutip media Ukraina, Zmina, Juni 2021.

Olga Skrypnyk mengajar sejarah di Universitas Humaniora Krimea di Yalta juga mengakui hal ini. Dia menekankan bahwa dengan tindakan seperti itu Rusia terus akan mengintimidasi penduduk Krimea dengan tindakan teroris.

Aktivis HAM itu mengingatkan seju-

lah aktivis yang diculik dan ditemukan tewas sejak awal agresi Rusia. Hal ini seperti dialami Reshat Ametov di Krimea dan anggota parlemen Gorlovka Volodymyr Rybak.

Hubungan Tatar Krimea dan Khilafah Ustmani

Suku bangsa Tatar Krimea menguasai Ke-khan-an Krimea dari tahun 1441 hingga 1783. Sebagian besar penduduk Krimea memakai bahasa yang tergolong ke dalam rumpun bahasa Turki mulai memeluk agama Islam setelah Ozbeg Khan dari Gerombolan Emas memeluk Islam.

Gerombolan Emas atau Orda Emas adalah sebuah kekhanan Mongol-Turki dalam abad pertengahan yang wilayahnya membentang dari Eropa Timur hingga Siberia Barat. Didirikan sekitar tahun 1236 oleh suku nomaden Turki dan Mongol oleh Batu Khan yang memerintah 1236-1255.

Beberapa suku Tatar dan Mongol pada abad ke-13 bersama dengan pemimpin mereka Berke Khan dan Nogai Khan telah memeluk Islam. Pada abad ke-14 di bawah pimpinan Sultan Uzbeg, antara tahun 1312-1341 terjadi Islamisasi secara menyeluruh yang menstabilkan



Gerombolan Emas, karena penetapan Islam sebagai agama negara juga dikombinasikan dengan perombakan pemerintah.

Kekhanan Krimea sendiri adalah negara penerus Gerombolan Emas yang paling bertahan lama. Mereka sering terlibat dalam konflik melawan Moskwa dari tahun 1468 sampai abad ke-17, dan orang Tatar Krimea hampir setiap tahun menyerang wilayah-wilayah Slavia dan menangkap banyak orang untuk diperbudak.

Setelah Krimea dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1783, mereka sangat menolak kekuasaan Rusia. Maka dari itu, orang-orang Tatar mulai meninggalkan Krimea.

Antara tahun 1784 hingga 1790, dari jumlah penduduk sekitar satu juta, sekitar 300.000 orang Tatar Krimea pindah ke Kesultanan Utsmaniyah. Perang Krimea yang dimulai pada tahun 1853 kembali mengakibatkan keluaran massal orang Tatar.

Antara tahun 1855 hingga 1866, sekitar 500.000 Muslim (atau mungkin bisa mencapai 900.000) meninggalkan Kekaisaran Rusia dan pindah ke Kesultanan Utsmaniyah. Dari angka tersebut, sekitar sepertiganya berasal dari Krimea, semen-



tara sisanya berasal dari Kaukasus.

Kekaisaran Rusia sendiri memanfaatkan perpindahan ini untuk menggalakan proses Rusifikasi di Semenanjung Krimea dan mengisinya dengan orang Rusia, Ukraina, dan kelompok etnis Slavia lainnya; proses Rusifikasi juga terus berlanjut pada masa Soviet.

Menurut salah satu perkiraan, tiga perempat korban bencana kelaparan terse-

but adalah orang Tatar Krimea. Status mereka semakin memburuk setelah Josef Stalin menjadi pemimpin Soviet dan mulai melakukan penindasan-penindasan.

Setelah sekian dalam penindasan dan hidup di pengasingan, hari ini Rusia kembali menggempurnya dengan senjata-senjata canggih, akankah nasib mereka kembali menderita sebagaimana di era Joseph Stalin? ♦mt/Hidayatullah



NUSAIBAH BINTI KA'AB

WANITA YANG KEMATIANNYA DISAMBUT PARA MALAIKAT

Kisah ini mungkin telah sering kita dengar. Namun, sekedar mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini, semoga dapat mengembalikannya ghairah kita untuk juga bisa menteladani beliau, wanita yang 'berhati baja'.

Nusaibah Binti Ka'ab radhiyallahu anha, namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan.

Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya.

Hari itu Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya, Said sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dikejutkannya.

"Suamiku tersayang", Nusaibah berkata, "Aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang."

Said yang masih belum sadar sepenuhnya, tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu. Malah isterinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Said. "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang."

Said memandang wajah isterinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Said.

Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru berusia 15 tahun dan Saad yang dua tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup.

"Ibu, salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda, "Suami Ibu, Said baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid..."



Nusaibah tertunduk sebentar, "Inna lillah...." gumamnya, "Suamiku telah menang perang. Terima kasih, ya Allah".

Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan,

"Amar, kaulihat Ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah Syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan pagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?"

Amar mengangguk. Hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus".

Mata Amar bersinar-sinar. "Terima kasih, Ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu, seandainya Ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah".

Putera Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya

mengikut jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikitpun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Amar bin Said. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur".

Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah memberkatimu."

Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur, mereka menuju ke rumah Nusaibah.

Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita, "Ada kabar apakah gerangan?" serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya, "Apakah anakku gugur?.." Utusan itu menunduk sedih, "Betul...."

"Inna lillah...." Nusaibah bergumam kecil. Ia menangis. "Kau berduka, ya Ummu

Amar?"

Nusaibah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih, siapa lagi yang akan kuberangkatkan? Saad masih kanak-kanak."

Mendengar itu, Saad yang sedang berada tepat di samping ibunya, menyela, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Saad adalah putera seorang ayah yang gagah berani."

Nusaibah terperanjat. Ia memandang puteranya. "Kau tidak takut, nak?"

Saad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng, yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya, Saad hilang bersama utusan tentara itu.

Di arena pertempuran, Saad betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saad tersungkur mencium bumi dan menyerukan, "Allahu Akbar!.."

Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya.

"Hai utusan," ujarnya, "Kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang."

Sang utusan mengerutkan keningnya. "Tapi engkau wanita, ya Ibu...."

Nusaibah tersinggung, "Engkau remehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke Syurga melalui jihad?"

Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada.

Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum.

"Nusaibah yang dimuliakan Allah. Belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur".

Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur.

Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-



luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang. Ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir.

Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi, menyaksikan hal itu.

Ia bangkit dengan gagah berani. Diam-bilnya pedang prajurit yang tewas itu.

begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu.

Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya, "Isteri Said-kah engkau?". Nusaibah samar-sama memperhatikan penolongnya. Lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah baginda?" "Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun".

"Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku". "Eng-

tam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak.

Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa."

Masyaallah, Allahu Akbar.., Allahu Akbar.., Allahu Akbar..



Dinaiki kudanya. Lantas bagaikan singa betina, ia mengamuk.

Musuh banyak yang terbirut-birut menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang.

Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang, dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian.

Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau-kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu,

kau masih terluka parah, Nusaibah". "Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?"

Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkirbalikkannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh.

Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya.

Tiba-tiba langit berubah mendung, hi-

Tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di jaman sekarang.

Semoga Allah 'Azza Wa Jalla menempatkan mereka, dan kita semua di Syurganya disamping Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Aamiin.

Apa yang telah kita perbuat untuk mengekalkan Dienullah Islam?

Kisah penuh inspiratif ini seharusnya dapat menggugah jiwa juang kita, agar tidak cengeng melepas anak-anak yang sedang berjuang. Kalo ingin anak menjadi kuat, maka kita harus menjadi ibu yang kuat terlebih dahulu. Wallahualam bissawab. ♦



IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp. 50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp. 75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp. 25.000.000

Media Yang Tepat Untuk
Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC) 1 ALAMAN
UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN 1/2 CENTERSPREAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC) (186 X 124 MMK)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC), UKURAN 186 X 124 MMK (HORIZONTAL), 90 X 250 MMK (VERTIKAL)
- IKLAN ADVERTORIAL (FC) 1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN CENTERSPREAD (FC) DILUAR EDISI KHUSUS,
1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN COVER 2 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK
- IKLAN COVER 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK
- IKLAN DISPLAY (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 13, 15, 17 (FC)
1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE:

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai Dengan Topik Bahasan.
- Pilihan Halaman Iklan Yang Mudah Disimak Pembaca
- Harga Iklan Yang Bertabur Diskon Untuk Para Pelanggan



IKLAN CENTER SPREAD FC Rp. 80.000.000

● Contact Person : ZULFAHMI JAMBA

➤ 021 - 79196781

➤ 081380196507

➤ Email : moeslimchoice@gmail.com



MOESLIM CHOICE

EDISI 51 ● MARET 2021 / Th. V

ISSN_2614-2783



Rp 50.000

KEMENDAGRI
PERKUAT
**CORE VALUES ASN
BERAKHLAK**

HIDAYAT NUR
WAHID TOLAK
BPJS KESEHATAN
**JADI SYARAT
UMRAH & HAJI**

PESAN NABI
KETIKA MENDENGAR
SUARA ANJING

**ANJING MENGGONGGONG,
AZAN MALAH BERLALU**